

Menyongsong Era Digital bersama PMII Jakarta Selatan



ADE KURNIAWAN dkk.





**MENYONGSONG ERA DIGITAL
BERSAMA
PMII JAKARTA SELATAN**



Copyleft 2023

JUDUL:
Menyongsong Era Digital
bersama PMII Jakarta Selatan

PENYUSUN:
Ade Kurniawan dkk.

PENERBIT:
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Cabang Jakarta Selatan

EDISI:
Cetakan I - 2023



PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JAKARTA SELATAN

Surat An-Nisa' (4) Ayat 84

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِيَ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ
تَنْكِيلًا

Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu
dibebani melainkan dengan kewajiban kamu sendiri.
Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk berperang).
Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang
yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras
siksaan(Nya).

KATA PENGANTAR

Ade Kurniawan

(Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Jakarta Selatan)

PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) merupakan organisasi kemahasiswaan(kepemudaan) yang masih kental sampai saat ini tentang ke NU-an nya. Bagaimana tidak Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia didirikan atau dilahirkan oleh pemuda mahasiswa NU, makanya nilai-nilai ke NU-an selalu melekat didalam setiap gerakan PMII di seluruh Indonesia.

Kenapa sih mahasiswa atau pemuda harus ikut organisasi PMII?, dari segi Struktur hanya PMII organisasi yang mempunyai struktural yang lengkap,dari rayon setingkat fakultas bahkan ada di beberapa kampus karna kadernya banyak rayonnya menjadi perjurusan kuliah nya, komisiariat setingkat kampus, cabang setingkat kota atau kabupaten, kordinator cabang setingkat provinsi, dan Pengurus besar setingkat nasional. Menjadi satu-satunya organisasi kemahasiswaan islam yang didalam strukturalnya tidak ada dualisme kepemimpinan, dalam segi gerakan pmii selalu menjadi sorotan karena ketika kita membuat gerakan basis massa pmii selalu kompak dan disiplin, bahkan media hari ini dalam urusan organisasi kemahasiswaan islam hanya pmii lah yang menjadi acuannya.

Tidak dapat dielak era digital telah memberikan sumbangsih luar biasa dalam kehidupan manusia. Baik dalam mempermudah pekerjaan rumah, aktivitas belajar, membangun relasi, hingga soal karir. Berkat digital,

sepanjang pandemi masyarakat di seluruh dunia cukup terbantu. Seperti berbelanja cukup bermodalkan aplikasi di Handphone, sekolah atau kuliah hanya membutuhkan aplikasi temu online, dan kegiatan diskusi juga bisa dilakukan melalui aplikasi di Handphone kita. Saya pikir inilah yang disebut keuntungan dari perkembangan teknologi digital yang dikembangkan oleh manusia. Keuntungan ini juga sangat bermanfaat untuk pengembangan karir seorang mahasiswa. Dengan digital mereka bisa mengakses bacaan lebih luas lagi, juga bisa bekerja sembari kuliah, maupun mengikuti webinar-webinar online yang diadakan oleh orang-orang di seluruh dunia.

Di era digitalisasi kita Mudah Mengakses Literatur dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya terbatas pada buku dan jurnal di perpustakaan saja. Bahkan ada aplikasi dan situs website yang menyediakan buku maupun jurnal gratis. Seperti Ipusnas, Google Books, IBI Library, openlibrary.org, manybooks.net, dan ebookdirectory.com. Sedangkan jurnal bisa diakses melalui situs Google Cendekia, Perpustakaan, DOAJ, ScienceDirect, Moraref, Academia.edu, dan masih banyak lagi. Selain memudahkan akses literatur, berkat digital mahasiswa juga bisa mengikuti kegiatan nasional hingga internasional. Apalagi akhir-akhir ini banyak sekali berseliweran di media sosial informasi kegiatan online dari taraf nasional hingga internasional. Sebab digital mahasiswa dapat mengakses perlombaan gratis. Seperti lomba menulis, public speaking, melukis, reels Instagram, fotografi, sastra, dan seterusnya. Info perlombaan pun sangat mudah didapatkan di media sosial, khususnya di akun-akun Instagram yang menyediakan info lomba gratis hingga

berbayar. Berkat digital, mahasiswa bisa mengikuti grup atau komunitas internasional. Atau juga bisa mengikuti grup belajar bahasa Inggris yang isinya berasal dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, di media sosial juga bisa membangun relasi dengan mahasiswa dari negara lain. Digital bisa dimanfaatkan mahasiswa untuk menambah penghasilan dengan bekerja secara freelance. Seperti menulis di platform-platform digital, menjadi host di aplikasi, jualan online, membuka jasa editing, ojek Online, dan masih banyak lagi pekerjaan yang bisa dilakukan saat menjadi mahasiswa. Berkat digital dapat membantu mahasiswa mendapatkan informasi seputar beasiswa, magang, pertukaran mahasiswa, volunteer, dan KKN Internasional. Sehingga dengannya kualitas mahasiswa menjadi tinggi. Informasi seputar hal itu sangat mudah didapat, baik di situs-situs pemerintah, akun-akun seputar beasiswa, maupun situs negara asing. Semua itu bisa diakses dengan mudah dan tentunya gratis. Oleh karena itu pmii jakarta selatan hadir untuk terus berkembang dalam pertumbuhan jaman di era digitalisasi.

Ade Kurniawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
M. Fikri Hidayat Nasution - Nalar Kebangsaan dan Islam ..	1
Fikni Amalia - Strategi Penyebaran Aswaja di Kampus Umum	22
Befinka Figiel Yonas - PMII Merawat Keislaman dan Kebangsaan di Era Teknologi Digital 4.0	31
Muhammad Raihan Naufal Hakim - PMII di Era Teknologi Digital	39
Arif Taufiqurrahman - Implementasi Kemanfaatan Kader pada Sektor Bantuan Hukum menurut Tri Komitmen PMII	47
Kiki Asifah Sipa (Ahlussunnah wal Jama'ah [ASWAJA])	54
Arif Setiono - Keislaman dan Kebangsaan.....	74
Rizal Muhaimin - Interelasi Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Karakter Bangsa di era Digital 4.0	96
Tifla Habib Ghifari - PMII dan Strategi Gerakan Kepemimpinan	109
Jaka Afianto - Keislaman dan Kebangsaan	125
Buana Bhakti Alfatah - PMII dan Strategi Gerakan Kepemimpinan	143

Irman Trihandaya - Penanaman Nilai-Nilai Keaswajaan Para Kader PMII di Universitas PTIQ dan Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta	152
Muliadi - Strategi Pendampingan Kader PMII	160

M. Fikri Hidayat Nasution
(Nalar Kebangsaan dan Islam)

A. NALAR

Penalaran adalah proses berfikir yang bertolak belakang dari pengamatan indera yang menghasilkan beberapa pengertian dan proposisi sekaligus. Proposisi adalah arti dari kalimat itu dan bukan kalimat itu sendiri, tetapi hal yang dihasilkan oleh kalimat itu sendiri. Berdasarkan pengamatan indera yang sejenis, maka akan menghasilkan proposisi yang sejenis pula.

Proses penalaran ada dua:

1. Sunting pertimbangan tentang baik buruk dan akal budi. Setiap keputusan harus didasarkan nalar yang sehat.
2. Suntingaktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir logis jangkauan pikir kekuatan pikir.

1. Ciri-ciri penalaran sebagai berikut :

a. Proses Berfikir Logis

Diartikan sebagai kegiatan berpikir menurut logika tertentu. Pemikiran yang ditimbang secara obyektif dan didasarkan pada data yang sah.

b. Bersifat Analitik

Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Kegiatan penalaran tidak terlepas dari daya imajinatif seseorang dalam merangkai, menyusun,

dan menghubungkan petunjuk akal pikirannya ke dalam pola.

c. Rasional

Sesuatu yang sedang dinalar menjadi suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalam.

2. Jenis-jenis penalaran :

a. Penalaran deduktif

Proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Penalaran deduktif dianggap oleh banyak orang sebagai standar untuk penelitian ilmiah. Dengan metode ini, peneliti memulai dengan teori dan hipotesis, kemudian melakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis dapat dibuktikan benar dengan kasus tertentu. Dengan bentuk penalaran ini, jika ada sesuatu yang benar dalam kategori tertentu, maka hal tersebut dianggap benar untuk semua hal dalam kategori tersebut secara umum.

b. Penalaran induktif

Metode penalaran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan ditarik dari satu atau lebih fakta. Pemikiran induktif dimulai dengan pengamatan khusus atau contoh nyata dari kejadian, tren, atau proses sosial dan berlanjut secara analitis terhadap generalisasi dan teori yang luas berdasarkan kasus yang diamati. Biasanya disebut pendekatan dari

bawah ke atas, karena dimulai dengan kasus tertentu di lapangan dan bekerja hingga tingkat abstrak teori.

B. KEBANGSAAN

Kebangsaan adalah hubungan hukum antara orang dan negara. Kebangsaan memberi yurisdiksi negara atas orang dan memberi orang perlindungan dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang beragam dari suatu negara dengan negara lainnya.

Menurut kebiasaan dan konvensi internasional, hal ini adalah hak setiap negara untuk menentukan siapa saja yang merupakan warga negaranya. Klasifikasi tersebut adalah bagian dari hukum kewarganegaraan. Dalam beberapa kasus, penentuan kebangsaan juga diatur oleh hukum internasional umum-sebagai contoh, oleh perjanjian pada tanpa kewarganegaraan dan Konvensi Eropa tentang Kewarganegaraan.

Kebangsaan berbeda secara teknis dan legal dari kewarganegaraan, yang merupakan hubungan hukum yang berbeda antara seseorang dan negara. Kata benda nasional dapat mencakup baik warga negara dan bukan warga negara. Fitur yang membedakan yang paling umum kewarganegaraan adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik negara, diantaranya dengan memberikan suara atau berdiri untuk pemilihan. Namun, di sebagian besar negara-negara modern yang semua warga negara adalah warga negara, dan warga negara penuh selalu warga negara.

Wawasan kebangsaan muncul saat bangsa Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari penjajahan, seperti

yang dilakukan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil karena belum terdapat persatuan dan kesatuan, sedangkan penjajah terus menggunakan taktik pemecah belah. Namun, sejarah perlawanan para pahlawan membuktikan bahwa semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah padam dalam upaya mengusir penjajah dari Nusantara.

Selanjutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, berdasarkan persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia, akan memiliki kekuatan yang nyata. Kesadaran ini kemudian menjadi nyata dengan munculnya gerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang merupakan titik awal perjuangan nasional bangsa Indonesia, diikuti dengan munculnya gerakan nasional dalam bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, seni, pers, dan perempuan. Tekad perjuangan ini semakin jelas dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia", dan mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama perjalanan sejarah ini, muncul gagasan, sikap, dan tekad yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa dan didorong oleh cita-cita moral yang luhur dari rakyat. Sikap dan tekad ini merupakan pengembangan dari wawasan kebangsaan.

C. Empat Pilar Kebangsaan

Empat pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tenteram dan sejahtera serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh maka bangunan akan mudah roboh.

Empat pilar disebut juga fondasi atau dasar yang menentukan kokohnya bangunan. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat. Dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. NKRI
4. Bhinneka Tunggal Ika

1. Pancasila

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebagai dasar NKRI, Pancasila memiliki fungsi sangat fundamental. Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sifat Pancasila yuridis formal maka mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan berlandaskan pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis dan sebagai perilaku kehidupan.

Artinya, Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan atau cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan rujukan, acuan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa.

Dalam proses perumusan dasar negara, Presiden Soekarno menuangkan konsep dasar negara ke dalam pengertian dasar falsafah (*philosofische grondslag*) dan pandangan komprehensif dunia (*weltanschauung*) secara sistematis dan koheren. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

2. UUD 1945

Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Norma konstitusional UUD 1945 menjadi acuan dalam pembangunan karakter bangsa. Keluhuran nilai dalam Pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya.

3. NKRI

Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 disebutkan negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang

berbentuk republik. Dalam pembangunan karakter bangsa dibutuhkan komitmen terhadap NKRI. Karakter yang dibangun pada manusia dan bangsa Indonesia adalah karakter yang memperkuat dan memperkukuh komitmen terhadap NKRI. Bukan karakter yang berkembang secara tidak terkendali, apalagi menggoyahkan NKRI. Maka rasa cinta terhadap tanah air perlu dikembangkan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa melalui pengembangan sikap demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pembangunan karakter harus diletakkan dalam bingkai menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan memecah belah NKRI.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, Indonesia terdiri dari beragamnya suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosio-kultural, bersifat kodrati dan alamiah.

Keberagaman bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antara satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belah. Oleh sebab itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa.

D. ISLAM

Islam dalam bahasa Arab adalah bentuk kata benda infinitif kuadri-literal (maṣḍar rubā'ī). Bentuk kata kerja sempurna aktif trilateralnya (fi'īl māḍī ṣulāṣī mabnī ma'lūm) adalah salima (سلم, "selamat"). Arti semantik dari bentuk kuadri-literalnya ini adalah tunduk dan patuh (khaḍha'a wa istaslama), berserah diri, menyerahkan, memasrahkan (sallama), mengikuti (atba'a), menunaikan, menyampaikan (addā), atau masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian (dakhala fī al-salm au al-silm au al-salām). Semua istilah yang seakar kata dengan "islām" berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian.

Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri; ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukum-Nya. Pengertian "berserah diri" dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya.

"Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri (aslama) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan." (QS. Ali Imran [3] : 83).

➤ Umar bin Khattab:

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, agama islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak.

➤ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at Tawaijiri:

Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengesakan-Nya dan melaksanakan syariat-syariat Nya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan.

➤ Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab:

Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesakan-Nya, tunduk serta patuh kepada Nya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya.

➤ Hasan Al Basri:

Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan.

➤ Mustafa Abdur Raziq:

Islam adalah agama (ad din) peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang dapat membawa dan mendorong umat untuk menganutnya untuk menjadi satu umat yang mempunyai rohani yang kuat.

➤ Gaffar Ismail:

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berisi kelengkapan dari pelajaran-

pelajaran meliputi kepercayaan, seremoni peribadatan, tata tertib penghidupan abadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia kehidupan yang kedua (akhirat).

➤ Syaikh Mahmud Syaltut:

Islam itu agama Allah yang diperintahkan untuk mengajarkannya tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya.

E. KEBANGSAAN DAN ISLAM

Hubungan Islam dengan kebangsaan bisa dilihat dari pentingnya menegaskan nilai-nilai universal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang dimaksud adalah kebenaran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, perpaduan, kebaikan, keindahan dan lain sebagainya.

Sebagai misal, dalam al-Qur'an, surah al-Anfal (6) ayat 41 dikatakan bahwa tanah-tanah negeri yang ditaklukan oleh tentara Islam dibagikan untuk tentara yang menaklukkannya, fakir miskin, dan lain sebagainya.

Wa in janahū lis-salmi fajnah lahā wa tawakkal 'alallāh, innahū huwas-samī'ul-'alīm

Artinya: *“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader (SDM) dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut. Bukan hanya memahami namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan.

1. Islam dan Karakteristiknya

Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul

Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, al-Qur'an dan al-Hadits. Seperti yang dikatakan oleh Rahman (1987:49), sesuai dengan al-Qur'an bahwa Islam itu sarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial.

Masih dalam definisi Islam, kata Islam oleh ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga

yang bernama Islam. Padahal, kata Islam dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 85 "Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi", semestinya dipandang secara substansial.

Seperti dijelaskan oleh imam Raghib al-Isfahani, Islam itu ada dua macam;

1) Islam di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja; 2) Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah dia tetapkan dan tentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imron ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman.

Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar institusi agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas symbol yang bersifat legal-formal seperti KTP maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang (pakaian, dan atribut-atribut lainnya), namun lebih pada kepasrahan mutlak pada Yang Maha Kuasa. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat riya' (ingin dipuji orang lain) maka amalnya pasti tertolak oleh-Nya. Sebab, tidak pasrah kepada-Nya, ada rasa ingin dipuji oleh selain-Nya; sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti

kepasrahan, ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya.

Oleh sebab itu, sebagai umat muslim kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman bukan sekedar Islam dibawah iman. Sehingga keismalan kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepadaNya. Itulah inti dari Islam yang sejati; pasrah, tunduk, dan patuh.

Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki baraneka karakteristik. Seperti yang dijelaskan oleh Tabrani (2015: 76-93), Islam memiliki berbagai karakteristik; bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian Islammencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

2. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme (1999:3), wawasan kebangsaan hanya merupakan cara

pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktifitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah Negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah dan identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas.

Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian; pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan dan identitas; kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas, seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama; ketiga, pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis; keempat, independensi politis yang berwujud sebuah Negara yang merdeka.

Pengejawantahan gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan, ia senantiasa menimbulkan pro-kontra di dunia Islam. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus

penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap sekular. Menurut Salim Ali al-Bahnasawi dalam bukunya Wawasan Sistem Politik Islam (1995: 37-38), penolakan-penolakan yang terjadi dikalangan komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa, gagasan tersebut mengarah pada “agama baru” yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadapnya tanpa ada loyalitas kepada yang lain.

Alasan lain, bahwa ide nasionalisme bersumber dari Barat yang berarti kristen. Selain alasan tersebut kehadiran nasionalisme sekuler menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Karena nasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral.

Nasionalisme religius/Negara religius merupakan sintesa dari Negara sekular di satu sisi dan Negara agama di sisi lain. Menurut Mark Juergensmeyer dalam bukunya Menentang Negara Sekular (1998: 233), nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular diantaranya; pertama, moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Kedua, justifikasi dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. Ketiga, penggunaan

nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religious sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi.

Namun perlu dipahami, bahwa nasionalisme religious yang dimaksud bukan nasionalisme religious yang membawa aroma kekerasan dan cenderung mengarah pada fundamentalisme agama, tetapi nasionalisme religious universal yang merupakan produk sintesa anatar nasionalisme dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama.

Untuk itu, nasionalisme religious yang mungkin menjadi harapan alternatif adalah; pertama, nasionalisme yang merupakan produk sistesis antara nasionalisme modern dan agama; kedua, proses sintesa ini harus diawali dengan kesadaran saling menghormati dan mebutuhkan; ketiga, gagasan dan gerakan ini melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan tujuan bersama; keempat, gagasan dan gerakan ini bersumber dari nilai-nilai religiousitas universal sebagai titik temu nilai nilai yang dianut oleh seluruh elemen beragama.

Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah, bahwa Indonesia bukan Negara sekular dan juga bukan Negara agama, melainkan Negara religious. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus

persoalan Negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. Sebaliknya jika Islam dipaksa pada fungsi suplemen dalam Negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang konduktif bagi tegaknya keadilan, egalitarisme, dan demokrasi.

3. Relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan

Relasi Agama (Islam) dengan negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini tema tersebut senantiasa ramai diperbincangkan. Tidak hanya diperbincangkan namun sebagian kalangan sudah mulai membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiyah, ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan berbagai aturannya pun harus mengacu pada hukum Islam.

Setidaknya ada tiga macam respon dalam menanggapi relasi Islam dengan Negara menurut Gus Dur, yaitu respon integrative, respon fakultatif, dan respon konfrontatif. Respon integratif, berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan Negara. Sedangkan sikap responsif fakultatif berarti jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen maka mereka akan berusaha membuat

perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Dan sikap konfrontatif, merupakan sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami.

Dengan adanya tiga macam respon terhadap relasi Islam dengan Negara, penulis menilai bahwa para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respon intergatif. Sehingga Islam semestinya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam, bukan sekedar memperlihatkan simbol/formalisasi Islam, melainkan Islam harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Ketika sikap tersebut sudah menjadi pilihan yang paling realistis, dan sudah termanifestasikan dan sistem Negara, maka sebagai warga Negara semestinya mentaati apa yang telah menjadi keputusan tersebut. Dengan tanpa menghilangkan sikap kritis, agar Negara (pemerintah) juga berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan. Keputusan-keputusannya harus senantiasa dijaga, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI merupakan keputusan yang sudah Final.

Indonesia bukanlah Negara sekular, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan Negara. Indonesia juga bukan Negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum Negara. Indonesia merupakan Negara religious yang

memposisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternative untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. (Samud, 2016: 34-35). Yang kedepannya akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama, mengingat Indonesia merupakan Negara yang multikultur dan sangat plural.

Islam pun sesungguhnya tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam menunjukkan bahwa agama itu lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab pada saat itu. Sehingga alQur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang dating dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat.

Fakta historis ini merupakan alasan mengapa Islam memusatkan perhatiannya pada signifikansi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Islam tidak mempunyai seperangkat teori-teori politik yang kohern atau teori pemerintahan yang lengkap, tetapi Islam hanya dapat digunakan untuk membangun kerangka atau persepsi yang lebih tepat tentang kehidupan yang baik dengan suntikan moral.

F. BENANG MERAH

Dalam penulisan ini dapat kita tarik benang merah atau kesimpulan yang dapat kita pahami lebih singkatnya adalah Indonesia bukanlah Negara sekular, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan Negara. Indonesia juga bukan Negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum Negara. Indonesia merupakan Negara religious yang memposisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternative untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa.

Nasionalisme religius/Negara religius merupakan sintesa dari Negara sekular di satu sisi dan Negara agama di sisi lain. nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular diantaranya; pertama, moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Kedua, justifikasi dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. Ketiga, penggunaan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religious sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi.

Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah, bahwa Indonesia bukan Negara sekular dan juga bukan Negara agama,

melainkan Negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan Negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara.

Fikni Amalia
(Strategi Penyebaran Aswaja di Kampus
Umum)

Penyebaran ilmu agama Islam oleh mahasiswa atau lebih dikenal dengan dakwah kampus adalah merupakan sebuah tahapan dakwah terpenting dalam dakwah mahasiswa. Begitu pula dalam berdakwah di kampus, seseorang yang disebut dengan Aktivis Dakwah Kampus (ADK) harus memahami tentang dakwah itu sendiri dan tentunya tentang lembaga dakwah kampus. Lembaga Dakwah Kampus salah satunya berfungsi sebagai sebuah wadah para aktivis dakwah mahasiswa yang memiliki jiwa dan komitmen terhadap dakwah yang militan.¹ Menyebarkan Islam *rahmatan lil alamin* tentu sangat penting saat ini mengingat banyak mahasiswa yang mulai keliru dalam memahami Islam serta adanya berbagai penyusup yang justru ingin mengikis kedaulatan NKRI.

Kampus merupakan tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki kemauan keras untuk maju, baik jasmani, rohani, maupun pikiran. Kampus juga merupakan arena bagi manusia yang mempunyai intelektualitas tinggi, artinya menonjol aspek argumentasi, pemikiran, gagasan, konsep dan solusi intelektual. PMII merupakan sebuah komunitas yang memiliki peranan penting untuk melakukan dakwah itu dengan cara kekinian.

¹ Herlina Widiati, "Strategi Dakwah Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Meningkatkan Religiusitas Mahasiswa (Studi pada LDK Babussalam Untirta Serang Banten)," *Skripsi*. Universitas Islam Negeri "SMH" Banten 2018.

Kampus, khususnya yang berbasis keislaman menjadi tempat bagi manusia yang mempunyai keseimbangan dalam tiga hal, yakni iman, ilmu dan teknologi. Tiga hal tersebut dapat dijadikan senjata bagi kalangan akademisi dalam memerangi kemerosotan di berbagai sendi di Indonesia, khususnya merosotnya moral/akhlak akhir-akhir ini. Keunggulan para gladiator kampus yang mempunyai idealitas, rasionalitas, intelektualitas dan profesionalitas tinggi dapat menjadi pondasi dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Tentu ini menjadi potensi bagus dalam bidang dakwah. Dakwah yang sejatinya menyeru kepada jalan agama Allah SWT, penghancuran jahiliyah dengan segala bentuknya, baik jahiliyah pola pikir maupun moral dapat dilakukan oleh para pembawa risalah Islam di kampus. Lebih tepatnya adalah dakwah kampus.

Dakwah kampus merupakan implementasi dakwah *Ilallah* di lingkup Perguruan Tinggi, dimaksudkan untuk menyeru kalangan akademisi ke jalan Islam dengan memanfaatkan berbagai sarana formal/informal yang ada di kampus. Dakwah kampus juga merupakan bagian kecil dari jalan panjang dakwah Islam yang dianggap bernilai penting. Sementara akademisi sendiri merupakan komunitas kecil, elit, yang terdiri dari sedikit orang yang beruntung untuk mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Juga dipercaya oleh masyarakat dan pemegang kekuasaan negara sebagai komunitas yang memiliki kapasitas keilmuan, intelektualitas dan profesionalitas lebih dibanding komunitas lainnya. Karena itu, berdakwah di kalangan akademisi berarti mengajak komunitas yang memiliki daya gerak tinggi (dengan kapasitas idealitas, rasionalitas, intelektualitas dan

profesionalitas) terhadap kondisi sosial. Artinya ini akan membantu pencapaian tujuan dakwah secara umum, yakni transformasi menuju masyarakat Islami.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa dakwah kampus bergerak di lingkungan masyarakat ilmiah. Karena itu, dakwah yang dijalankan harus dapat mencerminkan keilmiahannya selayaknya sebuah Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai pendekatan atas asas strategi dakwah dilihat dari aspek sosiologis. Aspek sosiologis strategi dakwah dapat diartikan sebagai salah satu asas yang harus diperhatikan dalam menjalankan strategi dakwah yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya politik pemerintahan setempat, mayoritas agama di suatu daerah, filosofis sasaran dakwah, dan sosiokultural sasaran dakwah.

Sebagai pemrakarsa perubahan sosial, secara individu mahasiswa harus mampu memberdayakan diri terlebih dahulu. Artinya mampu bersikap dan berpola perilaku positif secara produktif. Bagaimana mungkin mampu memberdayakan orang lain kalau mereka sendiri belum bersikap dan berpola perilaku positif secara produktif. Sangat rugi jika mahasiswa yang berada di usia produktif tidak menghasilkan karya intelektual dan karya lain dalam bentuk material. Dirjen Dikti pernah menyebutkan, pada tahun 2012 terdapat 160 ribu dosen di Perguruan Tinggi, di mana 80 ribu orang di antaranya bergelar Magister dan 15 ribu bertitel Doktor. Sedangkan jumlah mahasiswa di Indonesia sekarang sebanyak 4.657.483 orang. Peran seluruh mahasiswa Indonesia yang jumlahnya jutaan orang tersebut sangat urgentif dalam merintis, memprakarsai dan memimpin

berbagai perubahan sosial menuju kondisi yang lebih prospektif dan cerah. Dalam dunia dakwah, posisi mahasiswa juga sangat urgen sebagai pelaku dakwah. Mahasiswa memposisikan dirinya menjadi pribadi yang mempunyai andil besar terhadap perubahan di masyarakat. Mahasiswa menjadi bagian dari track record perubahan yang telah diupayakan untuk menjadi lebih baik, kreatif, dan inovatif. Dengan pemikiran konstruktif menuju Islam yang satu dan semangat kebangkitan Islam yang selalu berkobar, menjadikan mahasiswa sebagai tokoh penting dalam perkembangan dakwah masa kini. Mahasiswa dapat memainkan perannya sebagai “*agen of change*” untuk kepentingan Islam. Karena itu tidak heran jika perubahan di dunia ini berangkat/berawal dari para pemuda yang salah satunya dari mahasiswa.

Dalam artikel ini, penulis menawarkan pergerakan Islam yang ramah memiliki metode yang lebih millennial dengan cara mengikuti alur. Pergerakan mahasiswa harus mengikuti pangsa yang lebih besar agar generasi bangsa tidak mengambil jalan yang salah dalam memperkuat NKRI.

Kondisi di kampus umum di Indonesia di dominasi oleh paham selain ahlussunnah wal Jamaah, paham itu sangat disayangkan sebab ahlussunnah dikenal dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, sedang NU dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di kampus-kampus umum memiliki beragam pemahaman yang bisa menghilangkan pemahaman ahlussunnah wal jamaah.

Pertumbuhan dan perkembangan paham Islam yang ekstrim atau radikal itu mendapatkan respons yang beragam

dari berbagai pihak. Ada yang memberikan respons positif dengan mendukung, ada yang memberi respons reaktif-emosional, ada yang memberikan respons kreatif, dan ada juga yang merespons secara anarkis. Sejauh ini, respons yang diberikan belum membendung, apalagi menghentikan laju pertumbuhan gerakannya. Justru ada kecenderungan terjadi peningkatan jumlah anggota pada berbagai organisasi kemahasiswaan Islam yang pahamnya ekstrim tersebut.

Tidak menutup kemungkinan, jika hal seperti ini tidak cepat teratasi, maka akan benar-benar hilang, bukan lagi tertinggal atau terpinggirkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) tersebut di dunia kampus. Dan eksistensi paham Islam yang ekstrim atau radikal itu sesungguhnya bukan hanya merupakan ancaman bagi organisasi kemahasiswaan Islam saja, tetapi juga ancaman bagi masa depan Islam Indonesia. Idealnya Islam Indonesia merupakan Islam yang dikenal dengan karakter ramah, toleran dan humanis. Dinamika dan pertumbuhan Islam di Indonesia selama ratusan tahun menunjukkan bahwa Islam toleran dan damai, dapat hidup menyatu dengan masyarakat Indonesia. (Wasid Mansyur, Menegaskan Islam Indonesia, Belajar dari Tradisi Pesantren dan NU, (Surabaya: Pustaka Idea, 2014), h. 41)

Dalam kerangka inilah organisasi kemahasiswaan Islam arus utama (mainstream) terkhusus kader-kader PMII di berbagai kampus, merasakan perlu untuk memberikan respons aktif-kreatif-konstruktif, agar paham Islam yang radikal itu tidak semakin menancapkan akar pengaruhnya. Infiltrasi gerakan Islam radikal dilakukan secara masif, khususnya terhadap generasi muda yang masih menduduki

bangku perkuliahan, terlebih di kampus-kampus umum yang sedikit menerima materi dan pemahaman agama Islam, namun dengan begitu tidak mengecualikan kampus-kampus agama Islam.

Oleh karena itu, salah satu upaya kader PMII khususnya yang berada di kampus-kampus, yang menjadi benteng pertahanan terakhir paham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) untuk mencegah pertumbuhan dan perkembangan paham Islam yang ekstrim atau radikal itu adalah dengan strategi khusus yang terstruktur dan sistematis, agar memungkinkan generasi muda yang ada di kampus-kampus, yang masih menduduki bangku perkuliahan khususnya dapat mengetahui dan memahami persoalan dengan lebih baik lagi, dan menjadi suplemen kuat benteng Ahlussunnah Wal Jama'ah di kalangan perguruan tinggi. Yang paling utama untuk menghidupkan nilai Aswaja di lingkungan Kampus adalah menata niat. Niatkan untuk Lii'la-i kalimatillah (meninggikan kalimat Allah). Karena saat ini PMII terjerumus dalam pemikiran yang sangat pragmatis. Pragmatis untuk mendapatkan kekuasaan, bahkan pragmatis juga dalam melakukan perjuangan dakwah.

Adapun beberapa strategi yang harus direalisasikan oleh kader-kader PMII khususnya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Hikmah Kebijaksanaan. Hikmah diartikan sebagai perumpamaan untuk mengambil pelajaran dari kejadian atau kepribadian. Metode ini fleksibel dan dapat digunakan dimana saja. Cara yang ditempuh dengan cara antara lain : *kedua*, Keteladanan dan Uswatun Hasanah.

Cara ini ialah cara paling efektif, dengan keteladanan orang akan mudah mengikuti tokoh yang diteladani. Bukankah dalam QS. Al-Ahzab:21 dijelaskan bahwa Nabi Muhammad merupakan keteladan yang baik bagi mereka yang rahmat Allah dan syafaat di hari kiamat? Bahkan Nabi terkenal Al-Amiin sebelum wahyu diturunkan kepadanya. Al-amiin inilah modal pertama sehingga Nabi Muhammad SAW dapat mempengaruhi masyarakat Arab. Strategi di atas adalah sangatlah umum untuk mengembangkan Aswaja di kampus umum yang kering siraman rohani dan rentan ekstrimisme. Karena cara di atas juga cara dakwah yang dijelaskan dalam Al Qur'an.

Ketiga, Internalisasi prinsip Aswaja pada tiap diri anggota PMII Pada setiap anggota PMII telah dikenalkan dengan nilai-nilai Aswaja antara lain tawasuth, tawazun, tasamuh, dan i'tidal atau ta'adul. Konsekuensi dari nilai-nilai ini anggota PMII bisa berinteraksi dan diterima mahasiswa secara luas. Anggota PMII sadar bahwa keberadaannya harus diterima di kalangan mahasiswa umum. Setelah diterima anggota PMII baru dapat mengaktualisasikan Aswaja kepada mahasiswa di sekitarnya.

Keempat, Silaturahmi Kelompok alumni atau mahasiswa pesantren. Selama ini di kampus umum terdapat organisasi alumni pendok pesantren dari berbagai daerah. Dari Bahrul Ulum Jombang, Lirboyo Kediri, Tarbiyatut Tholabah Lamongan, At-Tanwir Bojonegoro, Nurul Jadid Probolinggo. Melalui kesamaan kultural dijalin komunikasi dan sekali dua kali mengadakan kegiatan bersama seperti mengaji bersama atau kegiatan lain yang mempererat persaudaraan. *Kelima*, Kelompok belajar mengaji Aswaja di

internal PMII Mengaji kitab-kitab kuning dalam bidang aqidah, fikih, dan tasawuf secara bersamaan. Mengaji menjadi rutinan dan dibiasakan. Dari bidang akidah, memberi keyakinan bahwa Aswaja menjadi cara berakidah yang paling shohih dengan menjaga keberadaan nas, dan mentakwil nas jika membelakangi pemikiran. Sehingga diperoleh cara bertauhid yang benar. Bidang fikih, Ulama' Aswaja menjadikan pijakan Al-Quran, Hadits, Ijma' dan Qiyas . Hasil ijtihadnya lazim kita ketahui dengan Imam 4 madzhab. Tasawuf ditekankan adanya maqomat (level) tertentu. Membagi menjadi syariat, haqiqat dan ma'rifat. Zuhri membagi maqomat-maqomat yakni: tawbah, zuhd, wara', faqr, shabr, tawakkal, dan ridha. Dalam proses antar tahap itu ada khowf, raja', fana, dan fanaul fana.

Hasil kajian tidak hanya didengarkan, tetapi perlahan diamalkan. Sesekali diistiqomahkan untuk berpuasa senin kamis, atau puasa ayyamul bith. Sehingga, penempatan diri tidak hanya dalam urusan akal dan logika saja, tetapi juga penempatan hati melalui puasa, dzikir, wirid, rotib dan maulid atau manaqib.

Keenam, Dakwah media dengan media yang ada. Selama ini kita terpaku kepada kepemimpinan dakwah kampus yang ada. Padahal banyak media yang dapat digunakan untuk mengembangkan dakwah di kampus. Seolah-olah kalau tidak memiliki kepemimpinan lembaga dakwah kampus, kita tidak dapat melakukan dakwah. Menurut penulis metode yang paling efektif dengan akhlaq (metode hikmah kebijaksanaan), karena Nabi pun media dakwah utama ialah Uswatun Hasanah. Media lisan, lukisan atau audio visual tidak sulit kita gunakan, setiap individu

memiliki Tuhan yang ada di genggamannya mereka berupa handphone. Melalui handphone bisa membuat meme islam, audio visual (melalui dubsmash atau yang lain). Media publikasi pun tidak jauh, dapat melewati BBM, WhatsApp, bahkan Instagram.

Pembagian peran pengembangan Aswaja di Internal dan Eksternal PMII. Peran penguatan yang ada di internal PMII mewacanakan bahwa madzhab keagamaan dan manhaj PMII yang paling absah dalam mengapai istinbath gerakan mahasiswa. Sedangkan di eksternal PMII, menyajikan Islam yang ramah, menarik, menyejukkan, dan menentramkan. Sehingga melepas batas apa yang ingin dicari oleh mereka. Kadang bendel NU atau Nahdliyyin juga harus dibredel ketika medan berbeda.

Penyebaran Islam yang rahmah memang seharusnya dilakukan di kampus-kampus umum, dengan berbagai media dan cara yang disukai oleh kalangan pelajar saat ini yang dominan pada hal-hal yang visual, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa penyebaran Islam Ahlussunnah wal jamaah sangat mungkin dilakukan melalui pendekatan organisasi maupun media sosial secara visual.

Befinka Figiel Yonas
PMII Merawat Keislaman dan
Kebangsaan di Era Teknologi Digital 4.0

Islam sebagai agama terbesar di Indonesia melekat dalam jiwa dan raga hampir seluruh masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bagaimana Islam memiliki pengaruh dalam segala aspek kehidupan berBangsa dan berNegara. Nilai kebangsaan adalah sebuah nilai yang terkandung dalam makna nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi di era digital 4.0 menjadi benturan keras untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Tulisan ini akan menjabarkan bagaimana seharusnya nilai keislaman dan kebangsaan tetap dijaga secara utuh, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di era teknologi digital 4.0.

Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata salima kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Maka, seorang muslim harus patuh, tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul (Nasution, 1993: 9). Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Islam adalah agama penyempurna dari agama-agam sebelumnya. Islam merupakan agama universal, dinamis,

humaris, dan adaptif. Islam akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman juga, namun semua tetap dijalankan berdasarkan syariatnya.

PMII sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama berpegang teguh pada Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja). Menurut Imam Asy'ari, *Ahluassunnah Wal Jamaah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada al-Qur'an, hadis, dan apa yang diriwayatkan sahabat, tabi'in, imam-imam hadis, dan apa yang disampaikan oleh Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, *Ahluassunnah Wal Jamaah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama.

Berdasarkan jurnal terbitan Lembaga Pertahanan Nasional, Wawasan Kebangsaan adalah suatu pandangan atau paham tentang dinamika fenomena kehidupan dari kelompok masyarakat yang berhimpun sebagai suatu bangsa yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama. wawasan kebangsaan sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan Prof. Muladi juga menambahkan kalau Wawasan Kebangsaan lebih bersifat sebagai pemersatu nasional, namun tetap memiliki sifat kultural. Beliau juga berharap agar perpektif ini tidak hanya bernuansa struktural yang selalu memandang kebangsaan itu satu kesatuan ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan juga hankam. (Gubernur Lemhanas periode 2005-2011)

Globalisasi dapat mempengaruhi terhadap berubahnya nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa. Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah (Zakiyah, 2014:127). Era digital 4.0 mendorong manusia untuk maju dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang hadir sebagai bantuan, hal ini tentu akan meningkatkan produktivitas pekerjaan di berbagai lini dengan skala yang cukup besar.

Masyarakat Indonesia didorong untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, setiap hari akan selalu hadir inovasi-inovasi brilian yang dapat membantu manusia dalam segala aspek. Tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali lapangan pekerjaan yang hilang karena tergantikan robot pintar di era industry dan digitalisasi 4.0 ini.

Nahdlatul Ulama sebagai representasi Ahlussunnah wal Jamaah sekaligus salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia mempunyai lima prinsip yang dikembangkannya, yaitu: prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan, dan musyawarah (Khalista, 2019).

1. Prinsip Ketuhanan berarti, kehidupan bernegara bagi NU tidak terlepas dari prinsip Ketuhanan, berarti kehidupan bernegara yang dijalankan oleh Nahdlatul Ulama seiringan dengan sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bukan kehidupan bernegara yang sekuler dan liberal.
2. Prinsip Kedaulatan berarti, Negara yang dibentuk harus menjadi Negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri terbebas dari jajahan siapapun, dalam bentuk apapun,

sehingga nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dapat terjamin.

3. Prinsip Keadilan berarti, keadilan harus dilakukan, diterapkan, dan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4. Prinsip Persamaan berarti, seluruh warga negara dinaungi payung hukum yang berlaku. Sehingga, dalam kehidupan bernegara tidak boleh ada diskriminasi hukum terhadap warga negara. Islam menjamin persamaan hukum terhadap seluruh manusia tanpa membedakan agama, suku, ras, dan latar belakang lainnya.
5. Prinsip Musyawarah berarti, Islam berlaku dalam ranah kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, termasuk kehidupan bernegara, tidak diragukan bahwa Rasulullah SAW senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berperan sebagai pemimpin atau kepala negara.

NU dengan komitmen dan konsistensinya yang tinggi terhadap Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) sangat setia terhadap paham kebangsaan. NU dengan Lembaga naungannya, baik Ansor, IPNU, PMII, Fatayat Muslimat, dan lembaga lainnya, selalu konsisten mengangkat isu Kebangsaan dalam setiap kegiatan mereka. Kebangsaan menjadi hal penting yang diajarkan NU kepada setiap kadernya. Begitu pula PMII, organisasi kader yang berisikan mahasiswa muslim dengan landasan teologi Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja). PMII menetapkan Pancasila sebagai asas organisasinya. Segala bentuk nilai-nilai kebangsaan

dijalankan dan diterapkan sesuai dengan paham Ahlussunnah Wal Jamaah.

Menurut KH. Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah Waljamaah* adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleransi. Baginya *Ahlussunnah Waljamaah* harus diletakkan secara proporsional, yakni *Ahlussunnah Waljamaah* bukan sebagai *mazhab*, melainkan sebuah *manhaj al-fikr* (pendekatan berpikir tertentu) yang digariskan oleh sahabat dan para muridnya, yaitu generasi tabi'in yang memiliki intelektualitas tinggi dan relatif netral dalam menyikapi situasi politik ketika itu. Namun harus diakui bahwa kelahiran *Ahlussunnah Waljamaah* sebagai *manhaj al-fikr* tidak terlepas dari pengaruh tuntutan realitas sosio-kultural dan sosio-politik yang melingkupinya.

Definisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dirumuskan para ulama klasik memiliki potensi untuk didiskusikan ulang, sehingga beberapa ulama berpengaruh di NU mencoba menafsirkan kembali doktrin aswaja. Hal yang paling disoroti yaitu tentang pelabelan aswaja sebagai madzhab, menurut Said Aqil, jika aswaja NU difahami sebagai sebuah madzhab, maka konsep tersebut akan mempersempit makna ke arah institusional. *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam menjawab perkembangan zaman harus dimaknai sebagai *manhaj al fikr* sehingga bersifat dinamis sekaligus sangat terbuka bagi pembaruan-pembaruan namun tetap selektif dan protektif dalam merespon perkembangan tersebut.

Para Kyai yang mencoba menafsirkan kembali aswaja mempunyai tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan membawa mereka ke arah kemajuan. Para kyai ini mencoba memformulasikan pemikiran pemikiran mereka dengan realitas, sehingga apa yang mereka hasilkan bersifat visioner, kontemporer dan sangat memihak kepada masyarakat kecil.

Terdapat lima istilah utama yang diambil dari Al Qur'an dan Hadits dalam menggambarkan karakteristik *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai landasan dalam bermasyarakat atau sering disebut dengan konsep *Mabadiu Khaira Ummat* yakni sebuah gerakan untuk mengembangkan identitas dan karakteristik anggota Nahdlatul 'Ulama dengan pengaturan nilai-nilai mulia dari konsep keagamaan Nahdlatul 'Ulama, antara lain :

1. At-Tawassuth, berarti pertengahan, maksudnya menempatkan diri antara dua kutub dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran serta menghindari keterlanjuran ke kiri atau ke kanan secara berlebihan
2. Al I'tidal, berarti tegak lurus, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. I'tidal juga berarti berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang harus dibela.
3. At-Tasamuh, berarti sikap toleran pada pihak lain, lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri, bersedia berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebudayaan.

4. At-Tawazun, berarti keseimbangan, tidak berat sebelah, tidak kelebihan sesuatu unsur atau kekurangan unsur lain.
5. Amar ma'ruf nahi munkar, artinya menyeru dan mendorong berbuat baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi maupun ukhrawi, serta mencegah dan menghilangkan segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan dan atau menjerumuskan nilai-nilai moral keagamaan dan kemanusiaan.

Era Digital 4.0 dapat memberikan kesempatan bagi PMII untuk meningkatkan kualitas organisasi dalam berbagai lini dan aspek. Namun menjadi tanggung jawab berat bagi PMII untuk tetap menjaga dan meningkatkan nilai kebangsaan kader-kader PMII di era digital 4.0. PMII juga harus selalu aktif dan inovatif dalam memanfaatkan era digital 4.0, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kader-kader PMII di seluruh Indonesia. Tidak lupa untuk tetap menerapkan dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan dengan berlandaskan Aswaja dalam setiap inovasinya.

Kader PMII dengan sifat agamis dan militan ini harus tetap mempertahankan nilai kebangsaan dengan landasan Aswaja, guna menjadi ujung tombak yang mendorong segala bentruk perubahan baik untuk Agama, Bangsa, dan Negara. Era Digital 4.0 yang bebas aktif tentu dapat memberikan beragam pengaruh negatif terhadap PMII dan kadernya, namun dengan iman dan bekal pengetahuan yang cukup dapat menjadi senjata penting untuk menghadapi pengaruh negatif tersebut. Jangan sampai nilai-nilai Keislaman dan Kebangsaan kader PMII meluntur seiring berkembangnya zaman, bahkan Era Digital 4.0 harus dimaknai sebagai

semangat menjunjung tinggi nilai Keislaman dan Kebangsaan kadar di berbagai aspek dan lini kehidupan.

REFERENSI

- Ahmad, Muhibbin Zuhri, 2010. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asyari Tentang Ahl AlSunnah Al-Jamaah*. Surabaya: Khalista.
- Alarna, Badrun, (2000), cet. 1, *NU, Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja*, Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Nasir, Sahilun A. (2010), cet. 1 *Pemikiran Kalam (Teologi Islam), Sejarah, Ajaran, dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Misrawi, Zuhairi, (2010), cet. 1, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*, Jakarta: Kompas.
- Nasution, Harus. 1983. *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*. Cetakan. III : Bandung : Bulan Bintang.
- Madjid, Nurcholish. 1992. *Islam Doktrin dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nasrullah. 2015. *Karakteristik Ajaran Islam*. Al-Ittihad : Jurnal Pemikiran Hukum Islam.

Muhammad Raihan Naufal Hakim

PMII di Era Teknologi Digital

Pada masa sekarang, teknologi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi kemahasiswaan. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia, juga mengalami perubahan dalam menghadapi era digital ini. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mahasiswa Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Dalam hal ini, PMII dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas organisasi dan memperluas jangkauan pesan yang ingin disampaikan. Salah satu tema yang menjadi fokus PMII adalah Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) yang merupakan ajaran Islam yang moderat dan toleran.

PMII dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan Aswaja dan memperkenalkan ajaran Islam yang moderat kepada masyarakat luas. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mahasiswa Islam di Indonesia, memiliki peran penting dalam memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Dalam era teknologi digital 4.0, PMII dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas organisasi dan memperluas jangkauan pesan yang ingin disampaikan.

Adanya perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam organisasi kemahasiswaan, yang disebabkan oleh era teknologi digital 4.0. Perubahan ini mempengaruhi cara organisasi kemahasiswaan beroperasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Oleh karena itu, PMII sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia, perlu mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam menghadapi era teknologi digital 4.0 agar dapat memaksimalkan peran dan kontribusinya dalam memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. PMII memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mahasiswa Islam di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1961, PMII telah berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mahasiswa Islam dan memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Dalam era teknologi digital 4.0, PMII dapat memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas organisasi dan memperluas jangkauan pesan yang ingin disampaikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, PMII dapat memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam kepada masyarakat. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia memiliki fokus pada ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah (Aswaja). Aswaja merupakan ajaran Islam yang moderat dan toleran, yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam serta menghargai perbedaan pendapat dalam Islam. Oleh karena itu, PMII memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia dengan memperkenalkan ajaran Aswaja kepada masyarakat luas. Dalam beberapa penelitian, PMII juga

diidentifikasi sebagai organisasi yang memegang teguh Pancasila sebagai landasan pergerakannya².

Namun, PMII tetap mempertahankan fokus pada ajaran Aswaja sebagai bagian dari identitas organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia. Salah satu cara PMII memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan Aswaja dan memperkenalkan ajaran Islam yang moderat kepada masyarakat luas. Selain itu, PMII juga memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia dengan membangun interaksi sosial dan relasi sosial antar anggota organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, interaksi sosial dan relasi sosial antar anggota PMII dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) menjadi penting dalam mempererat hubungan antar organisasi dan membangun kepercayaan antar anggota³. Dalam hal ini, PMII memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia dengan membangun hubungan yang dinamis dan saling mendukung antar organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia. PMII

² Nazib, M (2018) *Implementasi Asas Tunggal Pancasila dalam Gerakan Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)* Cabang Kota Malang.

³ Segara, B (2017) *Interaksi Sosial dan Relasi Sosial Antarmahasiswa Yangtergabung dalam Organisasi Pmii dan Hmi (Studi Kasus Mahasiswa yang Tergabung dalam Organisasi Pmii dan Hmitahun 2000-2015 Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)* Yogyakarta.

sebagai organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia memegang teguh prinsip-prinsip Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) yang merupakan ajaran Islam yang moderat dan toleran. Berikut adalah beberapa prinsip Aswaja yang dipegang teguh oleh PMII:

1. Tauhid: PMII meyakini bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tidak ada tuhan selain-Nya. Prinsip tauhid ini menjadi dasar dalam kehidupan beragama dan menjadi landasan bagi PMII dalam menjalankan aktivitas dan perjuangan.
2. Al-Qur'an dan As-Sunnah: PMII mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber utama ajaran Islam. Selain itu, PMII juga mengikuti dan menghormati As-Sunnah, yaitu tuntunan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ajaran Islam.
3. Ijtihad: PMII menghargai perbedaan pendapat dalam Islam dan memegang prinsip ijtihad, yaitu upaya untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.
4. Moderat dan Toleran: PMII menganut prinsip Islam yang moderat dan toleran, yang menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. PMII berkomitmen untuk membangun kerukunan antarumat beragama dan berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia.
5. Persatuan dan Kesatuan: PMII mengutamakan persatuan dan kesatuan umat Islam serta menjunjung tinggi semangat kebangsaan Indonesia. PMII berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta

membangun Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Prinsip-prinsip Aswaja yang dipegang teguh oleh PMII menjadi landasan dalam menjalankan pergerakan dan kegiatan organisasi. PMII memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan Aswaja dan memperkenalkan ajaran Islam yang moderat kepada masyarakat luas, dengan tujuan memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip Aswaja dalam pergerakannya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip Aswaja oleh PMII:

1. Menegakkan Tauhid: PMII memegang teguh prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan tidak ada tuhan selain-Nya. PMII menjadikan prinsip tauhid sebagai dasar dalam kehidupan beragama dan menjadi landasan bagi PMII dalam menjalankan aktivitas dan perjuangan.
2. Mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah: PMII mengakui Al-Qur'an sebagai kitab suci dan sumber utama ajaran Islam. Selain itu, PMII juga mengikuti dan menghormati As-Sunnah, yaitu tuntunan dan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan ajaran Islam.
3. Menghargai Perbedaan Pendapat: PMII menghargai perbedaan pendapat dalam Islam dan memegang prinsip ijtihad, yaitu upaya untuk memahami dan menginterpretasikan ajaran Islam sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat.

4. Menerapkan Islam yang Moderat dan Toleran: PMII menerapkan prinsip Islam yang moderat dan toleran, yang menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. PMII berkomitmen untuk membangun kerukunan antarumat beragama dan berkontribusi dalam memperkuat harmoni sosial di Indonesia.
5. Menjaga Persatuan dan Kesatuan: PMII mengutamakan persatuan dan kesatuan umat Islam serta menjunjung tinggi semangat kebangsaan Indonesia. PMII berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta membangun Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Dalam menjalankan pergerakan dan kegiatan organisasi, PMII memegang teguh prinsip-prinsip Aswaja dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan organisasi. PMII juga memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan Aswaja dan memperkenalkan ajaran Islam yang moderat kepada masyarakat luas, dengan tujuan memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. PMII sebagai organisasi kemahasiswaan Islam yang moderat dan toleran memiliki peran penting dalam mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, berikut adalah beberapa kegiatan PMII yang mencerminkan prinsip-prinsip Aswaja dan dapat membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa:

1. Dakwah dan Kegiatan Keagamaan: PMII dapat mengadakan kegiatan dakwah dan keagamaan seperti pengajian, kajian kitab suci, dan kegiatan lainnya yang

dapat memperkuat pemahaman mengenai ajaran Islam yang moderat dan toleran serta memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Kegiatan ini dapat membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam dan mencegah terjadinya pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.

2. Diskusi dan Seminar: PMII dapat mengadakan diskusi dan seminar mengenai ajaran Islam yang moderat dan toleran, dengan mengundang pembicara yang ahli dalam bidang tersebut. Diskusi dan seminar ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran Islam dan mencegah terjadinya pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.
3. Kegiatan Sosial: PMII dapat mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, penggalangan dana, dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam serta memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia. Kegiatan ini dapat membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa dengan memperkuat persatuan dan kesatuan umat Islam serta memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia.

4. Kegiatan Kepemudaan: PMII dapat mengadakan kegiatan kepemudaan seperti pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan, dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kegiatan ini dapat membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa dengan memberikan alternatif kegiatan positif bagi mahasiswa dan mencegah terjadinya pemahaman yang salah mengenai ajaran Islam.

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, PMII dapat memegang teguh prinsip-prinsip Aswaja dan menerapkannya dalam setiap aspek kehidupan organisasi. PMII juga dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan pesan-pesan Aswaja dan memperkenalkan ajaran Islam yang moderat kepada masyarakat luas, dengan tujuan memperkuat gerakan Islam yang moderat dan toleran di Indonesia serta membantu mengantisipasi dan membendung radikalisme di kalangan mahasiswa.

Arif Taufiqurrahman
Implementasi Kemanfaatan Kader pada
Sektor Bantuan Hukum menurut Tri
Komitmen PMII

Lembaga bantuan hukum (LBH) adalah mitra harapan masyarakat yang memiliki permasalahan hukum hampir di seluruh dunia. Terkhusus di Indonesia yang sering sekali terjadi gesekan dan ketimpangan penegakan hukum ditengah permasalahan ekonomi yang rumit, kita temukan tak jarang bahkan dengan sederhananya orang dapat merampas hak dan kemerdekaan orang lain. Para pihak yang merasa dirugikan dan dirampas haknya oleh sebagian orang atau badan hukum tersebut cukup membutuhkan pembelaan dan penyelamatan terhadap haknya.

Keadaan ekonomi sangat mempengaruhi keselamatan hak seseorang, karena dalam setiap perkara pasti membutuhkan dana operasional yang harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara. Maka hadirnya lembaga bantuan hukum diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dan memberikan rasa nyaman terhadap kegelisahan masyarakat yang memiliki keterbatasan moril dan materil yaitu dengan pelayanan cuma-cuma (*Pro Bono*).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai organisasi mahasiswa nasional yang bersifat *social religius* tentunya sangat memperhatikan dan sigap terhadap permasalahan sosial yang terjadi di *grassroot* masyarakat, perhatian yang menjelma menjadi kepedulian ini seharusnya dapat mendorong kesepakatan untuk membuat satu lembaga yang menganulir kebutuhan masyarakat secara umum, yaitu

Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PMII).

LBH PMII harus bisa hadir dengan humanis sebagai penyelamat dan pelindung rakyat yang memiliki keterbatasan, karena dengan itu ekspansi kemanfaatan kader dan organisasi bisa benar-benar dirasakan oleh setiap orang, hal ini sesuai dengan Trimotto PMII yang terakhir yakni menyelaraskan segala perbuatan dengan kebaikan atau familiar kita kenal dengan istilah Amal Sholeh.

PMII memiliki tujuan untuk membentuk pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap, bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta berkomitmen memperjuangkan cita citakemerdekaan indonseia. Maka implementasi dari tujuan ini adalah optimalisasi kemanfaatan kader pada setiap sektor, dan diantaranya adalah sektor hukum.

Penulis memilih untuk mengangkat tema ini dilatar belakangi oleh keresahan penulis terhadap belum meratanya instruksi pendistribusian bantuan hukum dari Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) pada setiap cabang untuk membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tetap. Padahal ini merupakan bentuk nyata implementasi dari tujuan didirikannya organisasi yang bernama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini.

Tulisan ini bertujuan untuk membuka kerangka berfikir para kader PMII terhadap urgensi pengadaan Lembaga Bantuan Hukum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (LBH PMII) pada setiap cabang bahkan komisariat, guna mendampingi para kader dalam berproses menjadi kader

yang memiliki kualitas dan integritas yang tinggi. Selain menjadi manfaat yang secara langsung dapat dirasakan oleh Masyarakat, meratanya pengadaan LBH PMII pada setiap jenjang struktural tersebut juga akan menjadi mobilisator percepatan PMII sebagai laboratorium kader-kader calon penegak hukum yang berintegritas baik di Indonesia.

A. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Berdasarkan UU 16 Tahun 2011, LBH atau Lembaga Bantuan Hukum adalah salah satu pemberi bantuan hukum yang dianggap sah di Indonesia. Pasal 1 angka 3 UU 16 Tahun 2011 mendefinisikan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Sementara itu, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁴

Tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum yang mana termasuk pula sebagai tugas LBH adalah sebagai berikut:⁵

1. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
2. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

⁴ Hukum online

⁵ Pasal 3 UU No. 16 Thn 2011

3. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia; dan
4. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum diatas, maka sudah sepatutnya para kader PMII mengambil bagian dalam mengakomodir peluang kemanfaatan ini. Banyaknya para penegak hukum yang kadang kala menciptakan kekeliruan dengan sengaja cukup menjadi alasan para kader PMII untuk mulai *prepare* dan menyiapkan diri.

Keragaman *culture* dan *begroun* akademik para kader dapat menjadi pertimbangan para pejabat *structural* untuk menyediakan sub masing-masing sesuai peminatan dan *basic* kader yang bersangkutan, supaya tercapai cita-cita PMII yaitu membentuk insan ulil albab dalam setiap bidangnya.

B. Pengertian Tri Khidmad PMII

Sebagai kader organisai yang bernafaskan Islam Ahlussunnah Wal Jamaah setiap kader harus menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi siapa saja termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan sekalipun, melakukan kebaikan kapanpu, dimanapun, dan kepada siapapun tanpa pamrih. Dalam Tri Khidmat PMII ada tiga kepribadian yang harus ditanamkan dalam-dalam oleh seluruh kader PMII:⁶

⁶ Debby Andrean, Trilogi PMII (id.scribd.com)

1. Kejujuran

Sikap ini adalah sikap yang sangat baik dan luhur dalam islam. Bahkan sikap ini menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh utusan Allah. Jujur (shiddiq) adalah salah satu dari keempat sifat wajib utusan Allah sebagaimana tercantum dalam kitab Aqidatul Awam dan kitab tauhid lainnya. Jujur artinya tidak berkata dusta. Jujur juga diartikan sebagai persesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sifat jujur sangat dipegang teguh oleh rasulullah saw. bahkan orang-orang yang memusuhi Beliauapun masih menganggap beliau adalah orang yang jujur.

2. Kebenaran

Dalam bertindak kita harus berpegang pada kebenaran. Kebenaran disini adalah kebenaran yang diakui islam dan oleh hukum yang berlaku di Negara kita. Sebab terkadang orang menganggap pandangannya benar tetapi sebenarnya bertolak belakang dengan kebenaran yang diakui oleh islam dan hukum positif. Oleh sebab itu, ada kebenaran yang bersifat universal dan ada pula kebenaran yang bersifat subjektif. Kebenaran subjektif inilah yang mendorong adanya pertentangan ditenga-tengah masyarakat.

3. Keadilan

Berdasarkan keterangan dalam kamus besar bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil.

Terkadang adil juga didefinisikan sebagai mampu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Tiga kepribadian ini cukup menjadi modal awal untuk menjadi penegak hukum yang baik. Pribadi Jujur, Benar, dan Adil adalah sikap yang istimewa ketika terpatri dalam diri seseorang.

C. Korelasi Tri Khidmat PMII dengan Lembaga Bantuan Hukum

Menciptakan suasana penyelenggaraan hukum yang baik dan benar adalah impian bersama, namun impian itu bisa dimulai dari membentuk karakter praktisinya terlebih dahulu. Oleh karena itu ada kesesuaian antara Tri khidmat PMII dengan upaya menciptakan pelaksanaan penegakan hukum yang baik. Tri khidmat PMII membentengi para kader untuk senantiasa bersikap jujur, benar, dan adil dalam kemandiriannya.

Para kader yang sudah tertanamkan Tri Khidmat ini merupakan asset besar organisasi bahkan Negara, karena ditangan merekalah ada cahaya perubahan yang bisa dinanti. Tugas pendamping adalah memfasilitasi kebutuhan mereka dalam berproses dan berkembang. Jenjang structural organisasi adalah wilayah mereka berproses, maka siapkan kebutuhan tersebut pada setiap jenjangnya sehingga mereka dapat menikmati dan menjiwai proses tersebut.

Sebuah perjuangan akan mudah memperoleh hasil apabila memiliki kesamaan nilai yang dipegang. Kesamaan nilai ini kemudian disepakati bersama sebagai pedoman, ideologi, asas, dan norma dalam bergerak.

Dalam upaya pendampingan kader maka yang utama setelah menyetarakan pedoman dan ideologi adalah menyediakan wadah praktek yang tetap. Outputnya adalah terbentuknya kader yang cakap dan siap untuk menjadi agen kemanfaatan baru dan bergunabagi segenap masyarakat disekitarnya.

Kiki Asifah SIpa
Ahlussunnah Wal Jama'ah
(ASWAJA)

A. History dan Epistimologi ASWAJA

Ahlussunnah Wal Jama'ah (ASWAJA) lahir dari pergulatan intens antara doktrin dengan sejarah. Di wilayah doktrin, debat meliputi soal kalam mengenai status Al-Qur'an, apakah ia makhluk atau bukan, kemudian debat antara sifat-sifat Allah antara ulama Salafiyyun dengan golongan Mu'tazilah, dan seterusnya.

Di wilayah sejarah, proses pembentukan Aswaja terentang hingga zaman Khulafa'ur Rasyidin, yakni dimulai sejak terjadi perang Shiffin yang melibatkan khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah. Bersama kekalahan khalifah keempat tersebut, setelah dikelabui melalui arbitrase (tahkim) oleh kubu Muawiyah, umat Islam semakin terpecah ke dalam berbagai golongan. Di antara mereka terdapat Syi'ah yang secara umum dinisbatkan kepada pengikut khalifah Ali bin Abi Thalib, golongan Khawarij yakni pendukung Ali yang membelot karena tidak setuju dengan tahkim, dan ada pula kelompok Jabariyah yang melegitimasi kepemimpinan Mu'awiyah. Selain tiga golongan tersebut, masih ada Murji'ah dan Qodariyah, faham bahwa segala sesuatu terjadi karena perbuatan manusia dan Allah tidak turut campur (Af'al Al-ibad min Al-ibad), berlawanan dengan faham Jabariyah.

Di antara kelompok-kelompok itu, adalah sebuah komunitas yang dipelopori oleh Imam Abu Sa'id Hasan

ibn Hasan Yasar Al-Bashri (21-110 H/639-728 M), lebih dikenal dengan nama Imam Hasan Al Bashri, yang cenderung mengembangkan aktifitas keagamaan yang bersifat kultural (tsaqofiyah), ilmiah, dan berusaha mencari jalan kebenaran secara jernih. Komunitas ini menghindari pertikaian politik antara berbagai fraksi politik (firqoh) yang berkembang ketika itu. Sebaliknya, mereka mengembangkan sikap keberagaman dan pemikiran yang sejuk, moderat, dan tidak ekstrim. Dengan sistem keberagaman semacam itu, mereka tidak mudah untuk mengkafirkan golongan atau kelompok lain yang terlibat dalam pertikaian politik ketika itu.

Seirama waktu, sikap dan pandangan tersebut diteruskan ke generasi-generasi ulama setelah beliau, di antaranya Imam Abu Hanifah Al-Nu'man (150 H), Imam Malik Ibn Anas (179 H), Imam Syafi'i (204 H), Ibn Kullab (204 H), Ahmad Ibn Hanbal (241 H), hingga tiba pada generasi Abu Hasan Al-Asy'ari (324 H) dan Abu Mansur Al-Maturidi (333 H). Kepada dua ulama terakhir inilah permulaan faham Aswaja sering dinisbatkan, meskipun bila ditelusuri secara teliti, benih-benih faham Aswaja ini sebenarnya telah tumbuh sejak dua abad sebelumnya.

Indonesia merupakan salah satu penduduk dengan jumlah penganut faham Ahlussunnah Wal Jama'ah terbesar di dunia. Mayoritas pemeluk Islam di kepulauan ini adalah penganut madzhab Syafi'i, dan sebagian terbesarnya bergabung -baik tergabung secara sadar maupun tidak- dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang sejak awal berdiri menegaskan sebagai pengamal Islam ala Ahlussunnah Wal Jama'ah.

Ahlussunnah wal Jama'ah' disingkat Aswaja yang dalam pemahaman dan praktek Islamnya menyandarkan diri kepada 4 (empat) mazhab, yaitu : mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali. Mayoritas umat Islam dengan beragam pemahaman, keyakinan dan ritual keislamannya berharap dan mengklaim dirinya sebagai Ahlunnah Wal Jama'ah (aswaja). Klaim sebagai sunni (sebutan bagi pengikut aswaja) ini adalah bagian dari ekspresi pemahamannya yang meyakini bahwa umat Islam telah terpecah belah menjadi beberapa aliran, namun diantara mereka yang selamat dan akan masuk surga hanya satu, yaitu aliran yang bernama Ahlunnah Wal Jama'ah. Sehingga orang yang merasa dirinya sebagai sunni beranggapan bahwa dirinya telah menemukan kebenaran agama, sedangkan orang lain keliru, sehingga ia berhak memberikan label "sesat" atau "kafir" kepada orang yang memiliki pemahaman keislaman yang berbeda dengannya. Mengklaim dirinya sebagai orang yang paling benar dan yang lain sesat menurut Al-Qur'an adalah sebuah kesalahan, karena secara tegas Allah berfirman bahwa yang akan menentukan kebenaran manusia dalam beragama adalah Allah sendiri, bukan makhluknya, dan akan diputuskan kelak di akhirat, bukan di dunia (QS. Al-Haji : 17).

Sementara di sisi lain pengertian dan cakupan aswaja sendiri tidak jelas, para ulama mendefinisikannya dengan berbeda-beda. Hal ini lantaran istilah Ahlunnah Wal Jama'ah berikut definisinya tidak pernah disampaikan oleh Allah dan rasul-Nya secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.

Apa itu ASWAJA?

Secara Etimologi, Ahlussunnah Wal Jamaah dapat dikonsepsikan Ahlun berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab. Al-Sunnah berarti thariqat (jalan), sedangkan Al-Jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Secara ringkas bisa disimpulkan bahwa Ahlu sunnah wal jamaah adalah semua orang yang berjalan dan selalu menetapkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai pijakan hukum baik dalam masalah aqidah, syari'ah dan tasawwuf.

Aswaja secara Terminologi dapat didefinisikan bahwa Aswaja adalah orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar modernisasi, menjaga kesinambungan dan toleran, dan shalat tarawih 23 rakaat. Pandangan seperti itu pas betul dengan anggapan sementara orang luar NU terhadap perilaku warga NU sendiri. Sedangkan al Jama'ah menurut Ibn Taimiyah adalah persatuan. Ada juga yang mengartikannya sebagai ahlu Islam yang bersepakat dalam masalah syara'. Selain itu juga ada yang mengartikannya al Sawadul A'zham (kelompok mayoritas).

Menurut Muhammad bin Abdullah Al-Wuhaibi, istilah Ahlus Sunnah wa al Jama'ah adalah istilah yang sama dengan Ahlus Sunnah. Dan secara umum para ulama menggunakan istilah ini sebagai pembanding Ahlu Ahwa' wal Bida'. Menurutnya, kata "ahlus sunnah" mempunyai dua makna: Pertama, mengikuti sunnah-sunnah dan atsar-atsar yang datang dari Rasulullah SAW dan para

sahabat, menekuninya, memisahkan yang shahih dari yang cacat dan melaksanakan apa yang diwajibkan dari perkataan dan perbuatan dalam masalah aqidah dan ahkam. Kedua, lebih khusus dari makna pertama, yaitu yang dijelaskan oleh sebagian ulama', dimana mereka menamakan kitab mereka dengan nama as sunnah, seperti Abu Ashim, al Imam Ahmad Ibn Hanbal, al Imam, al Khalal, dan lain-lain. Mereka mengartikan as sunnah sebagai i'tiqad shahih yang ditetapkan dengan nash dan ijma'.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa madzhab ahlussunnah wa al jama'ah itu merupakan kelanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun penamaan ahlussunnah wa al jama'ah adalah sesudah terjadinya fitnah ketika awal munculnya firqah-firqah.

Menarik untuk dicatat, bahwa dulu Imam Malik pernah ditanya: "siapakah ahlussunnah itu ?" Beliau menjawab bahwa ahlus sunnah adalah mereka yang tidak mempunyai laqab (julukan) yang sudah terkenal, yakni bukan jahmi, qadari, dan bukan pula Rafidli. Imam Ahmad Ibn Hanbal pun pernah disebut-sebut sebagai Imam Ahlussunnah karena tindakan beliau yang gigih mempertahankan keyakinannya ketika Khalifah al Makmun dengan faham Mu'tazilahnya gencar mengkampanyekan bahwa Qur'an adalah makhluk.

Adapun pengertian hadits secara terminologi mempunyai beberapa pengertian antara lain: pertama, Menurut terminologi para Muhadditsin, Sunnah adalah

segala napak tilas Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir, sifat-sifat kejadian nya (bentuk tubuhnya), akhlaknya maupun sejarahnya, baik sebelum kenabian maupun sesudahnya. Kedua, Para ulama Ushul Fiqh mendefinisikan Sunnah sebagai “segala sesuatu yang dinukil dari Rasulullah, baik perkataan, perbuatan maupun taqirir”. Ketiga, menurut ulama Fiqh Sunnah sebagai suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapat dosa, kebalikan dari fardlu atau wajib menurut mereka. Keempat, Sunnah juga diidentikkan terhadap segala yang ditunjuk oleh dalil-dalil Syar’i, baik Alqur’an, Hadits ataupun Ijtihad Sahabat, seperti pengumpulan mushaf dan pembukuan atau pengkodifikasian Hadits, termasuk di dalamnya Ijtihad sahabat sebagai Sunnah berdasar pada hadits Rasulullah SAW. berbunyi: “ ’Alaikum bi assunnatî wa sunnati al khulafâi ar râsyidîna al mahdiyyîn“. Kelima, Sunnah juga diidentikkan terhadap hal-hal yang berlawanan dengan Bid’ah.

Arti Ahlussunnah wal jama’ah itu sendiri diambil dari Hadits Rasulullah SAW yang beliau sabdakan :

“Islam akan menjadi terbagi menjadi 73 golongan, satu golongan yang masuk surga tanpa di hisab”, sahabat berkata : siapakah golongan tersebut ya Rasulullah ?, Nabi bersabda “ Ahlussunnah wal jama’ah“.

Semua golongan mengaku dirinya Ahlussunnah tetapi sebenarnya mereka bukan Ahlussunnah wal jama’ah karena banyak hal-hal yang mereka langgar yang mereka jalankan di dalam ajaran agama Islam, tetapi tetap mereka

mengakui diri mereka yang benar. Sebenarnya kita harus mengetahui apa yang kita pelajari di dalam agama Islam atau yang kita amalkan di dalam Islam maka kita akan mengetahui kebenarannya di dalam ajaran Ahlussunnah wal jama'ah. Allah SWT telah mengucapkan di dalam surat Al Fatihah pada ayat yang 5 dan ayat yang ke 6, Allah SWT mengucapkan di dalam ayat yang ke 5 jalan yang lurus dan pada ayat yang ke 6 jalan-jalan mereka, yang kita tanyakan siapa mereka-mereka itu?

Ulama Ahlussunnah wal jama'ah mereka bersepakat:

1. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya
2. Penerus sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Tabi'in
3. Tabi'-tabi'in adalah pengikut yang mengikuti orang yang belajar kepada sahabat Rasulullah SAW.
4. Dan para ulama sholihin.

Berbicara tentang Ahlus Sunnah wa al Jama'ah, kiranya tak lengkap tanpa menyebut nama dua orang tokoh yang begitu disegani di kalangan faham ini. Mereka adalah Abu al Hasan al Asy'ari dan Abu Manshur al Maturidi. Bahkan beberapa ulama' mengatakan bahwa ahlus sunnah wa al jama'ah adalah pengikut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Contoh misalnya, al Zubaidi yang pernah mengatakan: "Jika dikatakan ahlus sunnah, maka yang dimaksud dengan mereka adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah". Senada dengan al Zubaidi adalah Hasan Ayyub yang mengatakan: "Ahlus Sunnah

adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansyur Al-Maturidi dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka berdua. Mereka berjalan di atas petunjuk Salafus Shalih dalam memahami aqaid”.

Tokoh yang pertama bernama lengkap Abu Hasan Ali Ibn Ismail Ibn Bishri Ishaq Ibn Salim Ibn Ismail Ibn Abdullah Ibn Musa Ibn Bilal Ibn Abi Bardah Ibn Abi Musa al Asy'ari (260 H – 330 H). Dia dikenal sebagai pendiri teologi sunni, meskipun sebelumnya dia adalah pengikut Mu'tazilah dan pernah menjadi murid al Jubba'i. Kurang lebih sejak 1995/1997, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia meletakkan Aswaja sebagai Manhajul Fikr. PMII memandang bahwa Ahlussunnah Wal-Jama'ah adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan dengan berlandaskan atas dasar moderasi, menjaga keseimbangan, dan toleran. Aswaja bukan sebuah madzhab, melainkan sebuah metode dan prinsip berfikir dalam menghadapi persoalan-persoalan agama sekaligus urusan sosial-kemasyarakatan; inilah makna Aswaja sebagai Manhaj Al-Fikr.

Sebagai manhaj al-fikr, PMII berpegang pada prinsip-prinsip Tawassuth (moderat), Tawazun (netral), Ta'adul (keseimbangan), dan Tasamuh (toleran). Moderat tercermin dalam pengambilan hukum (Istinbath) yaitu memperhatikan posisi akal di samping memperhatikan nash. Aswaja memberi titik porsi yang seimbang antara rujukan nash (Al-qur'an dan Al-Hadist) dengan penggunaan akal. Prinsip ini merujuk pada debat awal-

awal Masehi antara golongan yang sangat menekankan akal (Mu'tazilah) dan golongan fatalis (Jabariyah).

Sikap netral (Tawazun) berkaitan dengan sikap dalam politik. Aswaja memandang kehidupan sosial-politik atau pemerintahan dari kriteria dan prasyarat yang dapat dipenuhi oleh sebuah rezim. Oleh sebab itu, dalam sikap tawazun, PMII tidak membenarkan kelompok ekstrim yang hendak merongrong kewibawaan sebuah pemerintahan yang disepakati bersama, namun tidak juga berarti mendukung pemerintahan. Apa yang terkandung dalam sikap tawazun tersebut adalah memperhatikan bagaimana keterpenuhan kaidah dalam perjalanan sistem kehidupan sosial politik.

Keseimbangan (Ta'adul) dan toleran (Tasamuh) terefleksikan dalam kehidupan sosial di masyarakat, yaitu cara bergaul dalam kondisi sosial budaya mereka. Keseimbangan dan toleransi mengacu pada cara bergaul PMII sebagai muslim dengan golongan muslim atau pemeluk agama yang lain. Realitas masyarakat Indonesia yang plural dalam budaya, etnis, ideologi politik, dan agama, PMII memandang bukan semata-mata realitas sosiologis, melainkan juga realitas teologis. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wata'ala memang dengan sengaja menciptakan manusia berbeda-beda dalam berbagai sisinya. Oleh sebab itu, tidak ada pilihan sikap yang lebih tepat kecuali ta'adul dan tasamuh.

B. Prinsip Aswaja Sebagai Manhaj

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi

aqidah, pengambilan hukum, tasawuf/akhlak, dan bidang sosial-politik.

1. Aqidah

Dalam bidang aqidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga aqidah Ahlussunah Wal Jama'ah di antaranya yang pertama adalah aqidah Uluhiyyah (ketuhanan), berkait dengan ihwal eksistensi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada tiga abad pertama Hijriyah, terjadi banyak perdebatan mengenai eksistensi sifat dan asma Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana terjadi diskursus terkait masalah apakah asma Allah tergolong dzat atau bukan. Abu Hasan Al-Asy'ari (324 H) secara filosofis berpendapat bahwa nama (Ism) bukanlah yang dinamai (Musamma), sifat bukanlah yang disifati (Mausuf), sifat bukanlah dzat. Sifat-sifat Allah adalah nama-nama (Asma') Nya. Tetapi nama-nama itu bukanlah Allah dan bukan pula selain-Nya.

Aswaja menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah Tauhid; sebuah keyakinan yang teguh dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah-lah yang menciptakan, memelihara, dan mematikan kehidupan semesta alam. Allah Maha Esa, tidak terbilang, dan tidak memiliki sekutu.

Pilar yang kedua adalah Nubuwwat, yaitu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para Nabi dan Rasul sebagai utusannya. Sebuah wahyu yang dijadikan sebagai petunjuk dan juga acuan umat manusia dalam menjalani kehidupan menuju jalan

kebahagiaan dunia dan akhirat, serta jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam doktrin Nubuwwat ini, umat manusia harus meyakini dengan sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad Shllallahu Alaihi Wa Sallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang membawa Risalah (wahyu) untuk umat manusia. Dia adalah rasul terakhir, yang harus diikuti oleh setiap manusia.

Pilar yang ketiga adalah Al-Ma'ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan sesuai amal dan perbuatannya (Yaumul Jaza'). Dan mereka semua akan dihitung (Hisab) seluruh amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Mereka yang banyak beramal baik akan masuk surga dan mereka yang banyak beramal buruk akan masuk neraka.

2. Bidang Sosial Politik

Berbeda dengan golongan Syi'ah yang memiliki sebuah konsep negara dan mewajibkan berdirinya negara imamah, Ahlussunnah Wal Jama'ah dan golongan Sunni umumnya memandang negara sebagai kewajiban fakultatif (Fardlu Kifayah). Pandangan Syi'ah tersebut juga berbeda dengan golongan Khawarij yang membolehkan komunitas berdiri tanpa imamah apabila dia telah mampu mengatur dirinya sendiri. Bagi Ahlussunnah Wal Jama'ah, negara merupakan alat untuk mengayomi kehidupan manusia

untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan bersama (Mashlahah Musytarokah).

Ahlussunnah Wal Jama'ah tidak memiliki konsep bentuk negara yang baku. Sebuah negara boleh berdiri atas teokrasi, aristokrasi (kerajaan), atau negara-modern/demokrasi, asal mampu memenuhi syarat; apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah otoritas (wewenang) pemimpin negara tersebut. Syarat-syarat itu adalah :

a. Prinsip Syura (musyawarah)

Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan, dan peraturan. Salah satu ayat yang menegaskan musyawarah adalah sebagai berikut :

“Maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal. Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan

zalim mereka membela diri (Q.S. Al-Syura, 42: 36-39)

b. Prinsip Al-‘Adl (keadilan)

Keadilan adalah salah satu perintah yang paling banyak ditemukan dalam Al-Qur’an. Prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Di bawah ini adalah salah satu ayat yang memerintahkan keadilan:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(Q.S. An-Nisa, 4:58)

c. Prinsip Al-Hurriyah (kebebasan)

Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi warga negaranya. Kebebasan tersebut wajib hukumnya karena merupakan kodrat asasi setiap manusia. Prinsip kebebasan manusia dalam syari’ah dikenal dengan Al-Ushulul-Khams (prinsip lima), yaitu :

- a) Hifzhu al-Nafs (menjaga jiwa); adalah kewajiban setiap kepemimpinan (negara) untuk menjamin kehidupan setiap warga negara; bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk hidup dan berkembang di wilayahnya.

- b) Hifzhu al-Din (menjaga agama); adalah kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk, meyakini, dan menjalankan agama dan kepercayaannya. Negara tidak berhak memaksakan atau melarang sebuah agama atau kepercayaan kepada warga negara.
- c) Hifzhu al-Mal (menjaga harta benda); kewajiban setiap kepemimpinan untuk menjamin keamanan harta benda yang dimiliki oleh warga negaranya. Negara wajib memberikan jaminan keamanan dan menjamin rakyatnya hidup sesuai dengan martabat rakyat sebagai manusia.
- d) Hifzhu al-Nasl; bahwa negara wajib memberi jaminan terhadap asal-usul, identitas, dan garis keturunan setiap warga negara. Negara harus menjaga kekayaan budaya (etnis), tidak boleh mengunggulkan dan memprioritaskan sebuah etnis tertentu. Hifzhun al-Nasl berarti negara harus memperlakukan sama setiap etnis yang hidup di wilayah negaranya.
- e) Hifzhu al-'Irdh; jaminan terhadap harga diri, kehormatan, profesi, pekerjaan, ataupun kedudukan setiap warga negara. Negara tidak boleh merendahkan warga negaranya karena profesi dan pekerjaannya. Negara justru harus menjunjung tinggi dan memberikan tempat yang layak bagi setiap warga negara.

Al-Ushul al-Khams identik dengan konsep hak asasi manusia yang lebih dikenal dalam dunia modern. Lima pokok atau prinsip di atas menjadi ukuran bagi legitimasi sebuah pemerintahan sekaligus menjadi acuan bagi setiap orang yang menjadi pemimpin kelak hari kemudian.

d. Prinsip Al-Musawah (kesetaraan derajat)

Bahwa manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara satu manusia dengan manusia lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain tidak ada pembeda yang menjadikan satu manusia atau bangsa lebih tinggi dari yang lain. Manusia diciptakan berbeda-beda adalah untuk saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak dibenarkan satu manusia dan sebuah bangsa menindas manusia dan bangsa yang lain. Dalam surat Al-Hujurat disebutkan :

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (Al-Hujurat, 49:13)

Perbedaan bukanlah semata-mata fakta sosiologis, yakni fakta yang timbul akibat dari relasi dan proses sosial. Perbedaan merupakan

keniscayaan teologis yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian disebutkan dalam surat Al-Ma'idah:

“Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan” (Al-Maidah; 5:48).

Dalam sebuah negara, kedudukan warga Negara adalah sama. Orang-orang yang menjabat di tubuh pemerintahan memiliki kewajiban yang sama sebagai warga negara. Mereka memiliki jabatan semata-mata adalah untuk mengayomi, melayani, dan menjamin kemaslahatan bersama, dan tidak ada privilege (keistimewaan) khususnya di mata hukum. Negara justru harus mampu mewujudkan kesetaraan derajat antar manusia di dalam wilayahnya, yang biasanya terlanggar oleh perbedaan status sosial, kelas ekonomi, dan jabatan politik.

Dengan prinsip-prinsip di atas, maka tidak ada doktrin negara Islam, formalisasi syari'at Islam, dan khilafah Islamiyah bagi Ahlussunah wal Jama'ah. Sebagaimana juga tidak didapati perintah dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas untuk mendirikan salah satu di antara ketiganya. Islam hanya

diharuskan untuk menjamin agar sebuah pemerintahan -baik negara maupun kerajaan- mampu memenuhi 4 (empat) kriteria di atas.

3. Bidang Istinbath Al-Hukm (pengambilan hukum syari'ah)

Hampir seluruh golongan Sunni menggunakan empat sumber hukum yaitu :

- 1) Al-Qur'an
- 2) As-Sunnah
- 3) Ijma'
- 4) Qiyas

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam pengambilan hukum tidak dibantah oleh semua madzhab fiqh. Sebagai sumber hukum naqli, posisinya tidak diragukan. Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Sementara As-Sunnah meliputi Al-Hadist dan segala tindak dan perilaku Rasul Shallallahu Alaihi Wa Sallam, sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan tabi'in. Penempatannya ialah setelah proses Istinbath Al-Hukm tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, atau digunakan sebagai komplemen (pelengkap) dari apa yang telah dinyatakan dalam Al-Qur'an.

As-Sunnah sendiri mempunyai tingkat kekuatan yang bervariasi. Ada yang terus-menerus (mutawatir), terkenal (masyhur) ataupun terisolir (ahad). Penentuan tingkat As-Sunnah tersebut dilakukan oleh Ijma' Shahabah.

C. Hakikat Ahlussunnah Wal Jama'ah

Dengan tidak memonopoli predikat sebagai satu-satunya golongan Ahlussunnah wal Jamaah, jam'iah Nahdlatul Ulama semenjak pertama berdirinya menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan sekuat tenaga, Nahdlatul Ulama berusaha menempatkan diri sebagai pengamal setia dan mengajak seluruh kaum muslimin, terutama para warganya untuk menggolongkan diri pada Ahlussunnah wa Jamaah.

Pada hakekatnya, Ahlussunnah wal Jamaah, adalah ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah saw. bersama para sahabatnya. Dengan tidak memonopoli predikat sebagai satu-satunya golongan Ahlussunnah wal Jamaah, jam'iah Nahdlatul Ulama semenjak pertama berdirinya menegaskan diri sebagai penganut, pengemban dan pengembang Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan sekuat tenaga, Nahdlatul Ulama berusaha menempatkan diri sebagai pengamal setia dan mengajak seluruh kaum muslimin, terutama para warganya untuk menggolongkan diri pada Ahlussunnah wa Jamaah.

Ketika Rasulullah saw. menerangkan bahwa umatnya akan tergolong menjadi banyak sekali (73) golongan, beliau menegaskan bahwa yang benar dan selamat dari sekian banyak golongan itu hanyalah Ahlussunnah wa Jamaah. Atas pertanyaan para sahabat mengenai definisi as-Sunah wal Jamaah, beliau

merumuskan dengan sabdanya: "Apa yang aku berada di atasnya, hari ini, bersama para sahabatku".

Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan pengikut setia pada al-Sunnah wal al-Jamaah, yaitu ajaran Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah saw. Bersama para sahabatnya pada zaman itu. Ahlussunnah wal Jama'ah bukanlah suatu yang baru timbul sebagai reaksi dari timbulnya beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran yang murni seperti Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya. As-Sunnah wal Jama'ah sudah ada sebelum semuanya itu timbul. Aliran-aliran itulah yang merupakan gangguan terhadap kemurnian as-Sunnah wal Jama'ah. Setelah gangguan itu membadaai dan berkecamuk, dirasakan perlunya predikat Ahlussunnah wal Jamaah, dipopulerkan oleh kaum muslimin yang tetap setia menegakkan as-Sunnah wal Jamaah, mempertahankannya dari segala macam gangguan yang ditimbulkan oleh aliran-aliran yang mengganggu itu. Mengajak seluruh pemeluk islam untuk kembali kepada as-Sunnah wal Jamaah.

Para sahabat, generasi yang hidup sezaman dengan Rasulullah saw. adalah generasi yang paling menghayati as-Sunnah wal Jamaah. Mereka dapat menerima langsung ajaran agama dari tangan pertama. Kalau ada yang belum jelas, dapat menanyakan langsung pula kepada Rasulullah saw. terutama al-Khulafa ar-Rosyidun:

1. Sahabat Abu Bakar as-Shiddiq ra,
2. Sahabat Umar bin Khatab ra,
3. Sahabat Utsman bin Affan ra,

4. Sahabat Ali bin Abi Thalib ra.

Nahdlatul Ulama berpendirian teguh, bahwa al-Mahdiyyin (yang mendapat petunjuk) adalah sifat menerangkan kenyataan bukan sifat yang merupakan syarat yang membatasi. Artinya, memang semua Khulafa ar-Rosyidin itu, tanpa diragukan lagi adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, bukan orang-orang yang sebagian mendapat petunjuk dan sebagian tidak. Bahkan, jumbuh ulama berpendapat bahwa para sahabat Rasulullah saw. adalah para tokoh yang diyakini kejujurannya didalam masalah penyampaian ajaran agama. Keraguan terhadap kejujuran para sahabat merupakan salah satu bahaya bagi kemantapan saluran ajaran agama, apalagi terhadap Khulafa ar-Rosyidin al-Mahdiyyin. Keraguan tersebut akan mengacaukan, mengaburkan dan mengeruhkan jalur-jalur yang harus ditelusuri sampai kepada as-Sunnah dan al-Qur'an.

Para sahabat yang mendengar ucapan, melihat perbuatan dan menghayati sikap (taqrir) Rasulullah saw. kemudian ucapan, perbuatan dan sikap Rasulullah saw itu dikumpulkan, dicatat dan dikodifikasikan. Para sahabat pula yang mendengar dan mencatat Rasulullah saw., membaca ayat-ayat al-Qur'an, kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi mushaf yang sampai sekarang kita yakini sebagai mushaf al-Qur'an yang otentik.

Arif Setiono
Keislaman Dan Kebangsaan

Keislaman dan kebangsaan merupakan dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap ORMAS (organisasi kemasyarakatan) Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah¹. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah Negara-Bangsa (Indonesia), untuk itu sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, setiap SDM (kader) dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya paham namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan di setiap gerak langkah dalam menjalankan roda organisasi.

Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada melemahnya institusi. Penyebutan organisasi dakwah dimaksudkan untuk menyebut ormas Islam, karena dalam tiap ormas Islam pasti memiliki misi dakwah. Untuk itu istilah organisasi dakwah sama dengan ormas Islam dalam tulisan ini Negara. Karena, sudah

menjadi fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, dan kecenderungannya para pemeluk Islam telah berafiliasi pada organisasi dakwah atau ormas Islam tertentu. Sehingga sangat logis jika wawasan kebangsaan para kader-kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi Negara. Jika institusi Negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa Negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah (*inferior*) di hadapan Negara-negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin SDM organisasi dakwah lemah pada wawasan keislamannya, lantas apa yang akan didakwahkan.

Menyadari akan pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah, maka dalam artikel ini penulis akan membahas tentang konsep- konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal pokok dalam pengembangan organisasi dakwah. Bahasan ini meliputi: bagaimana konsep Islam dan karakteristiknya, Sumber Ajaran Islam, Islam normatif dan Islam historis, nilai-nilai universal dalam ajaran Islam, wawasan kebangsaan dan nasionalisme, serta relasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Keislaman dan kebangsaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam organisasi dakwah. Semua kader (SDM) dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua wawasan tersebut. Bukan hanya memahami namun juga harus terinternalisasi dan diamalkan dalam

setiap gerak langkah perjalanan organisasi. Untuk itu perlu pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan.

A. Islam dan Karakteristiknya

Secara etimologis, Islam berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata *salima* kemudian berubah dengan wazan *aslama* yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Jadi, seorang muslim itu harus patuh, tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul (Nasution, 1993: 9).

Sebagai sebuah agama, Islam diyakini mengandung berbagai petunjuk ideal bagi kesejahteraan hidup manusia sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, al-Qur'an dan al-Hadits. Seperti yang dikatakan oleh Rahman (1987:49), sesuai dengan al-Qur'an bahwa Islam itu sarat dengan ajaran moral yang menekankan pada monoteisme dan kesejahteraan sosial.

Masih dalam definisi Islam, Fauz Noor (2012: 157) menjelaskan bahwa kata Islam oleh ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Padahal, kata Islam dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 85 "*Barangsiapa mencari agama selain*

agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”, semestinya dipandang secara substansial. Seperti dijelaskan oleh imam Raghīb al-Isfahani, Islam itu ada dua macam;

1) Islam di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja; 2) Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, jugadalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah dia tetapkan dan tentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imron ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman.

Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar institusi agamayang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal-formal seperti KTP maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang (pakaian, dan atribut-atribut lainnya), namun lebih pada kepasrahan mutlak pada Yang Maha Kuasa.

Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat riya’ (ingindipuji orang lain) maka amalnya pasti tertolak oleh-Nya. Sebab, tidak pasrah kepada-Nya, ada rasa ingin dipuji oleh selain-Nya; sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya. (Noor, 2012: 159).

Oleh sebab itu, sebagai umat muslim kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman bukan sekedar Islam dibawah iman. Sehingga keismalan kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepada- Nya. Itulah inti dari Islam yang sejati; pasrah, tunduk, dan patuh.

Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki baraneka karakteristik. Seperti yang dijelaskan oleh Tabrani (2015: 76-93), Islam memiliki berbagai karakteristik; bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian Islam mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

B. Sumber Ajaran Islam

Al-Qur'an adalah Kalamatau Firman Allahyang diturunkan kepada rasulullah Muhammad Saw. yang pembacaannya merupakan suatu ibadah (Qattan, 2015:17). Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Ia merupakan kitab yang mengandung ajaran yang komprehensif. Secara sederhana kitab al-Qur'an mengandung aturan terkait relasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan alam semesta. Selanjutnya dari tiga relasi tersebut terdapat sub-sub yang menjadi

topik pembahasan, mulai dari persoalan akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, bidang ilmu, kebudayaan, sejarah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik dan masih banyak yang lainnya. Demikianlah, karena al-Qur'an merupakan sumber pokok ajaran Islam.

Sumber yang kedua adalah hadits. Secara bahasa *hadits* berarti baru sebagai lawan *qadim* (lama). Dari sisi ini, hadits merupakan setiap kata-kata yang diucapkan dan dinukil serta disampaikan oleh manusia baik kata-kata itu diperoleh melalui pendengarannya atau wahyu, baik dalam keadaan jaga ataupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah, hadits merupakan apa saja yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan dan sifat. (Qattan, 2015: 22). Hadits terdiri dari dua macam; hadits Kudsi dan hadits Nabawi. Hadits Kudsi ialah hadits yang oleh nabi Muhammad disandarkan kepada Allah. Jadi secara sederhana, bahwa al-Qur'an dengan hadits Kudsi itu dibedakan karena al-Qur'an itu bersumber dari Allah baik lafal maupun maknanya, sedangkan hadits Kudsi maknanya saja dari Allah, lafalnya dari rasulullah Muhammad Saw. sendiri.

Hadits Nabawi terdiri dari dua: 1) bersifat *tauqifi*, yaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah dari Wahyu, lalu ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Meskipun kandungannya dinisbatkan kepada Allah, tetapi dari segi pembicaraan lebih layak dinisbatkan kepada rasulullah, sebab kata-kata itu dinisbatkan kepada yang mengatakannya, meskipun

di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain; 2) bersifat *taufiqi*, yaitu yang disimpulkan oleh rasulullah menurut pemahamannya terhadap al-Qur'an, karena ia mempunyai tugas menjelaskan al-Qur'an atau menyampaikannya dengan pertimbangan ijtihad. Bagian kesimpulan yang bersifat ijtihad ini diperkuat oleh wahyu bila ia benar. Dan bila terdapat kesalahan di dalamnya, maka turunlah wahyu yang membetulkannya. (Qattan,2015: 27).

Sebagai sumber ajaran yang ke dua, hadits juga memiliki tingkatan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan perawinya dibedakan menjadi hadits mutawatir (banyak jalur perawinya) sehingga lebih kuat dan hadits ahad yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja. Selain itu hadits juga dibedakan berdasarkan kualitasnya; ada hadits sohih, hasan, dloif bahkan hadits palsu (maudlu). Untuk itu umat Islam harus senantiasa selektif dalam memilih sebah hadits, agar tidak terjebak kepada sebuah kesesatan. Karena tidak semua hadits dapat dijadikan sebagai pijakan dan landasan hukum.

Selain al-Qur'an dan Hadits, mayoritas ulama juga menerima Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum (*mujmal*). Maka perlu penjelasan hadits. Hadits berfungsi sebagai *bayán*, tafsir, dan *takhsis* bagi al-Qur'an. Namun, jika terdapat beberapa hal baru sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak dijelaskan secara eksplisit (tersurat) dalam keduanya (Qur'an dan Hadits), maka diperlukan pemikiran yang mendalam,

agar semua persoalan yang berkembang dapat dijawab secara komprehensif. Pada posisi inilah ijtihad sangat diperlukan.

Ijtihad berasal dari kata *jahada* yang memiliki arti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Maksudnya, pencurahan segenap kemampuan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Ijtihad dapat dicapai melalui beberapa metode; 1) metode *Qias* (analogi), yaitu menentukan suatu hukum berdasar hukum yang sudah ada karena persamaan *illat* (motivasi hukum). Misalnya, meskipun rasulallah tidak pernah zakat beras, namun zakat berupa beras tetap sah berdasar *illat*, yaitu makanan pokok; 2) *Ijmak* atau konsensus, yaitu menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Misalnya terkait hukum BPJS, ada konsensus ulama terkait persoalan itu, sehingga halal dan sah meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit memerintahkannya; 3) *Istihsan*, yaitu menjelaskan keputusan pribadi yang tidak didasarkan atas *qias*, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Misalnya khalifah Umar bi Khatab *radliyallahu 'anhu* pernah membebaskan hukum potong tangan kepada pencuri pada saat paceklik; 4) *Maslahat al-Mursalat*, yaitu keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara'. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan *maslahat al-mursalat* menolak *mafsadat* atau mengambil manfaat dari suatu peristiwa. Misalnya, meskipun alkohol dan judi itu ada

maslahat (manfaatnya), namun keburukan (mafsadatnya) lebih besar, sehingga keduanya dilarang. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat didahulukan menolak mafsadat, demikianlah kaidah ushul fiqhnya; 5) *‘Urf*, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan orang dan telah menjadi tradisi, baik ucapan maupun perbuatan. Misalnya, kebiasaan atau tradisi yang sudah berjalan di lingkungan kita tinggal bisa sebagai acuan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syar’i yang lebih kuat. (Tabrani, 2015: 69-71).

C. Islam Normatif dan Islam Historis

Istilah Islam normatif dan Islam historis berkembang dalam kajian studi Islam. Nasr Hamid Abu Zaid mengelompokkan kajian Islam menjadi tiga wilayah (domain); *Pertama*, wilayah teks asli Islam yaitu al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad yang otentik. Pada level ini dapat dikatakan bahwa Umat Islam manapun pasti tidak akan terlepas dari kitab suci al-Qur’an dan sunnah yang sama, kecuali kelompok Syi’ah yang mempunyai kategori sunnah tersendiri; *Kedua*, pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam (al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw). Pada level ini dapat pula disebut sebagai hasil pemikiran/ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam empat pokok cabang: 1) hukum/fiqih, 2) teologi, 3) filsafat, dan 4) tasawuf/ mistik; *Ketiga*,

praktek yang dilakukan kaum muslimin. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial (konteks). (Nasution, 2012:15).

Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Islam normatif berarti Islam yang memuat kebenaran mutlak, Islam yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Seperti persoalan keEsaan Allah, bahwa nabi Muhammad utusan Allah, bahwa al-Qur'an adalah wahyu Allah, bahwa salat wajib lima waktu sehari semalam, puasa di bulan ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, bahwa minum

minuman yang memabukkan adalah dilarang, bahwa berbuat zina adalah dilarang, serta aturan-aturan lain yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi yang telah jelas dan terang penjelasannya tanpa adanya camur tangan pemikiran manusia (ijtihad) dalam memahaminya.

Sedangkan Islam historis, berupa pemikiran atau penafsiran terhadap nilai-nilai dasar dalam al-Qur'an dan Sunnahnabi dan praktik keberagamaan umat Islam. Pada level penafsiran, perbedaan pendapat tidak dapat dihiindarkan. Misalnya sentuhan yang membatalkan wudlu'. Ada ulama yang berpendapat sentuhan membatalkan wudlu' adalah semua sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tetapi bukan tua Bangsa. Sementara ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudlu' adalah

kumpul suami istri (jima'). Sementara dalam sisi praktik keberagamaan yang dilakukannya umat Islam bisa dicontohkan dengan warna dan model pakaian salat. Selain itu praktik salat muslim Pakistan yang tidak meletakkan tangan di dada, sementara muslim Indonesia meletakkan tangan di dada. Contoh lain praktik duduk miring ketika tahiyat akhir bagi muslim Indonesia, sementara muslim di Negara lain tidak melakukannya. Di Indonesia juga telah mentradisi peringatan maulid nabi, yang hal itu tidak terdapat di Negara lain. (Nasution,2012: 16-17).

Islam historis adalah Islam yang beraneka ragam. Sifat subjektivitas manusia melazimkan bagi munculnya aneka ragam Islam yang mengejawantah dalam masyarakat. Keanekaragaman Islam dalam praktik di masyarakat muncul karena berbagai kondisi ruang dan waktu di mana dan kapan Islam dipahami dan diamalkan oleh manusia (Khadziq,2009: 12). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebenaran universal (mutlak) dalam Islam historis. Karena dalam wilayah ini subjektivitas manusia yang dipengaruhi oleh faktor pemikiran, geografis, historis dan yang lainnya sangat berpengaruh.

D. Nilai-Nilai Universal dalam Ajaran Islam

Seperti dijelaskan oleh Fahrudin Faiz dalam bukunya Hermeneutika al-Qur'an (2015: 166-169), Islam sesuai dengan al-Qur'an memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat universal; *Pertama*, prinsip tauhid. Ia merupakan prinsip paling awal yang harus dipedomani.

Secara umum, misi besar al-Qur'an adalah misi tauhid. Dengan prinsip tauhid ini berarti seperti apapun pemikiran dan pandangan yang dimiliki seseorang, prinsip pertama yang harus diingat adalah bahwa "Allah nomor satu" dan "Allah harus dinomor satukan dalam hidup". Konsekuensi dari prinsip ini, berarti bahwa dalam kehidupan ini hanya ada dua dikotomi, yaitu khaliq dan makhluk; tidak ada yang boleh diposisikan sebagai khaliq selain Allah. Di atas makhluk hanya ada khaliq. Jadi setiap makhluk, setiap manusia pada dasarnya memiliki derajat yang sama, *egaliter*, tidak ada hirarki *superior-inferior*. Semua orang berderajat sama, di atas manusia hanyalah Allah, bukan materi sebagaimana cara bernalar materialisme, atau uang sebagaimana nalar kapitalisme atau masyarakat sebagaimana nalar sosialisme, atau justru manusia sendiri sebagaimana nalar eksistensialisme dalam filsafat.

Kedua, prinsip ibadah dan khilafah. Prinsip ini pada dasarnya mempertimbangkan dua aspek keberadaan manusia sebagaimana disebut dalam al-Qur'an; "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS. Adz-Zdariyat: 56) dan (QS. Al-Baqoroh: 30) "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"

Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Kedua prinsip tersebut secara sekaligus membidik dimensi vertikal dan horizontal manusia. Dalam beribadah, pola pikir yang harus digunakan adalah pola pikir ‘pembacaan,

pemahaman, penerimaan, dan pemenuhan’, dalam arti membaca dan memahami apa yang dikehendaki Allah melalui ayat-ayat *qouliyah* maupun *kauniyah*, menerima dan lalu menjalankannya. Manusia secara vertikal dihadapan Tuhan adalah seorang

`abd (hamba), yang berkewajiban sepenuhnya patuh dan tunduk kepada seluruh perintah-Nya. Prinsip ibadah berarti prinsip kepasrahan. Dalam prinsip ini terkandung pengakuan manusia akan segala kelemahan dan keterbatasannya, termasuk keterbatasan berfikir dan intelejensinya, dihadapan yang tak terbatas (Allah).

Di sisi lain dalam posisi sebagai khalifah, pola berfikir manusia adalah ‘pembacaan, pemahaman, perumusan tindakan dan pelaksanaan’; membaca petunjuk al-Qur’an dan membaca realitas, memahaminya, merumuskan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi realitas sesuai petunjuk al-Qur’an dan menjalankan rumusan yang telah digariskan. Sebagai khalifah manusia bertanggung jawab atas terselenggaranya kehidupan di muka bumi yang harmonis, karena sebagai khalifah manusia adalah ‘pengurus dan pengelola bumi’.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut, manusiahendaknya mampu membaca realitas semesta,

menguasai ilmunya dan merumuskan tindakan yang harus dilakukan demi harmoni alam semesta.

Ketiga, prinsip Ta'aruf dan Tasabuk. Kedua prinsip, *ta'aruf* dan *tasabuk* ini lebih mengarah kepada pola bernalar manusia ketika menghadapi keragaman dalam kehidupan. Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Nalar *ta'aruf* adalah nalar 'saling memahami' dan sementara nalar *tasabuk* adalah nalar 'saling berlomba' tentu berlomba dalam kebaikan yang dimaksud di sini. Kedua sikap ini perlu dilakukan dalam menghadapi orang, kelompok atau komunitas lain yang berbeda dengan yang 'milik kita'. Keniscayaan adanya keragaman dalam hidup tidak selayaknya dihadapi dengan sikap *konfrontatif* terhadap yang berbeda, apalagi jika sampai memunculkan konflik yang tidak pada tempatnya.

Keempat, prinsip sebagai wasit. Prinsip keempat ini mendapat inspirasi dari QS. Al-Baqoroh: 143, bahwa umat Islam di muka bumi ini oleh Allah dijadikan *Ummatan Wasatan*, ummat penengah. Dalam bahasa olah raga, sang penengah adalah wasit. Layaknya seorang wasit, seorang muslim dituntut mampu menjadi penengah, wasit dalam kehidupan. Ciri paling menonjol dari seorang wasit adalah 'keadilannya'. Dengan kata lain, seorang muslim sejati adalah mereka yang kesehariannya bergaya hidup dan bergaya pikir 'adil', tidak membiarkan persepsi pribadi atau kepentingan kelompok atau pemihakan kepada golongan tertentu mempengaruhi keputusannya sebagai 'wasit'. Yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah 'yang

sebenarnya' dan bukan 'yang diinginkan', dan kiranya seperti itulah cara berpikir (nalar) seorang wasit sejati.

E. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Menurut Benedict Anderson dalam bukunya *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme* (1999: 3), wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan.

Berbeda dengan wawasan kebangsaan, nasionalis merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktifitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah Negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah dan identitas-identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. (Nafi'a, 2008: 138).

Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian;

pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan dan identitas; *kedua*, pengakuan terhadap kekhususan identitas, seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama; *ketiga*, pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis; *keempat*, independensi politis yang berwujud sebuah Negara yang merdeka. (Nafi'a, 2008: 139).

Pengejawantahan gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan, ia senantiasa menimbulkan pro-kontra di dunia Islam. Dan pada akhirnya lahirlah ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap *secular*. Menurut Salim Ali al-Bahnasawi dalam bukunya *Wawasan Sistem Politik Islam* (1995: 37-38), penolakan-penolakan yang terjadi dikalangan komunitas muslim terhadap nasionalisme sekuler disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa, gagasan tersebut mengarah pada “agama baru” yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadapnya tanpa ada loyalitas kepada yang lain. Alasan lain, bahwa ide nasionalisme bersumber dari Barat yang berarti kristen. Selain alasan tersebut kehadiran nasionalisme sekuler menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Karenanasionalisme yang dimaksud adalah proses peminggiran nilai- nilai dan budaya yang

berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. (Nafi'a, 2008: 140).

Nasionalisme religius/Negara religius merupakan sintesa dari Negara sekular di satu sisi dan Negara agama di sisi lain. Menurut Mark Juergensmeyer dalam bukunya *Menentang Negara Sekular* (1998: 233), nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular diantaranya; *pertama*, moralitas publik bagi institusi-institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. *Kedua*, justifikasi dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. *Ketiga*, penggunaan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religius sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi. (Nafi'a, 2008: 152).

Namun perlu dipahami, bahwa nasionalisme religius yang dimaksud bukan nasionalisme religius yang membawa aroma kekerasan dan cenderung mengarah pada fundamentalisme agama, tetapi nasionalisme religius universal yang merupakan produk sintesa anatar nasionalisme dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. (Nafi'a, 2008: 153).

Untuk itu, nasionalisme religius yang mungkin menjadi harapan alternatif adalah; *pertama*, nasionalisme yang merupakan produk sistesis antara nasionalisme modern dan agama; *kedua*, proses sintesa ini harus diawali dengan kesadaran saling menghormati dan membutuhkan; *ketiga*, gagasan dan gerakan ini melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan tujuan bersama; *keempat*, gagasan dan gerakan ini bersumber dari nilai-nilai religiusitas universal sebagai titik temu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh elemen beragama. (Nafi'a, 2008: 153).

Maka, wawasan kebangsaan yang semestinya dipegang oleh seluruh masyarakat ialah, bahwa Indonesia bukan Negara sekular dan juga bukan Negara agama, melainkan Negara religius. Agama tidak semestinya tampil secara formal dalam mengurus persoalan Negara, namun semestinya Islam diimplementasikan sebagai sebuah etika sosial yang berarti Islam berfungsi sebagai komplementer dalam kehidupan bernegara. Sehingga Islam akan berpotensi mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. Sebaliknya jika Islam dipaksa pada fungsi suplementer dalam Negara hanya akan menjadikan Islam tercerabut dari nilai-nilai fundamentalnya yang konduktif bagi tegaknya keadilan, egalitarisme, dan demokrasi.

F. Relasi Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan

Relasi Agama (Islam) dengan negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh

sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini tema tersebut senantiasa ramaidiperbincangkan. Tidak hanya diperbincangkan namun sebagiankalangan sudah mulai membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiyah, ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan berbagai aturanya pun harus mengacu padahukum Islam.

Setidaknya ada tiga macam respon dalam menanggapi relasi Islam dengan Negara menurut Gus Dur, yaitu respon integrative, respon fakultatif, dan respon konfrontatif. Respon integratif, berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan Negara. Sedangkan sikap responsif fakultatif berarti jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuaidengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Dan sikap konfrontatif, merupakan sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami. (Samud, 2016: viii).

Dengan adanya tiga macam respon terhadap relasi Islam dengan Negara, penulis menilai bahwa para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respon intergatif. Sehingga Islam semestinya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam, bukan sekedar memperlihatkan simbol/formalisasi Islam, melainkan Islam harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya.

Ketika sikap tersebut sudah menjadi pilihan yang paling realistis, dan sudah termanifestasikan dan sistem Negara, maka sebagai warga Negara semestinya mentaati apa yang telah menjadi keputusan tersebut. Dengan tanpa menghilangkan sikap kritis, agar Negara (pemerintah) juga berjalan sesuai dengan koridor yang telah digariskan. Keputusan-keputusannya harus senantiasa dijaga, seperti Pancasila, UUD 1945, Bhineka tunggal ika dan NKRI merupakan keputusan yang sudah Final.

Indonesia bukanlah Negara sekular, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan Negara. Indonesia juga bukan Negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum Negara. Indonesia merupakan Negara religius yang memposisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternative untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. (Samud, 2016: 34-35). Yang kedepannya akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama, mengingat Indonesiamerupakan Negara yang multikultur dan sangat plural.

Islam pun sesungguhnya tidak mengenal pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks sejarah Islam menunjukkan bahwa agama itu

lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan di tengah masyarakat komersial Arab pada saat itu. Sehingga al-Qur'an secara jelas memberikan dorongan untuk peduli terhadap hak-hak asasi manusia dan melindungi mereka dari manipulasi yang datang dari kelas-kelas masyarakat yang lebih kuat. (Samud,2016: 35)

Fakta historis ini merupakan alasan mengapa Islam memusatkan perhatiannya pada signifikansi nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Sehingga Islam tidak mempunyai seperangkat teori-teori politik yang koheren atau teoripemerintahan yang lengkap, tetapi Islam hanya dapat digunakan untuk membangun kerangka atau persepsi yang lebih tepat tentang kehidupan yang baik dengan suntikan moral.

G. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa; pada wilayah penafsiran sangat mungkin lahir berbagai perbedaan (*khilafiyah*), maka hal demikian harus senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivis ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian, sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Karena dalam wilayah penafsiran tidak ada kebenaran yang mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relative.

Selain sikap toleransi, setiap aktivis ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan senantiasa mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukan Negara Agama, bukan juga Negara

sekuler melainkan Negara religius. Sehingga rumusan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI merupakan suatu dasar yang sudah final. Selanjutnya segala sikap dan tindakan yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan tersebut harus di jauhi dan ditinggalkan.

H. Daftar Pustaka

- Al-Jamali, Muhammad Fadhil. 1992. *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*. (terj.) H.M. Arifin. Cet. II; Jakarta: GoldenTrayon Press.
- Faiz, Fahrudin. 2015. *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Khadziq, 2009. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Teras.
- Manna Khalil al-Qattan, 2015. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. (terj.) Mudzakir, cet. 18; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Nafi'a Ilman, 2008. *Wawasan Kebangsaan NU dan Aktualisasinya setelah Kemerdekaan*. Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Harun. 1983. *Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam*. Cet. III; Bandung: Nulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Academia.
- Noor, Fauz. 2012. *Berpikir Seperti Nabi*, Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. 1983. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Bandung: Pustaka. Samud. 2016. *Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Gus Dur*, Jawa Barat: Tulus Pustaka.
- Tabrani. 2015. *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Yogyakarta: Ombak.

Rizal Muhaimin
Interelasi Pendidikan Agama Islam dalam
Membangun Karakter Bangsa di era
Digital 4.0

Era Digital 4.0 atau sering juga disebut sebagai Era Revolusi Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk memulai era revolusi industri yang keempat. Revolusi industri ini telah terjadi empat kali. Pertama terjadi pada tahun 1784 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, yang menggantikan pekerjaan tenaga manusia di semua bidang industri. Lalu berlanjut pada abad ke 19, dengan digunakannya tenaga listrik pada semua sektor industri. Revolusi ketiga terjadi pada tahun 1970 dengan digunakannya komputerisasi dan manufaktur pada bidang industri. Dan saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri yang keempat, dengan digunakannya interkoneksi, analisis data, teknologi sensor yang diintegrasikan menjadi satu untuk mengembangkan dunia industri.

Pada era industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal itu mencakup sistem cyber-fisik, internet of things (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif.

Kemajuan ini telah mengubah banyak bidang kehidupan manusia, termasuk ekonomi, dunia kerja, bahkan gaya hidup manusia itu sendiri. Singkatnya, revolusi 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Jika dunia pendidikan tidak berbenah maka hasil output dari pendidikan tidak akan

mampu berkiprah maksimal dalam menghadapi lesatan revolusi industri ini.

Dalam dunia pendidikan Islam, kepekaan terhadap revolusi ini masih belum terasa. Sumber daya yang bermutu rendah didukung dengan kurang kreatifnya para pendidik dalam menyampaikan pendidikan Islam ini, maka posisi strategis pendidikan agama Islam sebagai kontrol bagi kemajuan teknologi ini agar tidak liar menjadi hilang. Kuat arus informasi digital malah justru sering menyeret para pendidik ke dalam ujaran kebencian dan penyebaran informasi dusta.

Materi pendidikan agama Islam yang disajikan di sekolah masih banyak terjadi pengulangan-pengulangan dengan tingkat sebelumnya. Disamping itu, materi pendidikan agama Islam dipelajari tersendiri dan lepas kaitannya dengan bidang-bidang studi lainnya, sehingga mata pelajaran agama Islam tidak diterima sebagai sesuatu yang hidup dan responsif dengan kebutuhan siswa dan tantangan perubahan. Bahkan kehadiran pelajaran pendidikan agama Islam dapat dipastikan akan membosankan dan kurang menantang. Metodologi pembelajaran agama Islam di sekolah disampaikan sebagian guru secara statis-indoktrinatif-doktriner dengan fokus utama kognitif yang sibuk mengajarkan pengetahuan dan peraturan agama, akan tetapi bagaimana menjadi manusia yang baik: penuh kasih sayang, menghormati sesama, peduli pada lingkungan, membenci kemunafikan dan kebohongan dan sebagainya justru luput dari perhatian.

Merespon berbagai hal tentang mata pelajaran PAI tersebut, dapat diidentifikasi bahwa rendahnya kualitas PAI di sekolah karena beberapa faktor. Pertama, factor materi PAI itu sendiri yang lebih banyak berorientasi pada tafakuh fidin sehingga cenderung bersifat indoktrinasi tidak seperti materi pelajaran lainnya yang langsung bersentuhan dengan dunia kerja. Kedua, metode pembelajaran PAI cenderung di dominasi ceramah dan hafalan. Ketiga, PAI tidak diujikan dalam ujian nasional. Keempat, keterbatasan sarana pembelajaran PAI. Kelima, PAI merupakan salah satu materi pelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan di keluarga dan masyarakat (Sunhaji, 2014:334). Pembentukan karakter bangsa sangat bergantung dengan keberhasilan pembelajaran agama Islam yang terintegrasi ini, lebih-lebih di era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan melesatnya teknologi informasi ini PAI harus berinteraksi positif dengan kemajuan teknologi namun juga menjadi filter bagi dampak buruk teknologi itu sendiri. Sehingga agama akan menjadi ruh yang menjiwai berbagai macam profesi yang ada dinegeri ini.

A. Makna Karakter Dalam Perspektif Islam

Karakter secara bahasa berasal dari bahasa latin charakter, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Menurut ahli psikologi, karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang individu. Simon Philips memberikan definisi karakter yaitu kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem,

yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan ⁷.

Menurut Imam Ghazali yaitu salah satu ahli filsafat islam menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.

Dari beberapa pengertian karakter di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah kumpulan sistem tabiat, watak, dan akhlak yang lahir dari kebiasaan hidup . Dalam mekanismenya, ada 3 unsur yang membentuk karakter manusia yaitu pada saat kecil, lingkungan dan keilmuan.

Dari 3 unsur tersebut, unsur pertama dan kedua adalah yang memiliki peran banyak dalam pembentukan karakter manusia. Dalam perspektif Islam, karakter atau akhlak mulia merupakan buah yang dihasilkan dari proses penerapan syari'ah (ibadah dan muamalah) yang dilandasi oleh fondasi aqidah yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter atau akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi bangunannya kuat ⁸.

Karakter Islami adalah karakter yang berlandaskan agama islam, yaitu serangkaian perilaku normatif

⁷ Ade Kosasih, 'Edukasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.3 (2017).

⁸ Sholihul Anwar, 'Pendidikan Karakter Prespektif Islam (Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Maskawaih)', *JURNAL PEDAGOGY*, 15.2 (2022), 13–29.

manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial, yang normanya di turunkan dari ajaran dari ajaran islam, yang bersumber dari Al Quran, dan As Sunnah ⁹

Seorang Muslim yang memiliki aqidah atau iman yang benar pasti akan terwujud pada sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang didasari oleh imannya, maka akan terwujud dalam pribadi muslim sebuah karakter yang islami apabila memiliki aspek tersebut.

Contoh dari karakter islam sendiri yaitu, seperti apa yang dicontohkan Rasul kita nabi Muhammad (Sollu ‘alaihi) sebagaimana dalil pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

كَانَ لِمَنْ حَسَنَتْهُ أَسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولٍ فِيكُمْ كَانَتْ لَكُمْ
كَثِيرًا اللَّهُ وَذَكَرَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ اللَّهُ يَرْجُوا

Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu teladan yang baik; Bagi barangsiapa yang mengharapkan Allah dan Hari Kemudian dan yang banyak ingat kepada Allah. (Ayat 21).

Oleh karena itu, karakter itu harus memadukan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Rasulullah SAW sudah memberikan teladan itu dengan membangun pendidikan berbasis moral dan etik sebagaimana yang difirmankan Allah pada surat AlAhzab ayat 21.

⁹ Abdul Mujib, ‘Kepribadian Dalam Psikologi Islam’, (No Title), 2006.

B. Arti Pendidikan Agama Islam dan Tujuannya

Pendidikan dapat diartikan secara sempit yaitu bimbingan yang diberikan kepada anak-anak sampai ia dewasa. Sedangkan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu menjadi bagian dari kepribadian anak yang pandai, baik, mampu hidup, berguna bagi masyarakat.

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan Agama Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Agama Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran agama Islam.

Istilah membimbing, mengarahkan dan mengasuh serta mengajarkan dan melatih, mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa anak didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan, yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran, sehingga terbentuklah manusia yang berpribadi dan berbudi luhur.

Dari definisi di atas ada tiga poin yang dapat disimpulkan yaitu: Pertama, Pendidikan Agama Islam menyangkut aspek jasmani dan rohani, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, oleh

karena itu pembinaan terhadap keduanya harus seimbang. Kedua, Pendidikan Agama Islam mendasarkan konsepsinya pada nilai-nilai religius. Ini berarti bahwa pendidikan Agama Islam tidak mengabaikan faktor teologis sebagai sumber dari ilmu itu sendiri. sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. AlBaqarah:31. Ketiga, adanya unsur takwa sebagai tujuan yang harus dicapai, sebagaimana kita ketahui bahwa takwa merupakan benteng yang dapat berfungsi sebagai daya tangkal terhadap pengaruh-pengaruh negatif yang datang dari luar. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

C. Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Bangsa

Pembinaan kepribadian/karakter atau jiwa utuh hanya mungkin dibentuk melalui pengaruh lingkungan khususnya pendidikan. Sasaran yang ditempuh atau dituju dalam pembentukan kepribadian/karakter ini adalah kepribadian yang memiliki akhlak yang mulia dan tingkat kemuliaan akhlak erat kaitannya dengan tingkat keimanan.

Dalam pembentukan karakter seseorang, hendaknya setiap guru menyadari bahwa dalam pembentukan karakter sangat diperlukan pembinaan dan latihan-latihan akhlak pada siswa, bukan hanya diajarkan secara teoritis, tetapi harus diajarkan ke arah kehidupan praktis. Agama sebagai unsur esensi dalam kepribadian manusia dapat memberi peranan positif dalam perjalanan kehidupan

manusia, selain kebenarannya masih dapat diyakini secara mutlak.

Dalam hal pembentukan karakter seseorang, pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Pendidikan agama berperan sebagai pengendali tingkah laku atau perbuatan yang terlahir dari sebuah keinginan yang berdasarkan emosi. Jika ajaran agama sudah terbiasa dijadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan seseorang sehari-hari dan sudah ditanamkannya sejak kecil, maka tingkah lakunya akan lebih terkendali dalam menghadapi segala keinginankeinginannya yang timbul.

Telah kita ketahui banyak anak-anak memiliki kepribadian buruk yang mengakibatkan merosotnya moral. Betapa pentingnya pendidikan agama untuk seseorang, dan betapa pula besarnya bahaya yang terjadi akibat kurangnya pendidikan agama itu. Untuk itu, perlu kiranya kita mencari jalan yang dapat mengantarkan kita kepada terjaminnya kepribadian yang dapat menciptakan dan memelihara ketentraman dan kebahagiaan masyarakat dan bangsa di kemudian hari.

Maka dari itu untuk membentuk karakter yang berlandaskan agama pertamata di tentukan oleh keluarga terlebih dahulu, karena keluarga memiliki peran penting dalam mendidik agama bagi anak-anaknya, terutama dalam pembentukan kepribadian atau karakter. Artinya keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lain kepada kehidupan beragama sedini mungkin Agama banyak

memberikan pengajaran yang baik dalam membentuk kepribadian seseorang ,contohnya seorang anak akan bersikap santun terhadap orang yang lebih tua di bandingkan dia, itu karena orang tua sudah mengajarkan kebaikan sejak dini kepada anaknya, jadi si anak tidak akan mengubah karakter dia menjadi orang lain. Karena itu sudah menjadi syariat dalam beragama. Agama banyak memberikan kita ulasan mengenai pembentukan karakter yang lebih baik

Jadi, ilmu pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan Agama, Sehingga Agama dijadikan sebagai suatu landasan perumusan pendidikan, dan pendidikan agama mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan moral dan karakter anak didik. Oleh karena itu orang tua/pendidik haruslah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendidikan agama hendaklah diberikan kepada anak sedini mungkin, ajarilah dari hal-hal yang kecil sesuai dengan tuntunan agama.
2. Pelajaran pendidikan agama bukan merupakan science semata, melainkan ilmu amaliah tercakup di dalamnya.
3. Anak cenderung mengikuti apa yang dilihatnya dari orang dewasa oleh karena itu hendaknya orang-orang tua membiasakan berperilaku keseharian dengan akhlakul karimah, baik perkataan maupun perbuatan.

Pendidikan agama pada dunia pendidikan merupakan modal dasar bagi anak untuk mendapatkan nilai-nilai ketuhanan, bahwa betapa pentingnya nilai-nilai agama diajarkan kepada anak, dimana dalam dunia

pendidikan dicakup dalam satu bidang garapan yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama dalam kehidupan tidaklah sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, melainkan juga orang tua sebagai contoh nyata dalam kehidupan anak. Bagaimana mungkin anak akan berkarakter baik, jika orang tuanya hidup dalam ketidakbaikan. Oleh karena itu pendidikan agama harus ditanamkan kepada anak dimanapun ia berada, baik formal maupun non formal.

D. DISKUSI

Uraian diatas menggambarkan bahwa pendidikan merupakan agen perubahan yang signifikan dalam pembentukan karakter anak, dan pendidikan agama Islam menjadi bagian yang penting dalam proses tersebut, tetapi yang menjadi persoalan selama ini adalah pendidikan agama Islam disekolah hanya diajarkan sebagai sebuah pengetahuan tanpa adanya pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga fungsi pendidikan agama Islam sebagai salah satu pembentukan akhlak mulia bagi siswa tidak tercapai dengan baik ¹⁰

Pola pembelajaran terhadap materi PAI diatas sudah saatnya dirubah. Guru yang menjadi ujung tombak keberhasilan sebuah pembelajaran harus menyadari bahwa tanggung jawabnya terhadap keberhasilan pembelajaran PAI tidak hanya pada tataran kognitif saja. Tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada siswa bahwa pendidikan agama adalah

¹⁰ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran* (Mizan, 1995).

sebuah kebutuhan sehingga siswa mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan pengetahuan agama yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari.

Disinilah dibutuhkan kreatifitas guru dalam menyampaikan pembelajaran, dimana pembelajaran PAI seharusnya tidak hanya diajarkan didalam kelas saja, tetapi bagaimana guru dapat memotivasi dan memfasilitasi pembelajaran agama diluar kelas melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan menciptakan lingkungan sekolah yang religius dan tidak terbatas oleh jam pelajaran saja serta terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Media ajar pendidikan agama Islam juga harus bervariasi. Penggunaan teknologi, aplikasi, video pembelajaran berkualitas akan dapat mempengaruhi akhlak dan karakter peserta didik

Tujuan utama dari Pembelajaran PAI adalah pembentukan kepribadian pada diri siswa yang tercermin dalam tingkah laku dan pola pikirnya dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran PAI tidak hanya menjadi tanggung jawab guru PAI seorang diri, tetapi dibutuhkan dukungan dari seluruh komunitas disekolah, masyarakat, dan lebih penting lagi adalah orang tua. Sekolah harus mampu mengkoordinir serta mengkomunikasikan pola pembelajaran PAI terhadap beberapa pihak yang telah disebutkan sebagai sebuah rangkaian komunitas yang saling mendukung dan menjaga demi terbentuknya siswa berakhlak dan berbudi pekerti luhur.

Ibnu Shina dalam Risalah al-Siyâsah mensyaratkan profesionalitas guru ditentukan oleh kecerdasan,

agamanya, akhlaknya, kharisma dan wibawanya. Oleh karena itu salah satu proses mendidik yang penting adalah keteladanan. Perilaku dan perangai guru adalah cermin pembelajaran yang berharga bagi peserta didik. Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru selayaknya berprinsip “ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso” (didepan memberi contoh, ditengah memberikan bimbingan dan dibelakang memberikan dorongan). Keteladanan inilah salah satu metode yang seharusnya diterapkan guru dalam pembelajaran PAI. Guru harus mampu menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sebelum mengajarkan nilai-nilai agama tersebut kepada siswa. Karena ia akan menjadi model yang nyata bagi siswa. Pendidikan yang berhubungan dengan kepribadian atau akhlak tidak dapat diajarkan hanya dalam bentuk pengetahuan saja, tetapi perlu adanya pembiasaan dalam prilakunya sehari-hari. Setelah menjadi teladan yang baik, guru harus mendorong siswa untuk selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu selain menilai, guru juga menjadi pengawas terhadap perilaku siswa sehari-hari di sekolah, dan disinilah pentingnya dukungan dari semua pihak dalam kehidupan bangsa. Perilaku keagamaan akan dapat tumbuh dan berkembang jika pendidikan Agama Islam terintegrasi dengan semua mata pelajaran serta sains dan teknologi. Perpaduan pendidikan agama Islam dengan sains dan teknologi adalah sebuah keniscayaan, sebab agama bertugas untuk mengawal dan mengontrol dari dampak negatif teknologi itu sendiri.

Indikator keberhasilan pendidikan Karakter adalah jika seseorang telah mengetahui sesuatu yang baik (knowing the good) (bersifat kognitif), kemudian mencintai yang baik (loving the good) (bersifat afektif), dan selanjutnya melakukan yang baik (acting the good) (bersifat psikomotorik).

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sholihul, ‘Pendidikan Karakter Prespektif Islam (Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Maskawaih)’, *JURNAL PEDAGOGY*, 15.2 (2022), 13–29
- Kosasih, Ade, ‘Edukasi Spiritual Dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran’, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.3 (2017)
- Mujib, Abdul, ‘Kepribadian Dalam Psikologi Islam’, (*No Title*), 2006
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran* (Mizan, 1995)

Tifla Habib Ghifari
PMII dan Strategi Gerakan
Kepemimpinan

Kaderisasi PMII pada hakekatnya adalah totalitas upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk membina dan mengembangkan potensi dzikir, fikir dan amal soleh setiap insan pergerakan. Secara kategoris dapat dipilih dalam tiga bentuk yakni: Perkaderan Formal, Perkaderan Non Formal (Pengembangan) dan Perkaderan Informal. Ketiga bentuk ini harus diikuti oleh segenap warga pergerakan, sehingga pada saatnya kelak akan terwujud kader yang berkualitas ulul albab.

Perkaderan formal meliputi tiga tahapan dengan masing-masing follow-up-nya. Ketiganya itu adalah Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba), Pelatihan Kader Dasar (PKD), Pelatihan Kader Lanjutan (PKL), dan Pelatihan Kader Nasional (PKN). Semua tahapan dengan follow-up yang menyertai itu merupakan satu kesatuan tak terpisahkan, karena kaderisasi PMII pada hakekatnya merupakan proses terus menerus, baik di dalam maupun di luar forum kaderisasi (long-life-education).

Perkaderan Formal Pengembangan adalah berbagai pelatihan dan pendidikan yang ada di PMII. Perkaderan jenis ini dibedakan dalam dua macam, yakni 1) yang wajib diikuti oleh segenap kader secara mutlak, dan 2) yang wajib diikuti sebagai pilihan. Yang sifatnya wajib mutlak, disamping sebagai pembekalan mengenai hal-hal dasar yang harus dimiliki kader pergerakan, juga merupakan prasyarat bagi keikutsertaan kader bersangkutan dalam PKD

atau PKL. Sedang perkaderan informal adalah keterlibatan kader pergerakan dalam berbagai aktifitas dan peran kemasyarakatan PMII. Baik dalam posisi sebagai penanggung jawab, menjadi bagian dari team work, atau bahkan sekedar partisipan. Perkaderan jenis ini sangat penting dan mutlak diikuti. Disamping sebagai tolak ukur komitmen dan militansi kader pergerakan, juga jauh lebih real dibanding pelatihan-pelatihan formal lain, karena langsung bersinggungan dengan realitas kehidupan.

Di atas semua pelatihan tersebut terdapat satu pelatihan lagi yakni pelatihan fasilitator. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menciptakan kader-kader pergerakan yang secara terus menerus akan membina dan menangani berbagai forum perkaderan di PMII. Pelatihan lebih utama ditujukan bagi kader-kader potensial yang telah mengikuti semua bentuk perkaderan sebelumnya, dan yang telah teruji komitmennya terhadap PMII maupun aktifitas dan peran-peran sosial.

Melihat realita sekarang, hampir di setiap universitas yang ada PMII nya, pengkaderan yang dilakukan pasca MAPABA selalu menjadi kendala. Tak jarang, setiap anggota baru selalu mengeluh akan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus baik rayon ataupun komisariat. Mereka seakan dibohongi dengan iming-iming yang diberikan oleh seniornya yang ada di kampus. Alhasil, anggota semakin hari semakin menjauh dari PMII karena apa yang dilakukan pengurus tidak sama dengan apa yang dilakukan sebelum dia melaksanakan MAPABA. Jika tidak diperbaiki, maka hal ini akan mengakar dan akan menghilangkan hatta PMII yang selalu mengatakan dirinya sebagai organisasi kaderisasi.

A. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang diartikan sebagai "*The Art Of The General*" atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Strategi ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Sedangkan menurut Glueck dan Jauch, p., 1989 bahwa : "Strategi adalah Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi".

Dalam KBBI Pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi; pendampingan merupakan istilah baru yang muncul sekitar 90-an, sebelum itu istilah yang banyak dipakai adalah pembinaan. Sedangkan kader dalam KBBI diartikan sebagai orang yang diharapkan akan memegang peran yang penting dalam pemerintahan, partai, dan sebagainya; Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi Pendampingan Kader adalah cara atau proses yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini pengurus PMII dalam mengarahkan, menuntun dan mengajak anggota dan kader demi tercapainya tujuan PMII yang termaktub dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 4 yaitu : *Terbentuknya pribadi muslim Indonesia berilmu yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, Berilmu,*

cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

B. Strategi Gerakan Kepemimpinan

Pembinaan dan pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal, informal maupun Nonformal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah, terpadu, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing dan mengembangkan suatu kepribadian yang seimbang dan utuh, baik jasmaniah maupun rohaniyah. Pembinaan dan pengembangan diarahkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian serta membentuk sikap mental spiritual berakhlakul-karimah sesuai dengan bakat dan minat serta kemamuan sebagai bekal untuk selanjutnya, atas parakarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungan ke arah tercapainya tingkat letaqwaan yang tinggi serta harkat, martabat dan kualitas pribadi yang optimal. Dari bekal yang dicapai melalui pembinaan dan pengembangan tersebut merupakan jaminan gerak sistem perjuangan PMII dalm mencapai cita-citanya.

Renstra pengembangan dan perjuangan PMII, baik secara individu maupun secara organisatoris memerlukan kondisi dan suasana lingkungan yang sehat. Kondisi dan suasana lingkungan yang sehat tersebut dimaksudkan untuk menumbukan kreatifitas mahasiswa dalam kemajuan dan kemodernan bangsa sekaligus mata rantai persambungan kepemimpinan bangsa.

Kondisi dan suasana yang sehat dalam mencapai sasaran tersebut, mutlak bermuatan kesetaraan atau egaliter, saling percaya, menghargai, jujur dan adil, terbuka, bebas dan bertanggung jawab, menjamin pemberlanjutan ekologis serta terbangunnya hubungan pergaulan budaya yang dewasa dalam konteks bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

C. Memahami Makna PMII

Makna “Pergerakan” yang dikandung dalam PMII adalah dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan bagi alam sekitarnya. Dalam konteks individual/komunitas maupun organisatoris, kiprah PMII haruslah senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawabnya memberi rahmat pada lingkungannya. “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam kualitas kekhalfahannya.

Pengertian “mahasiswa” yang terdandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan relegius, insan dinamis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut, terpantul tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab intelektual, tanggung jawab sosial kemsayarakatan, dan tanggung

jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai waga bangsa dan negara. Pengertian “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan/paradigma Ahlussunnah Wal Jamaah yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proporsional antara Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap dan pola prilakunya tecermin sifat-sifat selektif, akomodatif, dan integratif.

Pengertain ‘Indonesia” yang terkandung didalam PMII adalah masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah & ideologi bangsa (pancasila) serta UUD 45 dengan kesadaran kesatuan dan ketuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang samapai Merauke yagn diikat dengan kesadaran wawasan nusantara.

Secara totalistas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertyaqwa kepada Allah SWT , dan atas dasar ketqwaan berkiprah mewujudkan peran ketuhananya membangun masyarakat bangsa dan negara indonesia manuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridlo Allah SWT.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pendampingan Kader PMII

Dalam proses pendampingan terhadap anggota dan kader PMII, kita perlu memperhatikan beberapa faktor internal dan juga faktor external, faktor internal yang dimaksud adalah dorongan yang ada dalam diri pribadi

dan juga apa yang dimiliki oleh organisasi PMII itu sendiri, modal dasar dan faktor dominan yang ada dalam PMII menjadi faktor yang sangat sentral dalam mendampingi dan mengarahkan anggota dan kader itu sendiri.

E. Modal dasar

Modal dasar PMII adalah

1. PMII merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang eksistensinya dijamin oleh UUD 1945 dan karena itu menjadi aset bangsa dalam melakukan proses pembinaan, dan pengembangan generasi muda khususnya mahasiswa.
2. NDP sebagai nilai prinsip ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah merupakan sumber motivasi dan inspirasi pergerakan, sekaligus sebagai pendorong, penggerak dan landasan berpijak dalam kehidupan pribadi insan PMII.
3. PMII sebagai organisasi mahasiswa Islam mempunyai keterikatan dan tanggung jawab dengan seluruh masyarakat bangsa Indonesia yang menganut sistem berfikir keagamaan, dan kemasyarakatan yang sama yaitu ASWAJA dan system kebangsaan.
4. Peran kesejarahan PMII telah menunjukkan kepeloporannya dan patriotismenya dalam menegakkan dan membela agama. Pancasila dan UUD 1945 dalam negara kesatuan republik Indonesia. Selain itu, PMII sebagai elemen civil society telah terbukti perannya dalam melakukan pendampingan masyarakat, dalam usaha melakukan proses demokratisasi di kalangan

masyarakat dan sebagainya. Peran PMII dalam setiap perubahan, terutama dalam menegakan reformasi secara total, dalam segala lapis kehidupan kemasyarakatan.

5. Jumlah dan persebaran anggota PMII yang berada diseluruh wilayah Indonesia sebagai sumber daya insani yang potensial. Dengan kemapanan struktur organisasi dari tingkat pusat sampai daerah, maka sosialisasi nilai dan gagasan serta kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
6. Ketaqwaan kepada Allah SWT merupakan acuan dasar dan sekaligus menjadi nspirasi bagi peningkatan kualitas diri menuju kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Allah SWT.
7. Jumlah dan mulai tersebar nya profesi alumni PMII merupakan bagian potensi bagi pengembangan organisasi dan masyarakat.
8. Tipologi kader yang beragam warga PMII merupakan modal utama dalam menyusun Renstra Gerakan PMII. Setidaknya, ada lima tipologi dan kecenderungan warga PMII. Pertama, intelektual baik akademik (scholar) maupun organik (analisis/praktisi). Kedua, gerakan massa (student movement), baik yang menggunakan baju organisasi maupun organ gerakan lainnya. Ketiga, advokasi sosial baik yang intens dengan pendampingan sosial, maupun advokasi wacana. Keempat, politisi baik keterlibatan dalam panggung konstalasi politik, maupun persinggungan dengan dunia politisi. Kelima, kecenderungan

profesional dan enterpreneur. Hanya saja, persebaran tipologi kader ini tidak merata, sehingga cenderung ada disparitas antara satu cabang dengan lainnya.

F. Faktor Dominan

Dalam mengerakkan dan memanfaatkan modal dasar untuk mencapai tujuan PMII dengan landasan serta azas-azas diatas, perlu diperhatikan faktor-faktor dominan berikut :

1. Ideologi yang dianaut oleh PMII merupakan aspek dominan dari organisasi PMII yang berisi pandangan hidup, cita-cita serta sistem nilai yang memberikan arah terhadap tingkah laku dari setiap anggota PMII. PMII berakidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan atas dasar akidah itulah PMII dengan penuh kesadaran berideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dahn bernegara di Indonesia. Akidah dan ideologi terebut merupakan faktor pendorong dan penggerak dalam proses pembinaan pengembangan dan perjuangan organisasi sekaligus sebagai dasar berpijak dalam menghadapi proses perubahan dan goncangan-goncangan di tengah-tengah masyarakat. Pandangan terhadap wacana Islam yang inklusif dan paradigma kritis transformatif dalam membangun masyarakat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam diri PMII. Pola pandangan keagamaan ini, merupakan faktor dominan yang dimiliki PMII dalam rangka pengembangan mendatang.

2. Komunitas Islam Ahlussunnah Waljamaah sebagai kelompok masyarakat terbesar Indonesia merupakan wahana dan tempat pengabdian yang jelas bagi PMII;
3. Jumlah anggota PMII yang setiap tahunnya bertambah dengan kuantitas yang cukup besar merupakan faktor strategis yang menentukan usaha pembinaan generasi muda dalam proses kelahiran kader bangsa; sekaligus menjadi pelanjut kepemimpinan organisasi.
4. Jumlah Alumni yang setiap tahunnya bertambah, sejak berdirinya PMII tahun 1960 tersebut tersebar diseluruh wilayah Indonesia dan bergerak dalam berbagai profesi dan disiplin ilmu yang mengabdikan pada agama, masyarakat dan negara.

Sumber dana dan fasilitas yang tersebar diberbagai komunitas dan kelompok terutama ummat Islam merupakan aset yang perlu dikoordinir, dikembangkan sebagai sumber dana perjuangan. Oleh karena itu PMII harus mampu menjalin hubungan organisasi yang saling bermanfaat dan memberikan nilai lebih antara keduanya yang pada akhirnya PMII mempunyai sumber dana secara mandiri.

G. Strategi Pendampingan Kader PMII

Strategi yang dimaksud disini adalah adanya suatu kondisi serta langkah-langkah yang mendasar, konsistensi dan aplikatif yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII.

Dari pemahaman strategi itulah maka untuk mencapai tujuan pembinaan pengembangan dan

perjuangan yang telah ditetapkan diperlukan strategi sebagai berikut:

Iklim yang mampu menciptakan suasana yang sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kepemimpinan harus difahami sebagai amanat Allah yang menempatkan setiap insan PMII sebagai Da'I untuk melakukan amar makruf nahi munkar. Sehingga kepemimpinannya selalu tercermin sikap bertanggungjawab melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas; serta didalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.

Untuk mewujudkan suasana taqwa, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanat Allah SWT diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi.

Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik sehingga dapat mewujudkan sistem dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu memwadahi dinamika intern organisasi serta mampu merespon dinamika dan perubahan eksternal.

Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitutif, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum dari tingkat pengurus besar sampai tingkat rayon.

Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu terciptanya komunikasi timbal balik dan berdulat serta mampu membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan; baik kedalam maupun keluar.

Pola kaderisasi yang dikembangkan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman kini dan mendatang, sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafahan yang terejawantahkan dalam perilaku keseharian, baik selaku kader bangsa maupun kader agama.

H. Tujuan Strategi Pendampingan Kader PMII

Tujuan pembinaan pengembangan dan perjuangan PMII diarahkan pada terbentuknya pribadi dan kondisi organisasi yang dapat mencapai tujuan dan cita-cita PMII. Pribadi dan kondisi organisasi yang dimaksud adalah tercapainya suatu sikap dan perilaku:

1. Terwujudnya kader-kader penerus perjuangan PMII yang bertaqwa kepada Allah SWT, berpegang teguh pada ajaran Islam Aswaja serta Pancasila dan UUD 1945 sebagai satu-satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa dan negara.
2. Terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam Aswaja dan moral bangsa untuk

memperkokoh alas pijak dalam rangka menempuh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang cepat sebagai akibat lajunya perkembangan IPTEK sert arus globalisasi dan informasi.

3. Tumbuh dan berkembangnya kreatifitas, dinamika dan pola berfikir yang mencerminkan budaya pergerakan, selektif, akomodatif, integratif dan konstruktif dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap permasalahan baik secara individu, organisasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
4. Tumbuh dan berkembangnya sikap dan orientasi kemasa depan, orientasi fungsi dan produktifitas serta mengutamakan prestasi.
5. Terciptanya suatu organisasi sebagai suatu sistem yang sehat dan dinamis karena didukung oleh nilai, aparat, sarana dan fasilitas serta teknik pengolahan yang memadai sesuai dengan tuntutan PMII maupun tuntutan lingkungan yang senantiasa berkembang.
6. Terciptanya suatu kehidupan organisasi yang dinamis, kritis dan cerdas dalam merebut tanggungjawab dan peran sosial sebagai bentuk partisipasi dan pengamalan nyata pergerakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga PMII dapat benar-benar menjadi lembaga alternatif baik pada dimensi pemikiran maupun kualitas kepemimpinan dan sumber daya manusia.
7. Tumbuhnya suatu situasi dan kondisi yang mencerminkan kekokohan PMII yang berpijak pada

nilai-nilai dan tradisi yang dimilikinya serta mampu mencari alternatif yang paling mungkin dalam usaha untuk tidak terjeret pada polarisasi dan opini yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang dapat merugikan perjuangan mewujudkan cita-cita PMII.

8. Tersedianya kader-kader yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai konsekuensi logis dari arah PMII sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan perjuangan yang dihidmatkan kepada agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Kebutuhan pergerakan dalam merealisasikan berbagai program-programnya bisa dilakukan apabila perangkat-perangkatnya memadai. Perangkat ini meliputi dua hal yakni; perangkat lunak yang berkaitan dengan SDM dan konsep (wacana) yang menjadi kekuatan mainstream pergerakan ataupun perangkat keras yang meliputi institusi dan struktur organisasi sebagai kekuatan untuk mensosialisasikan sebagai sesuatu yang kongkrit. Melihat keberadaan dua kebutuhan tersebut yang tergambar dalam wajah PMII, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki.

Menyangkut SDM sebagai basis utama berkembangnya PMII. Dalam perspektif sosiologis gambaran warga PMII bisa dilihat dari dua hal. Warga PMII yang secara tradisi, kultur dan ritual kental dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama dan warga PMII yang secara tradisi, kultur dan ritual kurang atau malah sama sekali tidak bersentuhan dengan nilai-nilai Nahdlatul Ulama.

Dalam perspektif pendidikan terbelah dalam dua hal. Warga PMII yang dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berada di dalam sekolah agama, dan warga PMII yang dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi berada di dalam sekolah umum. Kekuatan disiplin ilmu akademis warga PMII yang dominan adalah disiplin ilmu-ilmu sosial. Sedangkan disiplin ilmu-ilmu eksakta masih sangat kurang.

Realitas terhadap gambaran ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan wajah gerakan PMII dan orientasi pengembangan yang dilakukan. Dominasi disiplin ilmu-ilmu sosial menurun dalam cara pandang, titik pijak filosofis dan teologis, nilai-nilai yang menjadi pijakan, dan pokok-pokok program yang direncanakan. Gambaran ini berasal dari sumber motivasi kekuatan kultur, tradisi, disiplin pendidikan, yang dikombinasikan dengan kekuatan-kekuatan baru yang digali dari pemaknaan ulang atas teori, nilai, bangunan kultur dan tradisi, serta kekuatan filosofis dan teologis didukung dengan sumber teori dan nilai baru yang sedang berkembang. Pemangkasan ikatan cultural dan struktural yang dianggap tidak berkesuaian dengan kekinian telah menumbuhkan banyak perubahan dan pembaharuan.

Dekonstruksi atas visi, misi, orientasi dalam bentuk penjelajahan intelektual ini menetas dalam bangunan kekuatan wacana sebagai titik pijak suatu perubahan. Perubahan dimengertikan dalam bangunan kesejatan kesadaran atas realitas yang penuh, kepercayaan atas kekuatan budaya tradisi dan ritualnya, pilihan gerakan dan keperpihkan serta dalam bentuknya yang sangat praktis

pola-pola gerakan yang dikembangkan. Perubahan PMII dimulai dari penumbuhan wacana independensi sebagai kekuatan untuk menjaga eksistensinya dari intervensi, kooptasi, dan hegemoni kekuatan mainstream dari luar, termasuk yang dikembangkan dan diideologisasikan oleh negara dan kekuatan kapitalisme global.

Wacana independensi kemudian berkembang dan terus melakukan metaformosis sampai pada titik baru bangunan kemandirian. Sebagai upaya untuk mengarahkan pada kekuatan masyarakat yang independent dan mempunyai kemandirian, kemudian tumbuh filosofi liberasi, ahlusunah waljama'ah sebagai manhaj al-fikr bahkan manhaj transformasi sosial, telaah kritis atas nilai-nilai universal yang memihak kepada masyarakat (bukan negara).

Jaka Afianto

Keislaman Dan Kebangsaan

Keislaman dan kebangsaan adalah dua wawasan utama yang harus ada dalam setiap organisasi kemasyarakatan Islam (ORMAS) di Indonesia. Wawasan Islam menjadi penting karena merupakan landasan utama yang kemudian menjadi sumber sekaligus ruh dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan menjadi penting karena organisasi dakwah yang bersangkutan tumbuh dan berkembang dalam suatu negara bangsa (Indonesia), untuk itu sikap nasionalisme tidak dapat ditawar lagi. Oleh karena itu, setiap SDM (kader) dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif, tidak hanya memahami tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam setiap langkah menjalankan organisasi. Wawasan keislaman tanpa dibarengi dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada intoleransi terhadap organisasi bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Nasionalisme yang lemah juga akan berdampak pada melemahnya institusi.

Fakta bahwa mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam, dan kecenderungan umat Islam berafiliasi dengan ormas atau organisasi dakwah Islam tertentu. Maka sangat logis jika wawasan kebangsaan kader ormas Islam atau organisasi dakwah melemah, maka akan berdampak pada melemahnya institusi negara. Jika konstitusi Negara

telah dilemahkan, dapat disimpulkan bahwa Negara akan mudah tercerai-berai dan sekaligus lemah (inferior) di hadapan Negara lain. Sebaliknya, jika hanya ada wawasan kebangsaan tanpa wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan dapat berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin sumber daya manusia organisasi dakwah lemah dalam wawasan keislamannya, lalu apa yang akan diberitakan. Menyadari pentingnya wawasan keislaman dan wawasan kebangsaan dalam pengembangan organisasi dakwah, maka dalam artikel ini penulis akan membahas tentang konsep keislaman dan kebangsaan yang menjadi modal utama dalam pengembangan organisasi dakwah. Pembahasan ini meliputi: bagaimana konsep Islam dan ciri-cirinya, sumber ajaran Islam, Islam normatif dan Islam historis, nilai-nilai universal dalam ajaran Islam, nasionalisme dan nasionalisme, serta hubungan antara nilai-nilai Islam dan kebangsaan.

Keislaman dan kebangsaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi dakwah. Seluruh kader (SDM) dalam organisasi dakwah harus kuat dalam kedua perspektif tersebut. Tidak hanya memahami tetapi juga harus dihayati dan diamalkan dalam setiap gerak perjalanan organisasi. Hal ini membutuhkan pemahaman tentang konsep keislaman dan kebangsaan.

1. Islam dan Karakteristiknya

Secara etimologis, Islam berasal dari kata salima yang berarti aman, tenteram, damai, tunduk dan pasrah. Kata salima kemudian berubah menjadi wazan aslama yang artinya ketaatan, ketundukan, dan penyerahan diri. Jadi, seorang muslim harus taat, tunduk dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga berarti keselamatan

dan keamanan, serta perdamaian dan rekonsiliasi. Sedangkan secara termino

logis, Islam adalah agama yang ajarannya diturunkan oleh Allah kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul (Nasution, 1993: 9). Sebagai agama, Islam diyakini mengandung berbagai pedoman ideal bagi kesejahteraan hidup manusia yang tertuang dalam sumber ajarannya, Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagaimana dikatakan Rahman (1987:49), sesuai dengan Alquran bahwa Islam sarat dengan ajaran moral yang menekankan tauhid dan kesejahteraan sosial. Masih dalam definisi Islam, Fauz Noor (2012: 157) menjelaskan bahwa kata Islam oleh ulama eksklusif diterjemahkan sebagai satu lembaga yang bernama Islam. Padahal, kata Islam dalam al-Qur'an surat Ali Imron ayat 85 *“Barangsiapa mencari agamaselainagama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi”*,

semestinya dipandang secara substansial. Seperti dijelaskan oleh imam Raghib al-Isfahani, Islam itu ada dua macam; 1) Islam di bawah iman, yaitu hanya mengakui dengan lisan saja; 2) Islam di atas iman, yaitu bersamaan dengan pengakuan lisan, juga dalam hati, dan diamalkan dalam perbuatan dengan penyerahan diri kepada Tuhan dalam segala hal yang telah dia tetapkan dan tentukan. Rasanya tidak mungkin jika Islam yang dimaksud dalam surat Ali Imron ayat 85 itu sebatas Islam di bawah iman saja. Tentu Islam yang dimaksud adalah Islam di atas iman.

Islam memiliki titik tekan pada aspek kepasrahan dan penyerahan diri kepada Allah, bukan pada sekedar istitusi

agama yang bernama Islam. Islam tidak cukup hanya sebatas simbol yang bersifat legal-formal seperti KTP maupun simbol lain yang melekat pada pribadi seseorang (pakaian, dan atribut-atribut lainnya), namun lebih pada kepasrahan mutlak pada Yang Maha Kuasa. Contohnya, jika ritual ibadah dipenuhi sifat *riya'* (ingin dipuji orang lain) maka amalnya pasti tertolak oleh-Nya. Sebab, tidak pasrah kepada-Nya, ada rasa ingin dipuji oleh selain-Nya; sebab menyekutukan Tuhan dengan orang yang diharapkan pujiannya. Islam berarti kepasrahan, ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya. (Noor, 2012: 159).

Oleh sebab itu, sebagai umat muslim kita harus lebih mengedepankan aspek Islam di atas iman bukan sekedar Islam di bawah iman. Sehingga keismalan kita pun akan menjadi sempurna karena dipenuhi dengan rasa kepasrahan yang mutlak kepada-Nya. Itulah inti dari Islam yang sejati; pasrah, tunduk, dan patuh. Islam bukan sebatas doktrin agama yang berisi ritualsaja, namun Islam juga memiliki baraneka karakteristik. Seperti yang dijelaskan oleh Tabrani (2015: 76-93), Islam memiliki berbagai karakteristik; bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian Islam mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh kepada AllahSWT. 2. Sumber Ajaran Islam Al-Qur'an adalah Kalam atau Firman Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang bacaannya adalah ibadah (Qattan, 2015:17). Al-Qur'an

merupakan sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Ini adalah buku yang berisi ajaran yang komprehensif.

Secara sederhana, Al-Qur'an memuat aturan-aturan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. Selanjutnya dari ketiga relasi tersebut terdapat sub-sub sub yang menjadi topik bahasan mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, syariah, muamalah, bidang ilmu, budaya, sejarah, pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, politik. dan banyak lagi. Demikianlah, karena Alquran merupakan sumber utama ajaran Islam.

Sumber kedua adalah hadits. Dalam bahasa hadits, artinya baru sebagai lawan dari qadim (lama). Dari sudut pandang ini, hadits adalah setiap perkataan yang diucapkan dan dikutip serta disampaikan oleh manusia, baik perkataan itu diperoleh melalui pendengaran maupun wahyu, baik dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur. Sedangkan menurut istilah hadits adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. berupa perkataan, perbuatan, kesepakatan dan sifat-sifat. (Qattan, 2015: 22). Hadits terdiri dari dua macam; hadits kudsi dan hadits nabawi. Hadits kudsi adalah hadits bahwa nabi Muhammad bersandar kepada Allah. Jadi secara sederhana, bahwa Al-Qur'an dan hadits Kudsi dibedakan karena Al-Qur'an berasal dari Allah, baik lafalnya maupun maknanya, sedangkan hadits Kudsi hanya berarti dari Allah saja, lafalnya dari Rasulullah Muhammad SAW Sendiri. Hadits Nabawi terdiri dari dua: 1) bersifat tauqifi, yaitu yang isinya diterima Nabi dari wahyu, kemudian beliau menjelaskan kepada manusia dengan perkataannya sendiri. Sekalipun isinya berhubungan

dengan Allah, namun secara tuturan lebih tepat dikaitkan dengan Rasulullah, karena kata-kata itu terkait dengan orang yang mengucapkannya, meskipun mengandung makna yang diterima dari pihak lain; 2) bersifat taufiqi, yaitu apa yang Nabi simpulkan menurut pemahamannya terhadap Al-Qur'an, karena beliau bertugas menjelaskan Al-Qur'an atau menyampaikannya dengan pertimbangan ijtihad. Bagian penutup yang merupakan ijtihad diperkuat dengan wahyu jika benar. Dan jika ada kesalahan di dalamnya, wahyu akan turun untuk memperbaikinya. (Qattan, 2015: 27). Sebagai sumber ajaran yang ke dua, hadits juga memiliki tingkatan berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan perawinya dibedakan menjadi hadits mutawatir (banyak jalur perawinya) sehingga lebih kuat dan hadits ahad yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur saja. Selain itu hadits juga dibedakan berdasarkan kualitasnya; ada hadits sahih, hasan, dloif bahkan hadits palsu (maudlu). Untuk itu umat Islam harus senantiasa selektif dalam memilih sebah hadits, agar tidak terjebak kepada sebuah kesesatan. Karena tidak semua hadits dapat dijadikan sebagai pijakan dan landasan hukum.

Selain Alquran dan Hadits, mayoritas ulama juga menerima Ijtihad sebagai sumber ajaran Islam. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum (mujmal). Maka kita membutuhkan penjelasan tentang hadits tersebut. Hadits berfungsi sebagai bayan, tafsir, dan takhsis bagi Al-Qur'an.

Namun, jika ada beberapa hal baru sesuai T dengan perkembangan zaman yang tidak dijelaskan secara tegas (tertulis) di keduanya (AlQur'an dan Hadits), maka diperlukan pemikiran yang mendalam, agar semua persoalan

yang berkembang dapat terjawab. dijawab secara komprehensif. Dalam posisi inilah ijtihad dibutuhkan. Ijtihad berasal dari kata jahada yang memiliki arti berusaha keras atau berusaha sekuat tenaga. Maksudnya, pencurahan segenap kemampuan untuk mendatangkan sesuatu dari berbagai urusan atau perbuatan. Ijtihad dapat dicapai melalui beberapa metode; 1) metode Qias (analogi), yaitu menentukan suatu hukum berdasar hukum yang sudah ada karena persamaan illat (motivasi hukum). Misalnya, meskipun rasulallah tidak pernah zakat beras, namun zakat berupa beras tatap sah berdasar illat, yaitu makanan pokok; 2) Ijmak atau konsensus, yaitu menetapkan dan memutuskan suatu perkara dan berarti pula sepakat atau bersatu dalam pendapat. Misalnya terkait hukum BPJS, ada konsensus ulama terkait persoalan itu, sehingga halal dan sah meskipun tidak ada dalil yang secara eksplisit memerintahkannya; 3) Istihsan, yaitu menjelaskan keputusan pribadi yang tidak didasarkan atas qias, melainkan didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan. Misalnya khalifah Umar bi Khatab radliyallahu ‘anhu pernah membebaskan hukum potong tangan kepada pencuri pada saat paceklik; 4) Maslahat al-Mursalat, yaitu keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara’. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan maslahat al-mursalat menolak mafsadat atau mengambil manfaat dari suatu peristiwa. Misalnya, meskipun alkohol dan judi itu ada maslahat (manfaatnya), namun keburukan (mafsadatnya) lebih besar, sehingga keduanya dilarang. Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara

mafsadat dan maslahat didahulukan menolak mafsadatnya, demikianlah kaidah ushul fiqhnya; 5) ‘Urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh kebanyakan orang dan telah menjadi tradisi, baik ucapan maupun perbuatan. Misalnya, kebiasaan atau tradisi yang sudah berjalan di lingkungan kita tinggal bisa sebagai acuan hukum selama tidak bertentangan dengan hukumsyar’i yang lebih kuat. (Tabrani, 2015: 69-71). 3.

Islam Normatif dan Islam Historis Istilah Islam normatif dan Islam historis berkembang dalam kajian kajian Islam. Nasr Hamid Abu Zaid mengklasifikasikan studi Islam ke dalam tiga domain; Pertama, wilayah teks Islam asli, yaitu Alquran dan sunnah otentik Nabi Muhammad. Pada tataran ini, dapat dikatakan bahwa setiap muslim pasti tidak akan lepas dari kitab suci Al-Qur'an dan sunnah yang sama, kecuali golongan Syi'ah yang memiliki kategori sunnahnya masing-masing; Kedua, Pemikiran Islam yang merupakan berbagai penafsiran atas teks asli Islam (Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad). Pada tataran ini juga dapat disebut sebagai hasil pemikiran/ijtihad atas teks-teks Islam asli, seperti tafsir dan fikih. Dalam kelompok ini dapat ditemukan empat cabang utama: 1) hukum/fiqh, 2) teologi, 3) filsafat, dan 4) tasawuf/mistik; Ketiga, amalan umat Islam. Praktik ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial (konteks). (Nasution, 2012:15). Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Islam normatif berarti Islam yang mengandung kebenaran mutlak, Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Seperti masalah keesaan Allah, bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa AlQur'an adalah wahyu Allah, bahwa wajib shalat lima waktu sehari semalam, puasa di bulan

Ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji. bagi yang mampu, melarang meminum minuman yang memabukkan, dilarang berzina, serta aturan-aturan lain yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang penjelasannya jelas dan gamblang tanpa campur tangan manusia. berpikir (ijtihad) dalam memahaminya. Sedangkan Islam historis, berupa pemikiran atau interpretasi terhadap nilai-nilai dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi serta praktik keagamaan umat Islam.

Pada tataran interpretasi, perbedaan pendapat tidak dapat dihindari. Misalnya sentuhan yang membatalkan wudhu. Ada ulama yang berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudlu adalah sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa tetapi bukan Bangsa tua. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu adalah berkumpulnya suami istri (jima'). Sementara itu, dalam hal amalan keagamaan yang dilakukan umat Islam, hal ini dapat dicontohkan dari warna dan model busana shalat. Selain itu, amalan sholat bagi umat Islam Pakistan tidak meletakkan tangan di dada, sedangkan umat Islam Indonesia meletakkan tangan di dada. Contoh lainnya adalah praktik duduk menyamping pada tahiyat terakhir bagi umat Islam Indonesia, sedangkan umat Islam di negara lain tidak melakukannya. Di Indonesia juga merupakan tradisi memperingati maulid Nabi yang tidak ditemukan di negara lain. (Nasution, 2012: 16-17). Islam historis adalah Islam yang beraneka ragam. Sifat subjektivitas manusia melazimkan bagi munculnya aneka ragam Islam yang mengejawantah dalam masyarakat.

Keanekaragaman Islam dalam praktik di masyarakat muncul karena berbagai kondisi ruang dan waktu di mana dan kapan Islam dipahami dan diamalkan oleh manusia (Khadziq,2009: 12).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebenaran universal(mutlak) dalam Islam historis. Karena dalam wilayah ini subjektifitas manusia yang dipengaruhi oleh faktor pemikiran, geografis, historis dan yang lainnya sangat berpengaruh. 4. Nilai-Nilai Universal dalam AjaranIslam Sebagaimana dijelaskan oleh Fahrudin Faiz dalam bukunya Hermeneutika Al-Qur'an (2015: 166-169), Islam menurut Al-Qur'an memiliki beberapa prinsip dasar yang bersifat universal; Pertama, prinsip tauhid. Ini adalah prinsip paling awal yang harus dipandu. Secara umum, misi besar al-Qur'an adalah misi tauhid. Dengan prinsip tauhid, artinya apapun pemikiran dan pandangan seseorang, prinsip pertama yang harus diingat adalah bahwa “Tuhan itu nomor satu” dan “Tuhan harus nomor satu dalam kehidupan”.

Konsekuensi dari prinsip ini berarti bahwa dalam kehidupan hanya ada dua dikotomi, yaitu khaliq dan makhluk; tidak ada yang dapat diposisikan sebagai khaliq selain Allah. Makhluk di atas hanyalah khaliq. Jadi setiap makhluk, setiap manusia pada dasarnya sama derajatnya, egaliter, tidak ada hirarki superior-inferior. Setiap orang sama, hanya Tuhan yang di atas manusia, tidak masalah karena cara berpikirnya adalah materialisme, atau uang sebagai nalar kapitalisme atau masyarakat sebagai nalar sosialisme, atau bahkan manusia itu sendiri sebagai nalar eksistensialisme di filsafat. Kedua, prinsip ibadah dan khilafah. Prinsip ini pada dasarnya mempertimbangkan dua

aspek keberadaan manusia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an; "Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdikan kepada-Ku" (QS. Adz-Zdariyat: 56) dan (QS. Al-Baqoroh: 30) *"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya Aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi."*

Mereka berkata: "Mengapa kamu ingin menjadikan (khalifah) di bumi seseorang yang akan merusaknya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu memuliakanmu dengan memujimu dan mensucikanmu?" Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kedua prinsip tersebut secara sekaligus membidik dimensi vertikal dan horizontal manusia. Dalam beribadah, pola pikir yang harus digunakan adalah pola pikir 'pembacaan, pemahaman, penerimaan, dan pemenuhan', dalam arti membaca dan memahami apa yang dikehendaki Allah melalui ayat-ayat qouliyah maupun kauniyah, menerima dan lalu menjalankannya. Manusia secara vertikal dihadapan Tuhan adalah seorang `abd (hamba), yang berkewajiban sepenuhnya patuh dan tunduk kepada seluruh perintah-Nya. Prinsip ibadah berarti prinsip kepasrahan. Dalam prinsip ini terkandung pengakuan manusia akan segala kelemahan dan keterbatasannya,

termasuk keterbatasan berfikir dan intelejensinya, dihadapan yang tak terbatas (Allah). Sebaliknya, pada posisi khalifah, pola berpikir manusia adalah 'membaca, memahami, merumuskan tindakan dan mengamalkan'; membaca petunjuk Alquran dan membaca realitas, memahaminya, merumuskan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi realitas sesuai petunjuk Alquran dan

menerapkan rumus yang telah digariskan. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab atas terselenggaranya kehidupan yang harmonis di muka bumi, karena sebagai khalifah, manusia adalah 'pengurus dan pengurus bumi'. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, manusia harus mampu membaca realitas alam semesta, menguasai ilmunya dan merumuskan tindakan yang harus dilakukan demi keharmonisan alam semesta. Ketiga, prinsip Ta'aruf dan Tasabuw. Kedua prinsip, ta'aruf dan tasabuw ini lebih mengarah kepada pola bernalar manusia ketika menghadapi keragaman dalam kehidupan. Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan. Nalar ta'aruf adalah nalar 'saling memahami' dan sementara nalar tasabuw adalah nalar 'saling berlomba' tentu berlomba dalam kebaikan yang dimaksud di sini. Kedua sikap ini perlu dilakukan dalam menghadapi orang, kelompok atau komunitas lain yang berbeda dengan yang 'milik kita'. Keniscayaannya keragaman dalam hidup tidak selayaknya dihadapi dengan sikap konfrontatif terhadap yang berbeda, apalagi jika sampai memunculkan konflik yang tidak pada tempatnya. Keempat, prinsip sebagai wasit. Prinsip keempat ini mendapat inspirasi dari QS. AlBaqoroh: 143, bahwa umat Islam di muka bumi ini oleh Allah dijadikan Ummatan Wasatan, ummat penengah. Dalam bahasa olah raga, sang penengah adalah wasit. Layaknya seorang wasit, seorang muslim dituntut mampu menjadi penengah, wasit dalam kehidupan. Ciri paling menonjol dari seorang wasit adalah 'keadilannya'. Dengan kata lain, seorang muslim sejati adalah mereka yang kesehariannya bergaya hidup dan bergaya pikir 'adil', tidak membiarkan persepsi pribadi atau kepentingan kelompok atau pemihakan kepada golongan

tertentu mempengaruhi keputusannya sebagai ‘wasit’. Yang menjadi fokus perhatian utamanya adalah ‘yang sebenarnya’ dan bukan ‘yang diinginkan’, dan kiranya seperti itulah cara berpikir(nalar)seorang wasit sejati. 5. Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang tergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom.

Menurut Benedict Anderson dalam bukunya *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang asal-usul dan Penyebaran Nasionalisme* (1999: 3), wawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan kebangsaan,nasionalisme merupakan paham ideologis kebangsaan, sehingga ia merupakan landasan dan sumber inspirasi bagi seluruh aktifitas kebangsaan. Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah Negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah dan identitas- identitas lainnya yang menjadi kekhususan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. (Nafi’a, 2008: 138). Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian; pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangunoleh kesamaan nasib, tujuan dan identitas;

Kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas, seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama; ketiga,

pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis; keempat, independensi politis yang berwujud sebuah Negara yang merdeka. (Nafi'a, 2008: 139). Nasionalisme religius/Negara religius merupakan sintesa dari Negara sekular di satu sisi dan Negara agama di sisi lain. Menurut Mark Juergensmeyer dalam bukunya *Menentang Negara Sekular* (1998: 233), nasionalisme religius memiliki karakteristik yang dianggap bertentangan dengan nasionalisme sekular diantaranya; pertama, moralitas publik bagi institusi- institusi politik dan birokrasi. Penganut ideologi ini sangat mengapresiasi tradisi dan akar sejarah mereka yang berbasis pada nilai-nilai moralitas. Kedua, justifikasi dan legitimasi agama bagi pemberlakuan sebuah hukum. Ketiga, penggunaan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai universal. Kaum nasionalisme religius sangat menghargai loyalitas kelompok di atas individual dan prestasi-prestasi pribadi. (Nafi'a, 2008:152). Namun perlu dipahami, bahwa nasionalisme religius yang dimaksud bukan nasionalisme religius yang membawa aroma kekerasan dan cenderung mengarah pada fundamentalisme agama, tetapi nasionalisme religius universal yang merupakan produk sintesa anatar nasionalisme dan agama, hasil dari proses kristalisasi dan dialog panjang yang diawali oleh kesadaran saling membutuhkan dengan upaya yang serius dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan bersama. (Nafi'a, 2008: 153).

Untuk itu, nasionalisme religius yang mungkin menjadi harapan alternatif adalah; pertama, nasionalisme yang merupakan produk sistesis antara nasionalisme modern dan agama; kedua, proses sintesa ini harus diawali dengan kesadaran saling menghormati dan membutuhkan; ketiga,

gagasan dan gerakan ini melibatkan banyak pihak untuk mewujudkan tujuan bersama; keempat, gagasan dan gerakan ini bersumber dari nilai-nilai religiusitas universal sebagai titik temu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh elemen beragama. (Nafi'a, 2008: 153). Dengan demikian, nasionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat adalah bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler atau negara agama, melainkan negara agama. Agama boleh tidak tampil secara formal dalam urusan kenegaraan, tetapi Islam harus diimplementasikan sebagai etika sosial, artinya Islam berfungsi sebagai pelengkap kehidupan bernegara. Sehingga Islam berpotensi mendukung pembangunan Indonesia yang adil, egaliter, dan demokratis. Sebaliknya, jika Islam dipaksakan menjadi fungsi tambahan dalam negara, hanya akan membuat Islam kehilangan nilai-nilai fundamentalnya yang kondusif untuk menegakkan keadilan, egalitarianisme, dan demokrasi.

6. Relasi Nilai-Nilai Keislaman dan Kebangsaan Relasi Agama (Islam) dengan negara senantiasa menuai perdebatan yang tidak ada habisnya. Sejak jauh sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini tema tersebut senantiasa ramai diperbincangkan.

Tidak hanya diperbincangkan namun sebagian kalangan sudah mulai membuat gerakan yang memuat ide pendirian khilafah islamiah, ingin menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam dengan berbagai aturannya pun harus mengacupada hukum Islam. Setidaknya ada tiga macam respon dalam menanggapi relasi Islam dengan Negara menurut Gus Dur, yaitu respon integrative, respon fakultatif, dan respon konfrontatif. Respon integratif, berarti Islam sama sekali dihilangkan kedudukan formalnya dan umat Islam

tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan Negara. Sedangkan sikap responsif fakultatif berarti jika kekuatan gerakan Islam cukup besar di parlemen maka mereka akan berusaha membuat perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dianggap berbeda dari ajaran Islam. Dan sikap konfrontatif, merupakan sikap penolakan tanpa kompromi terhadap kehadiran hal-hal yang dianggap tidak islami. (Samud, 2016: viii). Dengan adanya tiga macam respon terhadap relasi Islam dengan Negara, penulis menilai bahwa para pendiri bangsa lebih memilih sikap yang pertama, yaitu respon intergatif. Sehingga Islam semestinya menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam, bukan sekedar memperlihatkan simbol/formalisasi Islam, melainkan Islam harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan umatnya. Indonesia bukanlah Negara sekular, yang secara jelas memisahkan urusan agama dengan Negara.

Indonesia juga bukan Negara agama, yang menjadikan hukum Islam secara legal formal menjadi hukum Negara. Indonesia merupakan Negara religius yang memposisikan agama (Islam) sebagai etika sosial. Dengan menjadikan Islam sebagai etika sosial berarti telah menjadikan Islam sebagai salah satu alternative untuk menghindarkan benturan agama dengan modernisasi atau pembangunan bangsa. Nilai-nilai agama Islam akan mendukung tegaknya konstruk keindonesiaan yang adil, egaliter dan demokrasi. (Samud, 2016: 34-35). Yang kedepannya akan melahirkan sikap toleransi dan hidup yang harmonis antar umat beragama, mengingat Indonesia merupakan Negara yang multikultur dan sangatplural. Bahkan Islam juga tidak mengenal

pembagian wilayah yang jelas antara urusan politik dan agama, bahkan Islam tidak pernah lepas dari politik. Konteks historis Islam menunjukkan bahwa agama lahir sebagai protes terhadap ketidakadilan dalam masyarakat komersial Arab saat itu. Sehingga Al-Qur'an jelas memberikan dorongan untuk peduli terhadap HAM dan melindunginya dari manipulasi yang berasal dari kelas sosial yang lebih kuat. (Samud, 2016: 35). Fakta sejarah inilah yang menjadi alasan mengapa Islam menitikberatkan perhatiannya pada pentingnya nilai-nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Jadi Islam tidak memiliki seperangkat teori politik yang koheren atau teori pemerintahan yang lengkap, tetapi Islam hanya dapat digunakan untuk membangun kerangka atau persepsi yang lebih benar tentang kehidupan yang baik dengan suntikan moral.

Simpulan Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam wilayah tafsir sangat mungkin akan muncul berbagai perbedaan (khilafiyah), sehingga hal ini harus selalu menjadi kesadaran setiap penggiat ormas Islam di Indonesia. Dengan demikian, sikap toleransi dan menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi. Karena dalam ranah tafsir tidak ada kebenaran mutlak, yang ada hanyalah kebenaran relatif. Selain sikap toleransi, setiap penggiat ormas Islam di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan selalu mengedepankan sikap nasionalisme. Harus ada kesadaran bahwa Indonesia bukanlah negara agama, juga bukan negara sekuler melainkan negara agama. Sehingga rumusan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan landasan terakhir. Selanjutnya segala sikap dan tindakan

yang bertentangan dengan 4 pilar kebangsaan harus dijaui dan ditinggalkan.

Daftar Bacaan

- Al-Jamali, Muhammad Fadhil. 1992. Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam. (terj.) H.M. Arifin. Cet. II; Jakarta: Golden Trayon Press.
- Faiz, Fahrudin. 2015. Hermeneutika al-Qur'an: Tema-tema Kontroversial. Yogyakarta: Kalimedia. Khadziq, 2009. Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Teras.
- Manna Khalil al-Qattan, 2015. Studi Ilmu-Ilmu Qur'an. (terj.) Mudzakir, cet. 18; Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Nafi'a Iman, 2008. Wawasan Kebangsaan NU dan Aktualisasinya setelah Kemerdekaan. Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah.
- Nasution, Harun. 1983. Filsafat dan Mistisisme Dalam Islam. Cet. III; Bandung: Nulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2012. Pengantar Studi Islam, Yogyakarta: Academia.
- Noor, Fauz. 2012. Berpikir Seperti Nabi, Yogyakarta: LKiS.
- Rahman, Fazlur. 1983. Tema Pokok Al-Qur'an. Bandung: Pustaka.
- Samud. 2016. Relasi Islam dan Negara dalam Perspektif Gus Dur, Jawa Barat: Tulus Pustaka.
- Tabrani. 2015. Arah Baru Metodologi Studi Islam, Yogyakarta: Ombak

Buana Bhakti Alfatah

Pmi Dan Strategi Gerakan Kepemimpinan

Sejarah lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan sebuah jawaban atas semua problematika yang menjadi tanggung jawab mahasiswa hari ini, baik dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, agama dan negara. Oleh karena itu, kader PMII harus mampu menjawab tantangan zaman dengan segala problematikanya dan berbagai persoalannya. Ketika berbicara "strategi" tentu tidak lepas dari yang namanya "gerakan" karena dua hal ini sangat relevan ketika diaplikasikan dalam organisasi, spesifiknya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII adalah organisasi pergerakan yang mempunyai tujuan, mutlak memerlukan upaya pengorganisasian.

Dalam proses kesejarahan maka akan terlihat bagaimana PMII kemudian menjadi sebuah organisasi dan kemudian meletakkan tujuan dasarnya. Kelahiran PMII berawal dari kegelisahan anak muda NU yang belajar di perguruan tinggi. Kegelisahan itu terjawab dengan didirikannya IMANU (Ikatan Mahasiswa NU) pada akhir 1955. Namun IMANU tidak berumur panjang, karena PBNU menolak keberadaannya dan menampung aspirasi berorganisasi mahasiswa NU ke departemen perguruan tinggi dalam wadah IPNU. Baru kemudian pada konferensi besar IPNU pada tanggal 14 – 16 Maret 1960 di Kaliurang Jogja, ada kesempatan untuk mendirikan organisasi sendiri, karena departemen itu dinilai tidak efektif lagi menampung aspirasi mahasiswa yang begitu besar.

Kesepakatan itu lalu di tindak lanjuti sebulan setelahnya pada tanggal 14 – 16 April 1960 di Taman Pendidikan Siti Khadijah Surabaya. Bertepatan dengan itu ketua PBNU KH. DR. Idham Khalid memberikan lampu hijau, bahkan beliau sempat membakar semangat agar mahasiswa mempunyai prinsip “ Ilmu untuk di amalkan bukan ilmu untuk ilmu “ maka lahirlah PMII pada tanggal 17 April 1960. Strategi dan gerakan sangat krusial untuk diterapkan dalam berbagai kepentingan, antara lain; melakukan rekrutmen kaderisasi, implikasi dalam percaturan politik kampus, hingga dominasi leading sector kampus. Upaya pengembangan PMII di kampus umum sering kali terhenti karena minimnya kreatifitas dari pada kader itu sendiri, tak jarang hal tersebut membuat sedikit hilangnya semangat atau keinginan kader PMII yang sedang melakukan aktivitas.

pengembangan karena lemahnya suporting system dari segala pihak baik kader itu sendiri maupun dorongan dari pihak-pihak lainnya. Maka dari itu merumuskan serta mengkaji ulang strategi serta gerakan pengembangan PMII menjadi sangat mutlak harus dilakukan, untuk selalu mengecek perkembangan serta kondisi di kampus umum tersebut yang tidak bisa disamakan cara serta strateginya di kampus islam pada umumnya.

Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Secara etimologis, strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu Strategos, yang berarti ‘komandan militer’ pada zaman

demokrasi Athena. Karena pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang lainnya². Sedangkan taktik berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu taktike, yang berarti seni pengaturan (art of arrangement). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taktik adalah rencana atau tindakan yang bersistem untuk mencapai tujuan; pelaksanaan strategi; siasat atau muslihat. Sebuah taktik adalah seri pendek dari tindakan konseptual untuk mencapai sebuah tujuan jangka pendek.

Tindakan ini dapat diimplementasikan sebagai satu atau lebih tugas khusus. Istilah ini biasanya digunakan dalam konteks militer, bisnis, politik dan olahraga atau kegiatan kompetitif lainnya. Sebagai mahasiswa dan kader PMII, sikap yang paling utama dipertahankan adalah idealisme dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan intelektual. karena basis di dalam ruang lingkup kampus adalah nilai intelektual, maka meningkatkan intelektual kader PMII merupakan suatu keharusan. Sedangkan nilai-nilai moral merupakan harapan nyata untuk kelak menjadi ruh bagi masyarakat. Upaya Rayon dan Komisariat, pertama harus melakukan usaha perekrutan anggota, meningkatkan jumlah kader untuk menambah amunisi gerakan, bukan hanya sebagai agenda rutinitas organisasi belaka, tapi sebagai upaya untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa agar tidak terpapar fundamentalisme, radikalisme, dan ekstrimisme agama.

Kedua, menjalin kerjasama dengan stake holder kampus, tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan, serta menjalin kerjasama dengan organisasi ekstra dan intra

kampus (HMJ, BEM, UKM) yang tidak bertentangan dengan prinsip, asas, serta tujuan PMII. Ketiga, mendorong kader PMII untuk menguasai bidang keilmuan masing-masing di tiap fakultas, seperti peningkatan prestasi akademik, prestasi softskill dan hardskill lainnya yang diharapkan mampu menarik simpati 2 Masrofiq. 2020. Strategi dan Taktik Gerakan PMII.. Masrofiq. 2020.

Strategi dan Taktik Gerakan PMII mahasiswa di luar PMII untuk paling tidak setuju dengan ide, gagasan, dan gerakan PMII lalu menjadi simpatisan PMII atau kalau beruntung bisa bergabung menjadi bagian dari PMII. Upaya pengembangan PMII di kampus umum bertitik tolak pada kemampuan anggota dan kader PMII dalam merumuskan ide dan gerakan PMII secara individual dan secara kolektif. Islam Ahlussunnah wal Jamaah di PMII adalah sebagai metodologi berpikir (manhaj al-fikr) dan juga sebagai metode gerakan (manhaj al-harakah), sehingga bukan semata-mata hanya sebagai doktrin teologis atau sebuah mazhab saja, namun sebagai metode berpikir dan bergerak untuk menyelesaikan persoalan masyarakat dengan prinsip-prinsip tawasut (moderat), tawazun (netral), ta'adul (keseimbangan) dan tasamuh (toleran). Dalam melakukan penyebaran PMII kader PMII harus memahami arah strategi pengembangan PMII, yang dimana strategi penyebaran PMII harus sesuai dengan perkembangan dunia mahasiswa dan perkembangan perguruan tinggi tempat kader PMII melakukan penyebaran PMII.

Penyebaran itu harus progresif dan maju. Untuk meningkatkan eksistensi melalui ORMAWA, maka PMII dan kampus tidak boleh berseberangan, dalam arti ketentuan-

kentuan yang terdapat dalam Perguruan Tinggi harus bisa dibaca dan diimplementasikan ke dalam pilihan pengembangan PMII Dalam melakukan penyebaran PMII kader PMII harus memahami arah strategi pengembangan PMII, yang dimana strategi penyebaran PMII harus sesuai dengan perkembangan dunia mahasiswa dan perkembangan perguruan tinggi tempat kader PMII melakukan penyebaran PMII. Penyebaran itu harus progresif dan maju. Untuk meningkatkan eksistensi melalui ORMAWA, maka PMII dan kampus tidak boleh berseberangan, dalam arti ketentuan-kentuan yang terdapat dalam Perguruan Tinggi harus bisa dibaca dan diimplementasikan ke dalam pilihan pengembangan PMII.

Upaya pengembangan PMII di kampus umum bertitik tolak pada kemampuan anggota dan kader PMII dalam merumuskan ide dan gerakan PMII secara individual dan secara kolektif. Tentunya, penguatan kemampuan dasar terkait pemahaman Islam Aswaja, Nilai Dasar Pergerakan (NDP) PMII, Ke-PMII-an, serta Analisis Diri dan Analisis Sosial haruslah dikuasai. Itu masih kemampuan dasar yang menjadi modal awal, selain itu juga bertumpu pada kemampuan organisasi dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada di PMII. Mengelola sumber daya di PMII bentuknya seperti mendorong kajian-kajian fakultatif menurut bidang keilmuan masing-masing kader disetiap fakultas, membuat kelompok studi atau kelompok kerja yang berisi anggota dan kader berbagai disiplin ilmu, baik eksakta maupun sosial humaniora untuk berkolaborasi bersama. Dalam menentukan langkah strategis tentunya perlu ada planning serta gagasan yang dibawa

melalui beragam cara yang ada dalam menentukan pandangan melalui strategi dengan menentukan:

1. Visi Kepemimpinan

Keberadaan PMII tidak terlepas dari konteks (kerakyatan) dan proses nasionalisme. Visi manajemen ini juga berorientasi pada perubahan yang terjadi di dalam dan di luar organisasi. Proses historis ini juga matang dari manajemen visi. Karena dalam segala kondisi bangsa ini, baik secara makro maupun mikro, mau tidak mau PMII memajukan kepentingan bersama (bangsa). Dalam posisi ini, PMII sebagai bagian dari negarabangsa harus diorganisir untuk menunjukkan peran historisnya dengan memperkuat komitmen dan kebijakan, mempromosikan demokrasi dan memperkuat masyarakat sipil yang telah terbentuk sebelumnya. Pada saat yang sama, para pemimpin negara belum menunjukkan kenegarawanannya untuk menarik bangsa ini keluar dari krisis.

2. Basis Ideologi

Sebagai organisasi gerakan, PMII harus memperkuat ideologi yang menjadi ruh gerakan, juga sedemikian rupa agar gerakan yang dilakukan lebih signifikan. Penguatan dan pencarian terus-menerus, karena merupakan hakikat PMII sebagai organisasi intelektual dan massa, harus dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan, agar ideologi yang dibangun tidak menghambat gerak PMII. Karena kita tahu bahwa ideologi memiliki sifat yang berbeda-beda, baik yang menghalangi maupun yang membantu atau membimbing. Ideologi harus ditekan karena ide yang dijadikan pedoman telah

menjadi sistem yang menjadi perilaku dan menjaga tatanan yang ada. Dengan demikian menjadi kekuatan yang mengendalikan kekuatan pikiran, ucapan dan tindakan. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, ideologi menjadi sumber bencana bagi organisasi. Maka ideologi sebagai pedoman gerakan harus memaksa perubahan mengikuti perubahan-perubahan tertentu dalam logika ideologi. Ideologi dilihat dari tujuannya sebagai cara berpikir yang menjelaskan kepentingan dan pandangan tertentu dari suatu kelompok sosial tertentu. Ideologi selalu dipengaruhi oleh sosio-ekonomi suatu masyarakat. Kemudian ideologi juga muncul dari kehendak hati nurani manusia untuk membentuk aturan-aturan intelektual dalam masyarakat. Secara ideologi diwarnai oleh hasil pemikiran penciptanya tentang masa lalu dan visi masa depan masyarakat.

3. Kaderisasi

Mengenai gambaran PMII, mencoba menjadikan proses ini sebagai jawaban nyata atas tujuan yang diinginkan dengan terlebih dahulu membuat gambar berkualitas secara alami. Hal ini sangat penting sebelum melalui proses penulisan dan penyitaan. Mengingat kekuatan yang akan dibangun harus lebih besar atau minimal sebanding dengan kekuatan lain (lawan) sebelum kader dipecah dan diambil alih. Jumlah tersebut tidak cukup untuk menjalankan usaha ini, sehingga perlu dilakukan kerja terus menerus untuk menghasilkan gambar sekaligus meningkatkan kualitas gambar baik di bidang umum maupun bidang pilihan. Banyak pengurus yang kemudian mengabaikan permasalahan di wilayah

kerja organisasi dengan membiarkan PMII atau bahkan menelantarkannya.

4. Stratak Gerakan PMII

Hal yang perlu diperhatikan sebelum merencanakan strategi trading taktis adalah; Pertama, mekanisme pergerakan. Setelah merumuskan paradigma kritis transformatif, muncul persoalan membangun mekanisme gerakan. Mekanisme ini lebih kepada peningkatan pengetahuan dan kesadaran agar gerakan PMII dapat dilakukan secara mekanis. Gagasan mekanisme yang perlu dipertimbangkan untuk gerakan PMII adalah; penguatan ideologi, desentralisasi gerakan, menghargai persaingan (konflik) dan penggunaan teknologi informasi. Kedua, model bisnis. Model bisnis sangat penting bagi organisasi seperti PMII untuk mengembangkan kiprahnya ke depan. Tanpa model bisnis yang jelas, akan sangat sulit bagi PMII untuk mewujudkan tujuannya. PMII dapat menerima tiga penawaran yaitu; A). Pola perkembangan adalah perubahan bertahap atau langkah-langkah dalam suatu proses yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan. Dari sudut pandang pemikiran evolusioner, PMII pada mulanya dibesarkan dalam kebudayaan tradisional, dalam perkembangannya harus menjadi neo-tradisionalis untuk mencapai cita-cita. B). Model akulturasi adalah strategi perubahan sosial yang mengacu pada pengaruh satu budaya terhadap budaya lain atau interaksi dua budaya yang mengarah pada perubahan budaya tertentu. Perubahan budaya dimulai dengan menyatunya dua atau lebih sistem budaya yang masing-masing berdiri sendiri. Akulturasi terjadi melalui misi

keagamaan, migrasi, ekspansi ekonomi, dll. Dalam konteks organisasi, model akulturasi dapat diterapkan secara internal untuk memperkuat peran organisasi. C). Model transformatif adalah gerakan yang bertujuan untuk mengubah dari sesuatu yang masih abstrak ke tataran perilaku empiris

Target pencapaian ini harus didukung dengan proses implementasi yang lebih operasional. Dibutuhkan agen untuk mensosialisasikan apa yang dimiliki PMII kepada basis-basis sosial baik internal maupun eksternal. Pertama, Kelompok strategis sebuah kekuatan yang memiliki bargaining position. Dalam wilayah PMII bisa dipetakan pada wilayah internal dan eksternal. Keberadaan struktur kepengurusan dalam sebuah organisasi memiliki konsekuensi terhadap jalannya organisasi. Dalam PMII pengurus sebagai pengelola organisasi memiliki kewenangan untuk menjadi agen sosialisasi wacana dan sekaligus di dalamnya sebagai penggerak dari ide-ide yang hendak diaktualisasikan. Oleh karena itu pengawalan terhadap institusi dan memberikan penguatan menjadi sangat penting. Visi harus sama yang dimanifestasikan pada pola-pola kerja-kerja keorganisasian. Visi yang tidak sama akan menggulingkan organisasi pada perjalanan yang tidak terarah. Selain organ di dalam PMII, organ di luar PMII merupakan wilayah yang harus dirambah dalam pola strategi gerakan sebagai agen.

Irman Trihandaya
Penanaman Nilai-Nilai Keaswajaan Para
Kader Pmii di Universitas PTIQ dan
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

PMII merupakan sebuah organisasi mahasiswa berlandaskan aswaja yang merupakan wadah bagi para kadernya untuk terus berusaha mengemban amanat dan tanggung jawab keislaman yang tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab kemahasiswaan dan kebangsaan. Hal ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan kaderisasi yang rutin dilaksanakan oleh PMII baik yang formal ataupun nonformal. Para kader PMII tentu tidak asing lagi dengan pembacaan Tahlil, Sirah Nabawiyah atau yang biasa disebut dengan diba'an, manaqib Syaikh Abdul Qadir Al Jailani, dan perilaku keagamaan lain yang bersifat normatif sebab kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut sudah menjadi sebuah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh para kader. Dengan ini, tentu menarik untuk dibahas sejauh mana para kader PMII dalam mengaplikasikan nilai-nilai aswaja pada kehidupan sehari-hari.

❖ Nilai-nilai keaswajaan

Amanah PMII dalam menginternalisasikan nilai-nilai keaswajaan yang terangkum dalam semangat “4T” yaitu tawasuth, tawazun, tasamuh, dan ta'adul harus massif digerakkan. Sebab, nilai-nilai tersebut merupakan unsur utama sikap yang mencirikan kepribadian *Ahlus sunnah waljama'ah*.

A. Tasamuh

Satu diantara nilai-nilai aswaja yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sifat tasamuh atau toleransi. Sifat tasamuh merupakan salah satu sikap sosial kemasyarakatan dalam Nahdlatul Ulama². PMII sebagai salah satu organisasi yang berideologikan aswaja juga memasukkan nilai-nilai tasamuh dalam mendidik para kadernya. Penerapan nilai-nilai tasamuh dilakukan baik dalam kegiatan pengkaderan maupun diluar itu. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengurus PMII Rayon Syariah:

“Perihal tasamuh atau toleransi itu jelas diajarkan oleh para senior PMII saat mengkader para anggota baru. Di setiap kegiatan organisasi juga sudah terdapat nilai pendidikan akhlak yang di dalamnya meliputi toleransi.”

Dalam PMII, pemahaman nilai tasamuh dilakukan dengan cara memberikan pengertian kepada para kader tentang definisi dari tasamuh itu sendiri. Selanjutnya, pemahaman tentang nilai tasamuh tersebut diarahkan kepada kehidupan sosial. Contoh paling sederhana dalam nilai tasamuh adalah mengharagai perbedaan pendapat dan prinsip hidup seseorang yang berbeda dengan mereka. Dengan mentoleransi kebiasaan-kebiasaan tersebut, nantinya diharapkan para kader dapat menerapkan nilai tasamuh terhadap perilaku sosial mereka baik dalam berorganisasi, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat, pertentangan merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Mengingat perbedaan sifat dan sudut pandang masing-masing orang.

Maka dari itu, pengaplikasian sikap tasamuh yakni salah satu cara untuk menghindari pertikaian yang disebabkan perbedaan pendapat di kemudian hari. Hal ini bisa diterapkan dengan menghargai setiap perbedaan yang muncul serta menghormati prinsip hidup seseorang yang tidak sama.

B. Tawasuth

Sementara itu, proses implementasi nilai tawasuth atau moderat dalam organisasi PMII lebih menitikberatkan pada pemahaman bahwa Indonesia merupakan negara Islam yang ramah dan mengutamakan nilai moral serta peradaban bangsa. Bagi para kader PMII yang notabene sebagai seorang mahasiswa, sikap moderat sudah terlihat dari tingkatan umur mahasiswa sederajat pada suatu organisasi dimana para junior yang menghormati para senior dan pemimpin. Disinilah tugas para senior dan para pemimpin organisasi untuk mengarahkan para kader agar nilai-nilai tawasuth masuk ke dalam pemahaman kader, sehingga bahaya paham-faham yang ekstrimis dan radikal akan sulit untuk mempengaruhi aqidah para kader.

Konsep tawasuth dalam Aswaja sendiri sebenarnya dapat diimplementasikan di segala aspek kehidupan, diantaranya yakni bidang aqidah, akhlak, pergaulan, bahkan dalam bidang kebudayaan (Nikmah, 2018). Seseorang yang memiliki nilai dalam bersikap, akan mampu berprinsip yang tidak terlalu bebas dan tidak terlalu keras pula. Sehingga sikapnya yang berada di tengah-tengah tersebut akan mampu diterima oleh setiap

lapisan masyarakat dengan mudah. Saat memposisikan diri di tengah masyarakat, sikap tawasuth sangat perlu diimplementasikan sebab Rasulullah SAW bersabda, yang artinya,

“Paling baiknya sesuatu itu adalah pertengahannya” (H.R. Al-Baihaqi)

Jika hadits tersebut dikaitkan dengan pengimplementasian nilai tawasuth dalam hidup bermasyarakat, maka ada baiknya seseorang memposisikan diri untuk selalu berada di tengah, tidak terlalu ekstrim, tanpa membandingkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, menumbuhkan sikap toleran yang tinggi, serta tidak mudah mengkafirkan orang lain hanya karena orang tersebut memiliki perbedaan-perbedaan dalam hal amaliah dengan apa yang diyakini oleh kelompoknya. Sangat tampak jelas memang, pengaplikasian sifat tawasuth ini tidaklah mudah, munculnya berbagai pendapat dan perselisihan yang santer melanda negeri ini menjadikan Indonesia yang terkenal dengan negerinya yang *“gemah ripah loh jinawi”* harus dilanda oleh beberapa isu yang mengusung topik keagamaan yang selalu menarik dan menimbulkan reaksi dari banyak pihak saat dibahas.

Di sisi lain, dalam amaliah-amaliah yang ada dalam aswaja an-nahdliyah, sudah terdapat nilai-nilai yang tepat yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan konsep tawasuth itu sendiri. Dalam bidang akidah misal, aktivitas yang sering dilaksanakan oleh para pengikutnya yaitu khatmil qur‘an

(mengkhataamkan kitab suci Alqur‘an) yang dilakukan dalam sehari secara bersama-sama. Melalui khotmil qur‘an, orang-orang akan terbiasa menyadari bahwa Alqur‘an adalah pedoman yang bisa dia gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, melalui khotmil qur‘an, orang-orang akan terbiasa mengamalkan Al-Quran dan mampu mengambil pelajaran darinya.

Bertawasuth suatu misal, dalam bidang kebudayaan diantaranya adalah dengan memahami dan membiasakan amaliah-amaliah budaya NU yang sudah mengalami proses Islamisasi, seperti acara kupatan, mitoni, sepasar, dll. Pengenalan tradisi-tradisi khas NU tersebut dapat menumbuhkan jiwa-jiwa ukhuwah (persaudaraan) terhadap sesama sebab dari tradisi-tradisi ini, anak akan dibiasakan untuk berhubungan dengan orang lain.

C. Tawazun

Setelah sifat tasamuh dan tawasuth, sifat selanjutnya yang akan dibahas yaitu sifat tawazun. Tawazun yaitu sifat untuk menyeimbangkan diri dalam segala hal. Termasuk dalam sifat tawazun yakni keseimbangan dalam penggunaan dalil dan naqli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Hadid ayat 25, yang artinya,

“Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (penimbang keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

Dalam berorganisasi, para kader PMII berusaha untuk mengajarkan nilai-nilai tawazun kepada para

kadernya melalui pesan-pesan dalam setiap kajian yang diadakan. Salah satu cara pengaktualisasian tawazun dalam kehidupan sebagai seorang mahasiswa adalah penyeimbangan antara kegiatan non akademik dan kegiatan akademik. Para kader PMII diberi pemahaman bahwa sebagai seorang mahasiswa haruslah memiliki sikap tawazun. Menyeimbangkan hubungan vertikal (hubungan kepada Tuhan) dan horizontal (kepada sesama manusia), dan kepada segala yang ada disekitarnya. Sebagaimana yang diajarkan adalah menjadi seorang mahasiswa yang seimbang dengan nilai IPK yang baik, softskill yang memadai, fisik yang prima, dan semangat yang hidup. Hal lain yang tergolong krusial untuk mengimplementasikan nilai tawazun dalam adalah fokus. Ketika sedang belajar, maka sepenuhnya pikiran hendaklah dikerahkan untuk belajar, begitu pula saat berorganisasi, maka sepenuhnya fokus tersebut diberikan untuk organisasinya. Dengan adanya fokus tersebut, sifat tawazun dapat diaktualisasikan dengan baik.

D. Ta'adul

Ta'adul yang berarti tegak lurus atau kemampuan untuk bersikap adil merupakan salah satu nilai-nilai aswaja yang ditanamkan kepada para kader. Menurut salah satu anggota pengurus PMIIRayon Tarbiyah, salah satu bentuk realisasi sikap ta'adul yang diberdayakan diantara para kader adalah dengan memahami harkat dan martabat setiap individu terlepas dari latar belakang dan perlakuan mereka. Selain itu, para kader juga dianjurkan untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak saja saat berdiskusi akan

tetapi mampu bersikap lebih netral. Sebab, dalam kehidupan berorganisasi, ada banyak problematika yang dihadapi baik besar ataupun kecil. Dengan problem-problem itulah para kader dapat melatih kemampuan diri dalam berperilaku adil tanpa membelatangkan kiri maupun tangan kanan saja.

❖ Penanaman Nilai-nilai Keaswajaan para Kader PMII

PMII juga berfungsi sebagai salah satu lokomotif penyebar ajaran Ahlus Sunnah Wal- Jama'ah yang bergerak di area perguruan tinggi atau universitas. Peran yang besar ini tentu harus didukung dengan strategi dari para pengurus PMII untuk menanamkan nilai-nilai keaswajaan terutama kepada para anggota baru yang masih awam terhadap nilai-nilai keaswajaan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh PMII dalam menanamkan nilai-nilai keaswajaan kepada para anggotanya diantaranya adalah dengan melakukan diskusi kelompok, kajian-kajian keislaman, serta penerbitan tulisan-tulisan terkait keaswajaan oleh divisi pers yang terdapat dalam organisasi PMII.

Dalam PMII, diskusi digunakan sebagai salah satu cara kaderisasi sebab diskusi dapat mempermudah komunikasi antar kader satu dengan kader yang lain, dan juga antara kader dengan pengurus atau senior (Lestiana, 2013). Selain itu, tujuan dari diadakannya diskusi tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran para kader dalam memperluas perspektif atau cara pandang terhadap suatu hal dan meningkatkan kemampuan untuk berdialog. Kegiatan ini sangat penting dilakukan sebab diskusi dapat digunakan sebagai wadah bagi para kader untuk saling bertukar

informasi, pendapat, serta dapat melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung agar mendapatkan pengetahuan yang lebih luas karena dalam diskusi terdapat pula kritik dan saran dari pihak-pihak lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Hanurawan (2009) melalui pengalaman diskusikritis dengan beragam posisi, mahasiswa memahami keberadaan konsep-konsep yang luas dalam isu-isu kontroversial dan memecahkan masalah-masalah yang bersifat dilematis berdasar presentasi bukti pendukung, pengajuan argumentasi, dan pertimbangan sudut pandang alternative.

Dalam kegiatan diskusi dan kajian keislaman tersebut, seringkali para tokoh yang kompeten terkait dengan pemikiran islam (Aswaja) dihadirkan. Para pemateri tersebut mayoritas diambil berasal dari para senior-senior di PMII yang sudah cukup matang berkiprah dalam organisasi. Sebab dalam ranah organisasi, perbedaan dalam berideologi menjadi tolak ukur dan dengan adanya kesamaan ideologi antara pemateri dengan para kader dapat menumbuhkan semangat dan pemahaman yang lebih mudah. Tak jarang pula, para pemateri berasal atau pihak luar yang berkompeten dalam bidangnya diundang untuk mengisi diskusi dan kajian. Tidak hanya bertujuan untuk menanamkan semangat beraswaja para kader, materi-materi yang dibahas juga berguna untuk membentengi para mahasiswa diri dari aliran-aliran radikal.

Muliadi

Strategi Pendampingan Kader PMII

Kaderisasi pada hakikatnya merupakan jantung dari setiap organisasi mahasiswa, khususnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Di mana, hal ini merupakan aktivitas yang senantiasa mengharapkan keberlanjutan untuk membina dan mengembangkan setiap potensi yang dimiliki oleh insan pergerakan. Secara kualifikasi, kaderisasi PMII terdapat tiga kategori, yaitu kaderisasi formal, informal, dan non-formal. Semua itu merupakan bentuk keniscayaan kaderisasi dan konsekuensi-logis yang perlu diikuti oleh setiap anggota demi terciptanya anggota yang ideologis, akademis, dan memiliki citra ulul albab. Tanpa di sadari, bahwa secara fitriyah (fitrah), manusia sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa mencari jati diri menjadi insan ulul albab, karena kita ketahui bahwa salah satu sifat dari fitrah manusia yaitu haus akan pengetahuan dan kesempurnaan. Dengan terwujudnya keberlanjutan kaderisasi tersebut, kesadaran fitriyah atau kesadaran intelektualitas untuk menjadi citra ulul albab akan senantiasa diaktualisasikan oleh setiap anggota PMII.

Secara umum istilah strategi memiliki pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam tindakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Secara etimologis, istilah strategi (strategy) berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani. Strategos sebagai kata benda, merupakan gabungan kata stratos (militer) dan ago (memimpin). Adapun stratego sebagai kata kerja bermakna to plan (merencanakan). Kata strategi pertama kali dipakai di

kalangan militer dan diartikan sebagai seni dalam merancang (operasi) perang, terutama erat kaitannya dengan gerakan pasukan dan navigasi dalam menyiasati perang yang dipandang paling menguntungkan untuk memperoleh kemenangan¹¹. Adapun secara terminologis strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang sebuah organisasi, disertai dengan penyusunan cara dan upaya agar tujuan yang diinginkan tercapai.¹¹

Melihat pengertian tersebut dapat dipahami bahwa strategi merupakan tindakan yang didasari dengan sebuah analisis dan taktik merencanakan sesuatu untuk mencapai hal yang diinginkan secara maksimal. Selain itu, strategi dapat dipahami sebagai suatu kompetensi yang sangat penting sehingga dijadikan sebagai suatu tindakan yang harus berkelanjutan.

Adapun pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentorship, berakar kata dari mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna pembimbing atau pengasuh³. Secara istilah, pendampingan atau mentoring merupakan sebagai sebuah aktivitas bimbingan dan binaan dari seseorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada yang membutuhkannya.¹²

¹¹ Husein Umar, *Strategi Management in Action: Konsep, Teori, dan Teknik Menganalisis Manajemen Strategi Berdasarkan Konsep Michael R. Porter, Fred R. David, dan Wheelen-Hunger*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 32.

¹² Salim Gendro, *Effective Coaching*, (Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer, 2014), 14.

Sehingga dapat dipahami bahwa strategi pendampingan kader dapat dipahami sebagai proses, cara, dan metode pembinaan yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bersifat berkelanjutan tanpa ada jeda. Karena kita ketahui bahwa kader merupakan orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam sebuah organisasi⁵, khususnya PMII. Oleh karenanya, dengan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan kader merupakan sebuah keniscayaan dalam PMII. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai organisasi berbasis kemahasiswaan, kebangsaan, dan keIslaman yang senantiasa menjadikan nilai-nilai Ahlussunnah Waljama'ah sebagai haluan pemikiran dan pergerakan demi terbentuknya sebuah kader yang bercitra sebagai insan ulul albab dan tercapainya tujuan yang dicita-citakan oleh PMII, yaitu *'terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah, berbudi luhur, berilmu cakap, dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya, serta komitmen dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia''*.

❖ Landasan PMII

Dalam menjalankan segala aktivitas, sebagai anggota PMII perlu mengetahui bahwa landasan pembinaan dan pengembangan PMII dapat disusun sebagai berikut:

A. Landasan Ideal Islam Ahlussunnah wal Jama'ah

Islam sebagai agama rahmah, yang menuntut pemeluknya untuk menyebarluaskan rahmatan lil-'alamin (rahmat bagi seluruh alam), merupakan sebuah motivasi dan visi dalam setiap menjalankan aktivitas kehidupan.

Begitu pun PMII sebagai organisasi yang bersifat keIslaman yang berhaluan pada Ahlussunnah wal Jama'ah, harus senantiasa menjadikan Islam sebagai panduan dan pedoman hidup, sekaligus dapat menyebarkan dan merealisasikan ke dalam setiap anggota.

B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Secara sadar bahwa PMII merupakan organisasi yang bersifat keIndonesiaan (kebangsaan). Di mana, PMII sendiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang mengakui adanya sebuah Ideologi dan falsafah hidup bangsa yang terumuskan dalam Pancasila. Oleh karenanya, PMII senantiasa menjunjung tinggi dan merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam segala aktivitas yang akan dilakukan.

C. Nilai Dasar Pergerakan (NDP)

Nilai Dasar Pergerakan (singkat: NDP) merupakan kerangka acuan dasar pembuatan aturan dan kerangka pergerakan organisasi PMII.

Di mana, di dalamnya, termuat tatanan nilai yang secara mendasar sebagai rumusan nilainilai keIslaman, seperti kemerdekaan (al-hurriyyah), persamaan (al-musawa), keadilan (al-'adalah), toleransi (tasamukh), perdamaian atau moderat (attawashshuth), dan keIndonesiaan dalam kerangka paham Ahlussunnah wal-Jama'ah .

Dalam upaya memahami, menghayati, dan mengamalkan Islam tersebut, PMII menjadikan Ahlussunnah wal-Jamaah sebagai basis metode berfikir

(manhaj al-fikr) dan basis metode perubahan (manhaj at-taghayyur) untuk menerapkan bentuk-bentuk pemahaman dan aktualitas ajaran agama dan keIndonesiaan yang toleran, moderat, dan kritis-transformatif. Oleh karenanya, dalam NDP, setiap anggota PMII perlu menanamkan tatanilai yang baik dan seimbang dalam setiap aktivitasnya, baik ketika berhubungan dengan Tuhan-nya (hablum-minallah), berhubungan dengan masyarakat (hablum minan-nas), maupun berhubungan dengan lingkungannya (hablum minal-‘alam).

D. Keputusan Kongres PMII

Adapun landasan berikutnya yaitu hasil-hasil diputuskan pada setiap Kongres PMII, yang kemudian pada setiap dekade menjadi produk hukum yang senantiasa direalisasikan oleh setiap anggota PMII

E. Landasan Struktural

Sebagaimana termaktub dalam Bab IV Pasal 5 tentang Usaha, bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia senantiasa berupaya menghimpun dan membina mahasiswa Islam Indonesia sesuai dengan sifat dan tujuan PMII serta peraturan perundang-undangan dan paradigma PMII yang berlaku. Di samping itu, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam berbagai bidang sesuai dengan asas dan tujuan PMII agar dapat terwujudnya pribadi insan ulul albab

F. Landasan Historis-Intelektualitas

Dalam hal ini, PMII sebagai organisasi keIslaman harus selalu haus akan ilmu, dengan senantiasa berdzikir

kepada Allah, dan memiliki keasadaran historis-primordial. Selain itu, PMII sebagai organisasi kemahasiswaan, dalam berfikir dan bertindak senantiasa dituntut untuk dapat berfikir kritis, objektif, dan dialektis serta dapat bertindak kritis transformatif.

❖ Strategi Pendampingan Kader

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa pendampingan atau mentorship merupakan sebuah proses pembinaan atau pembimbingan, yang di dalamnya tidak terlepas dari sebuah upaya aktivitas pendidikan, baik secara formal, informal, maupun non-formal. Secara umum pendidikan dapat dipahami sebagai proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak. Melihat pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa strategi pendampingan kader merupakan pembinaan dan pengembangan yang diarahkan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta membentuk sikap mental dan spiritual serta menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk senantiasa direalisasikan dalam kehidupannya. Di mana, dalam hal ini, diperlukan adanya sebuah metode dan langkah-langkah fundamental, konsisten, aplikatif, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita PMII sebagaimana yang sudah disebutkan di atas. Dalam setiap strategi pembinaan atau pendampingan, tentunya memerlukan suatu kondisi dan suasana yang sehat untuk mencapai tujuan dari pendampingan yang diinginkan. Maka dari itu, sebagai konsekuensi-logis perlu adanya keterbukaan, kejujuran, kecerdasan, kebebasan, dan sikap bertanggung jawab dalam

mendampingi kader. Karena dengan semuanya, pendampingan pun akan semakin terarah dan terkontrol. Oleh karenanya, penulis dalam hal ini merumuskan strategi pendampingan sebagai berikut:

❖ Rekrutmen Berkelanjutan

Dalam mendampingi seorang anggota atau kader, tentunya kita jangan terlalu memaksakan kehendak yang tidak terarah. Justru sebagai bentuk loyalitas untuk menjunjung tinggi PMII, kita perlu memasuki ruang dan kondisi yang dimiliki oleh seorang anggota. Tentunya, meskipun hal itu berbeda dengan kita, namun sebagai warga yang terbuka, kita perlu masuk ke dalam lingkungannya. Sudah kita ketahui bahwa untuk menjadi anggota, mahasiswa baru perlu mengikuti jenjang kaderisasi formal pertama, yaitu Masa Penerimaan Baru (MAPABA). Sudah semestinya, anggota yang sudah dimapabakan oleh kita menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menindaklanjuti. Dalam hal inilah, pendampingan sangat diperlukan. Dalam istilah lain kita bisa menyebutnya sebagai mentor yang bertugas sebagai pendamping para anggota yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Pendamping, perlu masuk kepada ruang dan kondisi setiap anggota yang didampingi, untuk menemukan sebuah rumusan-rumusan kegiatan yang relevan dengan setiap anggota. Jadi, yang dimaksud dalam hal ini, selain kita merencanakan program-program yang sudah diatur, kita juga perlu merumuskan program-program sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimiliki oleh setiap anggota. Sehingga, anggota dapat merasakan bahwa dirinya terlayani dan terdampingi oleh para pendampingnya.

❖ Kader Berjiwa Kepemimpinan

Jiwa kepemimpinan sangat logis harus dimiliki oleh setiap pendamping kader. Kita perlu memahami bahwa manusia yang dikategorikan sebagai khalifah Tuhan di bumi, sudah semestinya memiliki jiwa kepemimpinan. Sehingga dalam hal ini, pada diri setiap pendamping selalu tercermin sikap tanggung jawab untuk melayani, berani, terbuka, jujur, adil, bijaksana, demokratis, dan ikhlas dalam menjalankan misi perjuangan PMII, khususnya dalam membina dan mendampingi kader.

❖ Produk Hukum Aktual

Kita ketahui bahwa PMII merupakan organisasi yang bersifat kemasyarakatan dan kemahasiswaan, di mana tertuntut adanya sebuah sistem hukum dalam mengatur semuanya. Dalam hal ini lah, produk dan peraturan organisasi perlu adanya konsistensi yang tegas, dan korespondensi yang nyata dalam setiap generasi untuk dapat dijadikan sebagai panduan konsumtif dan aplikatif. Sehingga dengannya, akan tercipta sebuah mekanisme organisasi yang teratur dan memiliki kepastian hukum dari berbagai level kepengurusan.

❖ Komunikasi dan Manajerial Secara Baik

Komunikasi dalam kemasyarakatan merupakan hal fundamen yang sangat diperlukan untuk membangun suatu kedekatan emosional. Begitu pun dalam PMII, komunikasi antar individu dan kelembagaan merupakan keniscayaan. Di mana, setiap interaksi menuntut adanya komunikasi timbal-balik antar individu. Di samping itu, setiap organisasi menuntut adanya sebuah manajerial atau pengaturan yang baik, sehingga secara struktural dan keanggotaan dapat

tertata dan terorganisir dengan baik. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan sistem mekanisme organisasi yang efisien dan efektif, serta mampu mewadahi dinamika intern organisasi dan merespon dinamika perubahan eksternal.

❖ Pola Kaderisasi

Pola kaderisasi dapat direalisasikan dan dikembangkan secara koresponden dengan tuntutan perkembangan zaman. Di samping itu, pola kaderisasi pun perlu diintegrasikan dengan berbagai macam tipologi kader. Dengan demikian, akan terbentuk suatu kaderisasi yang berkualitas, dan integritas.

Dengan berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya dan proses pendampingan kader PMII dimaksudkan untuk senantiasa mendorong setiap warga PMII menjunjung tinggi nilai-nilai perjuangan PMII serta membawa kondisi organisasi mencapai cita-cita dan tujuan PMII yang sudah menjadi cita-cita kolektif. Di mana dengan adanya pendampingan kader, nilai-nilai kemahasiswaan, keIndonesiaan, dan keIslaman akan senantiasa terpancar demi mewujudkan perdamaian, sebagaimana hal ini termaktub dalam nilai Ahlussunnah wal-Jamaah, yang oleh PMII dijadikan sebagai metode berfikir dan bertindak. Oleh karenanya, harapan besar dengan adanya pendampingan kader, yaitu dapat membentuk kader yang kritis, ideologis, akademis, profesional, religius, kreatif, integratif, dalam membumikan nilai moderat, toleran, 6 perdamaian, dan persatuan. Karena kita sadar bahwa semua individu menuntut adanya koneksi yang saling menghubungkan, baik ketika berhubungan dengan Tuhan, masyarakat, dan lingkungan.





PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
CABANG JAKARTA SELATAN